

MATRIX GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD

OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM : Program Kepegawaian Daerah

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Program Kepegawaian Daerah Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan : Pengelolaan Assesment Center Tujuan : Terlaksana Pelantikan Pejabat Struktural dan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah ASN yang memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan eselon II adalah sebanyak 122 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 83 dan perempuan sebanyak 39 orang. - Jumlah ASN yang menduduki Eselon II laki-laki lebih banyak dari pada eselon II perempuan - Persentase : Laki-laki = 88,5 % 	Akses: <ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya Pejabat perempuan yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Ess.II Partisipasi: <ul style="list-style-type: none"> - Eselon II laki-laki Perempuan - Masih kurangnya data ASN Perempuan yang memenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sosialisasi tentang pelaksanaan pengisian jabatan eselon II karena dilakukan uji kompetensi - Masih rendahnya kompetensi ASN Perempuan - Kurangnya dukungan dari pihak keluarga seperti suami 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya percaya diri dan minat PNS perempuan untuk menjabat Eselon II - Masih kurangnya data ASN Perempuan yang laki-laki 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksana Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional baik yang perempuan maupun yang laki-laki 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sosialisasi tentang pelaksanaan pengisian jabatan eselon II - Melaksanakan Pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk perempuan - Melakukan pendataan PNS 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah ASN yang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan Eselon II, sebanyak 122 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 83 orang dan perempuan sebanyak 39 orang - Melakukan pendataan PNS 	<ul style="list-style-type: none"> - Output - Bertambahnya jumlah Pejabat Ess.II Perempuan - Input - Jumlah anggaran yang dibutuhkan pada tahun 2024 adalah Rp.168.361.000,

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Fungsional baik yang perempuan maupun yang laki-laki	<p>23 laki-laki dan 3 orang perempuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Syarat JPT Pratama : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kualifikasi paling rendah Sarjana atau Diploma IV 2. Memiliki kompetensi 	<p>Perempuan = 11,5 %</p> <p>Control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pentingnya komitmen bersama untuk memprioritaskan perempuan untuk menduduki jabatan Ess.II <p>Manfaat :-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender dalam pemangku jabatan esselon. - Kurangnya pemahaman pengambil kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender - Belum optimalnya koordinasi antara BKPSDM dan 	<p>kreteria untuk menduduki jabatan Ess.II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender dalam pemangku jabatan esselon. - Belum optimalnya koordinasi antara BKPSDM dan 		<p>perempuan yang memenuhi kriteria untuk menjabat Ess.II.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan koordinasi antara BKPSDM dan Kepala OPD lain. 	<p>Jabatan Esselon II sebanyak 26 orang, dimana laki-laki sebanyak 23 orang dan perempuan sebanyak 3 orang. Atau dengan persentase: Laki-laki = 88,5 % Perempuan = 11,5 %</p>	<p>yang diperuntukan untuk mendukung rencana aksi dan pelantikan pejabat struktural dan fungsional</p> <p>- Outcome Tersedianya pemangku jabatan Ess.II baik laki-laki maupun perempuan</p>	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	<p>teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi social kultural sesuai standard kompetensi jabatan yang ditetapkan.</p> <p>3. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun.</p> <p>4. Memiliki rekam jejak jabatan,integritas yang baik.</p>		Kepala OPD.					

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	5. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun. 6. Sehat jasmani dan rohani.							

Pulau Punjung, Juni 2024

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



H. YUSRISAL, SKM, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680324 199003 1 002

Tim Verifikasi			
Inspektur Drs. Andy Sumanto, SfrA Nip.196812201990091001	Kepala BKD Asri AP.M.Si Nip.19750225 199501 1 001	Kepala Bapperida Paryanto,S.Sos,MT Nip.196906091989021001	Kepala Dinas Sosial P3A PPKB Martini Efendi, S. Hut, MM Nip. 19790905 200801 1 018

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

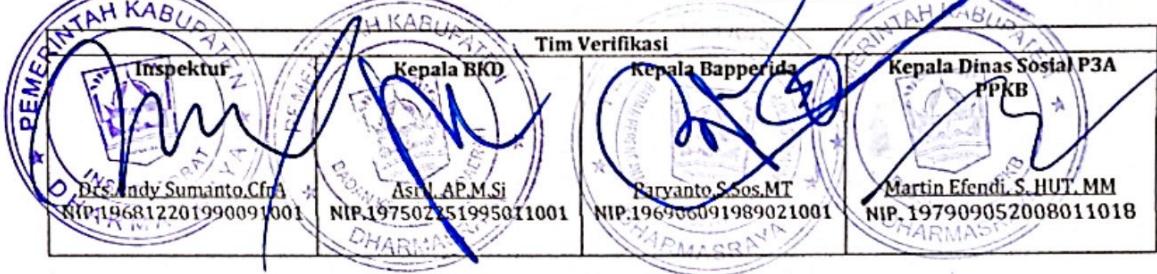
INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Kepegawaian Daerah
KODE PROGRAM	5.03.02
KEGIATAN	Pengembangan Kompetensi ASN
HASIL/OUTPUT	Bertambahnya jumlah pejabat eselon II perempuan
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none">➢ Jumlah ASN yang memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan eselon II pada tahun 2023 adalah sebanyak 122 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 83 orang dan perempuan sebanyak 39 orang.➢ Jumlah PNS yang menduduki Esselon II Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2023 sebanyak 26 orang terdiri dari 23 laki-laki dan 3 orang perempuan.➢ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.➢ Syarat JPT Pratama :<ul style="list-style-type: none">- Memiliki kualifikasi paling rendah Sarjana atau Diploma IV- Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi social kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan.- Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun.- Memiliki rekam jejak jabatan,integritas yang baik.- Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.- Sehat jasmani dan rohani. <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none">➢ Masih kurangnya Pejabat perempuan yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Esselon II.➢ Esselon II laki-laki lebih banyak dari pada eselon II perempuan➢ Persentase :<ul style="list-style-type: none">Laki-laki = 88,5 %Perempuan = 11,5 %➢ Pentingnya komitmen bersama untuk memprioritaskan perempuan untuk menduduki jabatan Esselon II. <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none">a) Kurangnya sosialisasi tentang pelaksanaan pengisian jabatan eselon IIb) Masih rendahnya kompetensi ASN Perempuanc) Masih kurangnya data ASN perempuan yang memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan Esselon II.d) Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender dalam pemangku Jabatan eselon.e) Kurangnya pemahaman pengambil kebijakan tentang Pengarusutamaan Genderf) Belum optimalnya koordinasi antara BKPSDM dan Kepala OPD. <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none">- Kurangnya percaya diri dan minat PNS perempuan untuk menjabat Esselon II, karena dilakukan Uji Kompetensi- Kurangnya dukungan dari pihak keluarga seperti suami

RENCANA AKSI	Komponen	Penempatan ASN Sesuai Kompetensi
		Tujuan Menempatkan Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi
		Alokasi Anggaran 168.361.000,-
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur: Pejabat struktural yang memahami manajemen pemerintahan	
	2. Indikator dan Target Kinerja : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bertambahnya jumlah Pejabat Ess.II Perempuan ▪ Terseleksinya Pejabat Esselon II baik perempuan maupun yang laki-laki. ▪ Terlaksananya pelantikan pejabat Esselon dan Fungsional tertentu, ▪ Terlaksananya pengambilan sumpah/janji PNS 	



FORM KAK/TOR

Program	Kepegawaian Daerah	
Sasaran Program	Pejabat Struktural	
Kegiatan	Pengembangan Kompetensi ASN	
Sub Kegiatan	Pengelolaan Assesment Center	
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
	Gambaran Umum	Untuk Mengisi kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Seleksi Terbuka (Shelter) Asessment atau Uji Kompetensi untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
Kegiatan	Uraian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Uji Kompetensi Pelantikan Pejabat Struktural Pelantikan Pejabat Fungsional Pelantikan Sumpah Janji CPNS ke PNS
	Indikator Kinerja	Persentase Penempatan ASN Sesuai Kompetensi
	Batasan Kegiatan	Pejabat Administrator yang sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
Maksud dan Tujuan	Terdapatnya Pejabat JPT yang memiliki Kompetensi sesuai dengan keahliannya	
Cara Pelaksanaan	Pembentukan Tim Seleksi Terbuka JPT yang terdiri dari Pejabat Internal dan External	
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Di luar Kabupaten Dharmasraya	
Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Kegiatan	Pelaksana : PPTK sub Kegiatan Asessment Center Penanggung Jawab : Kepala BKPSDM	
Jadwal	Januari s/d Desember 2025	
Biaya	168.361.000,-	



MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM : Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Politik melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Politik melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Jika di lihat dari sudut pandang sebelumnya bahwa peserta pengurus inti Partai politik di dominasi oleh kaum laki-laki makanya dengan adanya kegiatan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya politik tidak tertutup kemungkinan Kaum Perempuan juga memiliki Peran yang baik dan bahkan juga bisa berpartisipasi dalam dunia politik agar tidak terjadi kesenjangan gender. Dalam Kegiatan ini mengundang 30 Peserta Pengurus Inti.	<u>Akses:</u> Pada umumnya Pengurus Inti Partai Politik di dominasi oleh kaum laki-laki <u>Partisipasi:</u> Perempuan Kurang Aktif dalam Ke ikut sertaan sebagai Pengurus Inti Partai Politik. <u>Control:</u> Masih kurangnya Pemahaman pengetahuan tentang pembinaan administrasi dalam pengajuan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik bagi pengurus partai politik	Keterbatasan perempuan dalam ikut serta sebagai pengurus parpol dan mengikuti berbagai kegiatan di pengaruhi oleh kodratnya sebagai wanita yang salah satunya mengutamakan kepentingan keluarga	Anggapan di masyarakat bahwa keorganisasian wanita didalam partai politik tidaklah memiliki peran banyak dan Tidak Terlalu Aktif, sebaliknya hanya di Dominasi Oleh Laki-laki	1. Menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan terpenuhi dalam berkegiatan. 2. Meningkatnya pemahaman tentang administrasi partai politik	1. Mengundang Pengurus Partai Politik yang responsive gender 2. Memfasilitasi pengurus Parpol dalam rangka pembinaan administrasi keuangan sehingga pengurus parpol mampu mengelola dana bantuan parpol dengan benar sesuai aturan dan peraturan yang berlaku	Dalam Kegiatan ini akan mengundang 30 Orang Peserta dari Pengurus Partai politik	<u>Input :</u> Jumlah Dana Kegiatan ini sebesar Rp.43.294.000 <u>Output:</u> Jumlah orang yang Paham yang mengikuti Pelatihan pada Bimtek Pembinaan administrasi keuangan Partai Politik bagi pengurus Partai Politik yang Responsif Gender <u>Outcome :</u> Meningkatnya pendidikan Politik masyarakat
Tujuan : Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Pengurus Partai Politik tentang Pertanggungjawaban keuangan Partai Politik	Sesuai dengan Data Jumlah Pengurus Inti dari Keseluruhan Partai Politik berjumlah 30 Orang, Terdiri 25 orang laki-laki (90 %) dan 5 orang Perempuan	<u>Manfaat :</u> Anggapan bahwa keikutsertaan Pengurus Inti dalam Partai Politik ini hanya						

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
(10%)		bermanfaat bagi kaum laki-laki.						

Pulau Punjung, Juni 2024



ASRI, S.Pd., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19691225 199109 1 001

TIM VERIFIKASI ,

<p>Drs. ANDY SUMANTO, CfrA NIP. 19681220 199009 1 001</p>	<p>KEPALA BKD ASRI, AP., M.Si NIP.19750225 199501 1 001</p>	<p>Kepala BAPPERIDA PARYANTO, S.Sos, M.T NIP.19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB MARTIN EFENDI, HS, S.Hut, MM NIP. 19750905 200801 1 018</p>
---	---	--	---

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TAHUN ANGGARAN : 2024

PROGRAM	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Politik melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik									
KEGIATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik									
KODE KEGIATAN	8.01.03									
HASIL / OUTPUT	Meningkatnya pemahaman tentang administrasi Partai Politik bagi pengurus Partai Politik yang Responsif Gender									
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Jika di lihat dari sudut pandang sebelumnya bahwa peserta pengurus inti Partai politik di dominasi oleh kaum laki-laki makanya dengan adanya kegiatan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya politik tidak tertutup kemungkinan Kaum Perempuan juga memiliki Peran yang baik dan bahkan juga bisa berpartisipasi dalam dunia politik agar tidak terjadi kesenjangan gender. Dalam Kegiatan ini mengundang 30 Peserta Pengurus Inti. Sesuai dengan Data Jumlah Pengurus Inti dari Keseluruhan Partai Politik berjumlah 30 Orang, Terdiri 25 orang laki-laki (90 %) dan 5 orang Perempuan (10%)</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses: Pada umumnya Pengurus Partai Politik di dominasi oleh kaum laki-laki</p> <p>Partisipasi: Perempuan Kurang Aktif dalam Ke ikut sertaan sebagai Pengurus Partai Politik.</p> <p>Control: Masih kurangnya Pemahaman pengetahuan tentang pembinaan administrasi dalam pengajuan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik bagi pengurus partai politik</p> <p>Manfaat: Anggapan bahwa ke ikut sertaan Pengurus dalam Partai Politik ini hanya bermanfaat bagi kaum laki-laki.</p> <p>b. Penyebab Internal Keterbatasan perempuan dalam ikut serta sebagai pengurus parpol dan mengikuti berbagai kegiatan di pengaruh oleh kodratnya sebagai wanita yang salah satunya mengutamakan kepentingan keluarga</p> <p>c. Penyebab Eksternal Anggapan di masyarakat bahwa keorganisasian wanita didalam partai politik tidaklah memiliki peran banyak dan Tidak Terlalu Aktif, sebaliknya hanya di Dominasi Oleh Laki-laki</p>									
RENCANA AKSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengundang Pengurus Partai Politik yang responsive gender 2. Memfasilitasi pengurus Parpol dalam rangka pembinaan administrasi keuangan sehingga pengurus parpol mampu mengelola dana bantuan parpol dengan benar sesuai aturan dan peraturan yang berlaku 									
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. Tolak Ukur Jumlah Dana sebesar Rp. 43.294.000</p> <p>2. Indikator dan Target Kinerja</p> <p>Input: - Jumlah Dana Kegiatan ini sebesar Rp. 43.294.000</p> <p>Output: - Meningkatnya pemahaman tentang administrasi Partai Politik bagi pengurus Partai Politik yang Responsif Gender</p> <p>Outcome : - Meningkatnya pendidikan Politik masyarakat</p>									
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 23.134.178.480,- (Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah)									
RENCANA AKSI	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Kegiatan 1</td> <td colspan="2">Mengundang Pengurus Partai Politik yang responsive gender</td> </tr> <tr> <td>Masukan</td> <td>Rp.43.294.000,-</td> </tr> <tr> <td>Keluaran</td> <td>Memfasilitasi pengurus Parpol dalam rangka pembinaan administrasi keuangan sehingga pengurus parpol mampu mengelola dana bantuan parpol dengan benar sesuai aturan dan peraturan yang berlaku</td> </tr> <tr> <td>Hasil</td> <td>Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Pengurus Partai Politik tentang Pertanggungjawaban keuangan Partai Politik</td> </tr> </table>	Kegiatan 1	Mengundang Pengurus Partai Politik yang responsive gender		Masukan	Rp.43.294.000,-	Keluaran	Memfasilitasi pengurus Parpol dalam rangka pembinaan administrasi keuangan sehingga pengurus parpol mampu mengelola dana bantuan parpol dengan benar sesuai aturan dan peraturan yang berlaku	Hasil	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Pengurus Partai Politik tentang Pertanggungjawaban keuangan Partai Politik
Kegiatan 1	Mengundang Pengurus Partai Politik yang responsive gender									
	Masukan		Rp.43.294.000,-							
	Keluaran		Memfasilitasi pengurus Parpol dalam rangka pembinaan administrasi keuangan sehingga pengurus parpol mampu mengelola dana bantuan parpol dengan benar sesuai aturan dan peraturan yang berlaku							
	Hasil	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Pengurus Partai Politik tentang Pertanggungjawaban keuangan Partai Politik								

Pulau Punjung, Juni 2024



VERIFIKASI KEGIATAN

<p>Inspéktur Drs. ANDY SUMANTO, CfrA NIP. 19681220 199009 1 001</p>	<p>KEPALA BKD ASRI, AP, M.Si NIP. 19750225 199501 1 001</p>	<p>Kepala BAPPERIDA PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB MARTIN EFENDI, HS, S.Hut, MM NIP. 19750905 200801 1 018</p>
---	---	---	---

FORM KAK/ TOR

Program		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
Sasaran Program		Pengurus Partai Politik
Kegiatan		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Sub Kegiatan		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Latar Belakang	Dasar Hukum	➤ Permendagri 36 tahun 2018 tentang tata cara perhitungan penganggaran dalam APBD dan Tertib Adminstrasi Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan bagi Partai Politik.
	Gambaran Umum	Kegiatan Administrasni Partai Politik dilaksanakan setiap tahun.
	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Administrasni Partai Politik
Kegiatan	Indikator Kinerja	Terlaksananya pembinaan Admnistrasi Partai Politik bagi Pengurus Partai Politik
	Batasan Kegiatan	-
	Maksud dan Tujuan	Menambah Pengetahuan pengurus partai politik tentang Pembinaan admininistrasi partai politik
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Sosialisasi tentang Pembinaan Administrasni Partai Politik
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Menyesuaikan
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Penanggung Jawab : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2024	
Biaya	Rp. 43.294.000	

Pulau Punjung, Juni 2024



RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024

Urusan	: Pemerintahan umum					
Unit Organisasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
Sub Unit Organisasi	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
Program	8.01.03	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta budaya politik				
Kegiatan	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan di bidang pendidikan politik etika budaya politik peningkatan demokrasi pesilitasi kelembagaan pemerintah perwakilan dan partai politik pemilihan umum /pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik				
Sub Kegiatan	8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang pendidikan politik etika budaya politik peningkatan demokrasi pesilitasi kelembagaan pemerintah perwakilan dan partai politik pemilihan umum /pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah				
Sumber Pendanaan		APBD				
Lokasi Kegiatan		Menyesuaikan				
Waktu Pelaksanaan		Januari s/d Desember 2024				
Kelompok Sasaran		Pengurus partai Politik				
Jumlah 2022						
Jumlah 2023						
Jumlah 2024		Rp. 43. 294.000				
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program Masukan Keluaran Hasil						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Hitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah



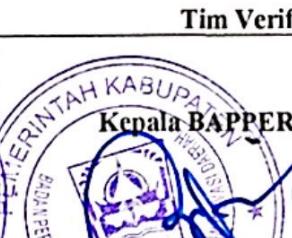
MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
SERVIVE DELIVERY

OPD : Badan Keuangan Daerah
PROGRAM : Pengelolaan Pendapatan Daerah

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	- 90% pendapatan masih bersumber pada dana pusat (dana transfer)	Akses: Kurangnya akses informasi bagi kelompok perempuan dalam hal pelayanan dan konsultasi pajak daerah	- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memahami tentang pajak	Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak beserta pajak daerah yang	Meningkatnya jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah yang responsif gender	-sosialisasi mengenai pelayanan dan konsultasi pajak daerah yang responsif gender	- Perbandingan persentase antara wajib pajak laki-laki dan perempuan selama lima tahun terakhir yaitu laki-laki sebanyak 63%	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah		Partisipasi: Kurangnya partisipasi bagi kelompok perempuan untuk ikut terlibat	- Kurangnya media informasi berupa sosialisasi dalam bentuk media sosial			- Juknis atas kesetaraan gender dalam sosialisasi/penyuluhan terkait		Kegiatan : Pengelolaan pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi	Perbandingan persentase antara wajib pajak laki-laki dan		- Belum adanya Petunjuk Teknis					Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Pajak Daerah Tujuan : -Tersedianya Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang Responsif Gender Sasaran : Wajib Pajak	perempuan selama lima tahun terakhir yaitu laki-laki sebanyak 63% dan perempuan sebanyak 37% -Petugas pelayanan berjumlah 4 orang dengan 3 petugas perempuan dan 1 petugas laki- laki - jumlah objek	dalam kegiatan sosialisasi/penyul uhan terkait konsultasi pajak daerah pelaksana tidak Kontrol: Yang berwenang dan para pengambil keputusan dalam keputusan dalam pelayanan dan konsultasi pajak daerah masih belum memperhatikan kebutuhan gender dan belum semua masyarakat menyadari manfaat dari	(Juknis) atas kesetaraan gender dalam sub output sosialisasi/penyul uhan sehingga pelaksana tidak dapat menentukan kuota jumlah undangan perempuan dan laki-laki yang dapat mengikuti kegiatan sosialisasi/penyul uhan				37%	Input : -Petugas pelayanan berjumlah 4 orang dengan 3 petugas laki-laki - jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya sebanyak ±85000 objek pajak pada kabupaten dharmasraya Output: - Total pendapatan : berjumlah 4 964.168.007.61 orang dengan 2,00- Jumlah PAD : perempuan dan 1 petugas laki-laki .517,00.-

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	pajak yang disesuaikan NJOP nya sebanyak ±85000 objek pajak pada kabupaten dharmasraya	konsultasi pajak daerah Manfaat : Membantu mengurangi kesenjangan gender dalam masalah pelayanan dan konsultasi pajak daerah						Outcomes : Percentase pelayanan dan konsultasi pajak daerah yang responsif gender

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
 Pulau Punjung JUNI 2023 PEMERINTAH KABUPATEN  ASRIL, A.P, M.Si NIP 197502251995011001								
Tim Verifikasi :								
 Inspektorat DINAS DR. ANDY SUMANTO, Cfra A NIP 196812201990091001	 Kepala BKD BADANKABUPATEN PULAU PUNJUNG ASRIL, A.P, M.Si NIP 197502251995011001	 Kepala BAPPERIDA DR. H. PARYANTO, S.Sos, M.T NIP 196906091989021001	 Kepala DINSOSAPPKB MARTIN EFENDI, S.Hut, MM NIP 1970052008011018					

GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) SERVIVE DELIVERY	
SKPD	: BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN	: 2024
PROGRAM	Pengelolaan Pendapatan Daerah
KODE PROGRAM	5.02.04
KEGIATAN	Pengelolaan Pendapatan Daerah
SUB KEGIATAN	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
HASIL/OUTPUT	Layanan dan konsultasi pajak daerah yang responsif gender
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</p> <ul style="list-style-type: none"> - 90% pendapatan masih bersumber pada dana pusat (dana transfer) - Perbandingan persentase antara wajib pajak laki-laki dan perempuan selama lima tahun terakhir yaitu laki-laki sebanyak 63% dan perempuan sebanyak 37% - Petugas pelayanan berjumlah 4 orang dengan 3 petugas perempuan dan 1 petugas laki-laki - jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya sebanyak ±85000 objek pajak pada kabupaten dharmasraya <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor kesenjangan</p> <p><u>Akses:</u> Kurangnya akses informasi bagi kelompok perempuan dalam hal pelayanan dan konsultasi pajak daerah</p> <p><u>Partisipasi:</u> Kurangnya partisipasi bagi kelompok perempuan untuk ikut terlibat dalam kegiatan sosialisasi/penyuluhan terkait konsultasi pajak daerah</p> <p><u>Kontrol:</u> Yang berwenang dan para pengambil keputusan dalam pelayanan dan konsultasi pajak daerah masih belum memperhatikan kebutuhan gender dan belum semua masyarakat menyadari manfaat dari konsultasi pajak daerah</p>

		<p>Manfaat : Membantu mengurangi kesenjangan gender dalam masalah pelayanan dan konsultasi pajak daerah</p> <p>b. Sebab Kesenjangan Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memahami tentang pajak - Kurangnya media informasi berupa sosialisasi dalam bentuk media sosial - Belum adanya Petunjuk Teknis (Juknis) atas kesetaraan gender dalam sub output sosialisasi/penyuluhan sehingga pelaksana tidak dapat menentukan kuota jumlah undangan perempuan dan laki-laki yang dapat mengikuti kegiatan sosialisasi/penyuluhan <p>c. Sebab Kesenjangan Eksternal Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak beserta manfaatnya</p>				
RENCANA AKSI	Sub Kegiatan	<p>Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</p> <table border="1"> <tr> <td>Tujuan</td><td>Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan dan konsultasi pajak daerah dari setiap unsur gender khususnya perempuan</td></tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td><td>Rp. 177.214.000,00,-</td></tr> </table>	Tujuan	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan dan konsultasi pajak daerah dari setiap unsur gender khususnya perempuan	Alokasi Anggaran	Rp. 177.214.000,00,-
Tujuan	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan dan konsultasi pajak daerah dari setiap unsur gender khususnya perempuan					
Alokasi Anggaran	Rp. 177.214.000,00,-					
CAPAIAN PROGRAM	<ul style="list-style-type: none"> • Output: Terlaksananya pelayanan dan konsultasi pajak daerah dari berbagai unsur perempuan dan anak • Outcomes: Persentase pelayanan dan konsultasi pajak daerah yang responsif gender 					



KAK/ TOR

Program		Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sasaran Program		Kepala OPD, Instansi Vertikal, Masyarakat
Kegiatan		Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Permendagri Nomor 67 tahun 2011 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
	Gambaran Umum	Di kab DM dari sekian OPD, Instansi vertikal tergabung mempunyai 38 OPD, 2 Instansi Vertikal. Untuk terlaksananya kualitas pajak yang baik maka perlu dilakukan konsultasi pelayanan pajak.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Indikator Kinerja	Meningkatnya jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah
	Batasan Kegiatan	Pada kegiatan konsultasi dibahas tentang peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah
Maksud dan Tujuan		Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan dan konsultasi pajak daerah dari setiap unsur gender khususnya perempuan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Melalui sosialisasi, diskusi, pemaparan dan tanya jawab
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB Penanggung Jawab : Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah
Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2024	
Biaya	Rp. 177.214.000,00,-	

Pulau Punjung, Juni 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,
KABUPATEN DHARMASRAYA



MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
CAPAIAN SASARAN RPJMD

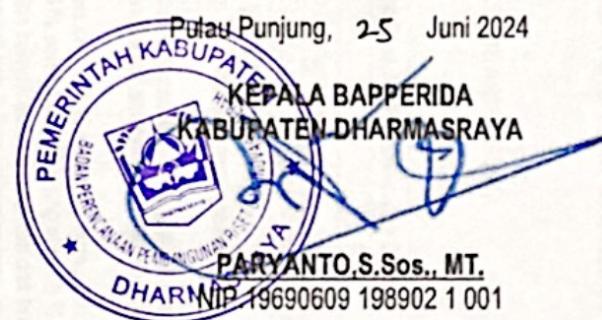
OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

PROGRAM : Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
Program : Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang perencanaan partisipatif, bottom-up, top-down, teknoratik, politik	Akses: - Orang yang menghadiri sudah ditentukan (undangan menghadiri untuk orang tertentu/tidak menjangkau semua komponen)	- ASN yang berperan sebagai Fasilitator dan narasumber tidak memahami konsep responsif Gender	- Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang konsep Gender yang menganggap gender sebagai mendahulukan perempuan	Terakomodir nya usulan masyarakat berbasis gender dalam dokumen perencanaan	-sosialisasi dan undangan secara adil dan merata -partisipasi kelompok perempuan yang mewakili gender minimal 30%	-pelaksanaan musrenbang RKPD Tahun 2025 jumlah peserta laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan (69,73%) atau 70%	Input : Dana untuk pelaksanaan kegiatan musrenbang tahun 2025 sebesar Rp.115,000,000.-
Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2. Musrenbang salah satu instrument untuk menjawab pendekatan bottom up RKPD 2024	Partisipasi: (dalam menyampaikan aspirasi) - Keterlibatan mayoritas laki-laki pada musrenbang Musrenbang RKPD Kabupaten	Partisipasi: - Petunjuk Musrenbang belum Responsif Gender	- Budaya Patriki yang mengutamakan Pria sebagai pemimpin dalam hal kepala keluarga, tokoh masyarakat, ketua kelompok, dll				Output: Dokumen perencanaan (RKPD) yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	3. Tujuan : -Terselenggaranya Musrenbang RKPD	- Partisipasi perempuan lebih sedikit dibanding peserta laki-laki,		- Terbatasnya akses dan partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan, dimana perempuan dianggap lebih mendahulukan perasaan dibanding faktta				Outcomes : Terakomodirnya perencanaaan pembangunan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
		4. Jumlah penduduk Dharmasraya secara keseluruhan pada tahun 2023 sebanyak 234.713 dimana jumlah penduduk laki-laki : 119.505 dan perempuan : 115.208 5. Jumlah peserta musrenbang dari 434 Orang, 4 orang dari forum anak, disabilitas -, laki-laki 280 orang atau 65 % perempuan 154 orang atau 35 % 6. Usulan masyarakat lebih banyak	dan kualitas perwakilan perempuan relatif pasif dibandingkan peserta laki-laki sehingga tidak bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan - Utusan Perwakilan dari kecamatan pada kegiatan musrenbang didominasi laki-laki dibanding perempuan, karena terkait petugas/pejabat wewenang nagari didominasi kaum laki-laki Control: - Kemampuan masyarakat menentukan usulannya tergantung pada prioritas, keselarasan pembangunan daerah, provinsi			(khususnya) perempuan -juknis yang responsif gender dalam proses musrenbang (advokasi, sosialisasi Pengarusutamaan gender)		yang responsif gender

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
	pada bidang fisik dan prasarana minim usulan yang menjadi kebutuhan mayoritas perempuan	Manfaat : - Porsi pengelolaan anggaran lebih banyak ditentukan oleh pendekatan <i>topdown</i> dan politik						



Inspektur Drs. Andy Sumanto, CfrA NIP. 19681220 199009 1 001	Kepala BKD Asril AP, M. Si NIP. 19750225 199501 1 001	Tim Verifikasi Kepala BAPPERIDA Paryanto, S. Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	Kepala DINSGSP3APPKB MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018
--	---	---	---

GENDER BUDGET STATEMENT
INDIKATOR KINERJA UTAMA : CAPAIAN SASARAN RPJMD

SKPD : BAPPERIDA DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
KODE PROGRAM	5.01.02	
KEGIATAN	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
HASIL/ OUTPUT	Dokumen perencanaan (RKPD) yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas	
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permendagri 86 Tahun 2017 tentang perencanaan partisipatif, bottom-up, top-down, teknoratik, politik - Musrenbang salah satu instrumen untuk menjawab pendekatan bottom up - RKPD RKPD 2024 porsi terkait dengan isu gender masih minim di Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V - Jumlah peserta musrenbang dari 214 Orang, 3 orang dari forum anak, disabilitas -, laki-laki 138 orang atau 65 % perempuan 76 orang atau 35 % - Usulan masyarakat lebih banyak pada bidang fisik dan prasarana - Minim usulan yang menjadi kebutuhan mayoritas perempuan <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orang yang menghadiri sudah ditentukan (undangan tidak menjangkau semua komponen) - Keterlibatan mayoritas laki-laki pada musrenbang Musrenbang RKPD Kabupaten - Partisipasi perempuan lebih sedikit dibanding peserta laki-laki, dan kualitas perwakilan perempuan relatif pasif dibandingkan peserta laki-laki sehingga tidak bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan - Utusan Perwakilan dari kecamatan pada kegiatan musrenbang didominasi laki-laki dibanding perempuan, karena terkait petugas/pejabat wewenang nagari didominasi kaum laki-laki - Kemampuan masyarakat menentukan usulannya tergantung pada prioritas, keselarasan pembangunan daerah, provinsi - Porsi pengelolaan anggaran lebih banyak ditentukan oleh pendekatan topdown dan politik <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASN yang berperan sebagai fasilitator dan narasumber tidak memahami konsep responsif gender - Kesenjangan Gender dimana laki-laki lebih banyak menduduki jabatan penting daripada perempuan - Petunjuk Musrenbang belum Responsif Gender <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang konsep Gender yang menganggap gender sebagai mendahulukan perempuan - Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang konsep gender - Budaya Patriarki yang mengutamakan Pria sebagai pemimpin dalam hal kepala keluarga, tokoh masyarakat, ketua kelompok, dan lain-lain - Terbatasnya akses dan partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan, dimana perempuan dianggap lebih mendahulukan perasaan dibanding fakta 	
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Sosialisasi tentang yang akan dibahas dalam perencanaan pembangunan
	Tujuan	Meningkatkan kualitas peserta musrenbang (khususnya) perempuan
	Alokasi Anggaran	Rp. 115,000,000,-
	Komponen/ Aktifitas 2	Juknis yang responsif gender dalam proses musrenbang
	Tujuan	Fasilitasi gender dalam musrenbang
	Alokasi Anggaran	Rp. 115,000,000,-
	Total Anggaran	Rp. 115,000,000,-

Capaian Program

Out put : RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2025 yang responsif Gender

Out come : Terakomodirnya usulan masyarakat berbasis gender dalam dokumen perencanaan



FORM KAK/ TOR

Program		Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sasaran Program		Optimalisasi keterlibatan stakeholder dalam RKPD
Kegiatan		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sub Kegiatan		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
	Gambaran Umum	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional
	Indikator Kinerja	Terlaksananya Musrenbang RKPD Kab. Dharmasraya
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Terakomodirnya hasil musrenbang dalam RKPD
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Mengundang utusan nagari, utusan kecamatan, stakeholder terkait untuk merumuskan usulan prioritas dalam musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten, murenbang provinsi dan musrenbang nasional dalam waktu yang telah ditentukan.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Penanggung Jawab : Kepala BAPPERIDA
Jadwal		Bulan Januari-Mei 2024
Biaya		Rp. 115,000,000,-

Pulau Punjung, 25 Juni 2024



GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
KESENJANGAN GENDER ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

OPD : BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETAIAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

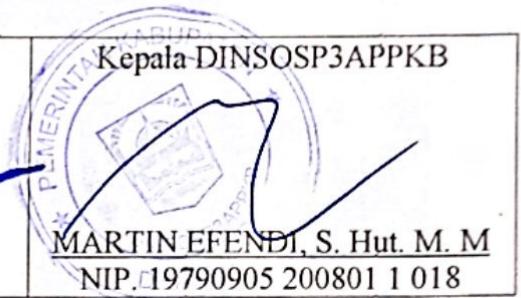
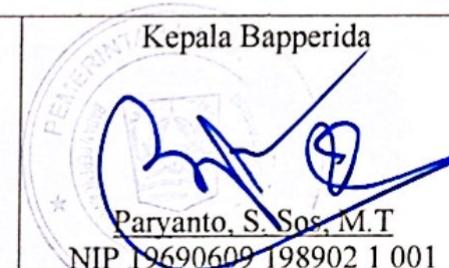
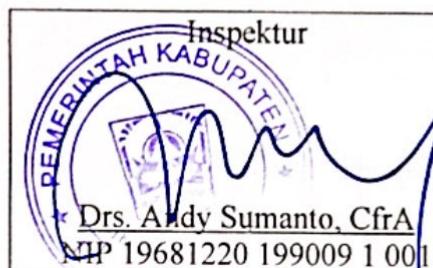
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		1	2	3	4	5	6	7
Program : <i>Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</i>	Data Pembuka Wawasan : <i>Jumlah Angkatan Kerja Laki-laki 75.776 Perempuan 47.748</i>	Faktor Kesenjangan : <i>Akses :</i> - Jumlah Angkatan Kerja Laki-laki 75.776 Perempuan 47.748 - Pengangguran Laki-laki 3.223 Pengangguran yang dibina laki2 60 orang dan Perempuan 4.966 - Peraturan Menteri tenaga kerja dna transmigrasi no 8 tahun 2014 tentang	Sebab Kesenjangan Internal <i>- Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas untuk menampung dan meningkatkan keberdayaan peserta pelatihan</i> <i>- Akses:</i> - kuato pelatihan dan Anggaran blm memadai - Partisipasi Jumlah pengangguran yang dibina laki2 60 orang dan Perempuan 100 orang - Control: Jumlah pengangguran yang ada di Dharmasraya	Sebab Kesenjangan Eksternal <i>- Rendahnya penampungan bagi peserta Perempuan untuk mendapatkan pekerjaan</i> <i>- masih belum adanya kerjasama dengan pihak swasta yang mau menerima /mempekerjakan peserta pelatihan</i> <i>- tidak adanya tindak lanjut</i>	Reformulasi Tujuan <i>- Meningkatkan keterampilan bagi angkatan kerja dan mengurangi kerentanan ekonomi</i>	Rencana Aksi <i>- Dengan Instansi melakukn perekruit peserta pelatihan</i> <i>- Melakukan identifikasi peserta pelatihan berdasarkan jenis kelamin, usia</i> <i>- Meningkatkan sarana dan prasarana sehingga kegiatan yang dilakukan dapat maksimal</i> <i>- memberikan</i>	Data Dasar (Baseline) <i>- merekrut peserta yang mengikuti pelatihan berjumlah 160 orang dari keseluruhan dengan satu paket</i> <i>- peserta 16 orang per paket</i>	Indikator Gender <i>- Output Jumlah Angkatan kerja yang mengikuti pelatihan yang berjumlah 160 orang dari keseluruhan dengan satu paket</i> <i>- Outcome *Meningkatkan kompetensi peserta pelatihan * jumlah terna kerja yang terampil dan kompeten sehingga kehidupan Masyarakat lebih sejahtera</i>

<i>lowongan untuk Angkatan Kerja</i>	<i>pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi</i>	<i>Manfaat : Jenis Pembinaan yang diberikan berupa Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>setelah kegiatan tersebut dilakukan</i>			<i>motivasi dan pengertian kepada peserta</i>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program : <i>Penempatan dan Tenaga Kerja</i>	Data Pembuka Wawasan :	Faktor Kesenjangan : <i>Akses :</i>	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Kegiatan : <i>Pengelola Informasi Pasar Kerja</i>	-Jumlah data pencari kerja 1.816 Laki-laki dan 2677 Perempuan	-Akses Pelayanan Informasi lowongan kerja laki-laki dan Perempuan mendapatkan akses yang sama	-Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh dinas	-Masih kurangnya informasi tentang lowongan kerja yang terbuka baik offline maupun online	Meningkatkan informasi tentang lowongan kerja yang terbuka baik offline maupun online	Meningkatkan Informasi Lowongan kerja sehingga bisa mengurangi terjadinya pengangguran	Penempatan tenaga kerja laki-laki 257 orang dan Perempuan 155 orang	Output: -Meningkatnya pemenuhan kesempatan kerja
Sub Kegiatan : <i>Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online</i>								Outcome -Mengurangi angka pengangguran
Tujuan : <i>Menyediakan informasi bagi Pencari Kerja berdasarkan</i>								

<p><i>Klaster Kompetensi</i></p> <p>Tujuan : Menyediakan Tenaga Kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing</p>	<p>-Control jumlah pencari kerja dan lowongan kerja yang ada di Dharmasraya</p> <p>-Manfaat Informasi lowongan yang diberikan pada pencari kerja</p>						
---	--	--	--	--	--	--	--



TIM VERIFIKASI



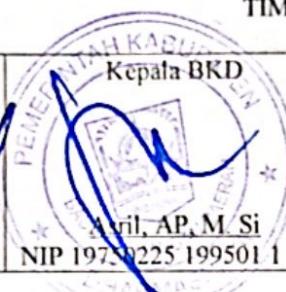
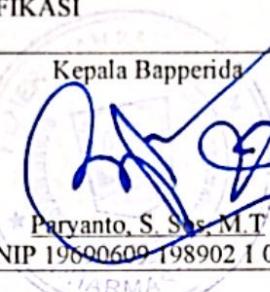
GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD TAHUN ANGGARAN	: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi : 2024		
PROGRAM	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja		
KODE PROGRAM	2.07.03		
KEGIATAN	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		
HASIL/OUTPUT	Meningkatkannya Angkatan Kerja yang terlatih dan berkompeten		
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</p> <p>a. Merekrut 160 angkatan kerja Peserta Pelatihan yang lebih banyak diikuti peserta Perempuan dibandingkan laki-laki yaitu Laki laki 38,5% Perempuan 61,5%</p> <p>b. Adapun Instruktur pelatihan sebanyak 7 orang</p> <p>c. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan mendapatkan 18 Paket setiap paket pesertanya 16 orang Angkatan kerja</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Akses</i> Masih Kurangnya kuato pelatihan dan anggaran yang belum memadai ➤ <i>Partisipasi</i> Jumlah pengangguran yang di bina, saat ini dengan jumlah laki- laki dan perempuan ➤ <i>Manfaat</i> Meningkatnya pengarustamaan gender dalam mengikuti kegiatan Pendidikan dan pelatihan <p>b. Penyebab Internal</p> <p>Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas untuk menampung dan meningkatkan kebedayaan peserta pelatihan</p> <p>c. Penyebab Eksternal</p> <p>Rendahnya penampungan bagi peserta perempuan untuk mendapatkan pekerjaan</p>		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Merekrut peserta Pendidikan dan pelatihan yang responsive gender	
		Tujuan	Meningkatnya Pendidikan dan keterampilan serta keahlian bagi Angkatan kerja
		Alokasi Anggaran	Rp. 51.465.900,-

CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Komponen/ aktivitas 2	Tujuan	
	Alokasi Anggaran		
	Total anggaran	Rp. 51.465.900,-	



TIM VERIFIKASI

 Inspektur <u>Drs. Andy Sumanto, Cfa</u> NIP 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD <u>Ariyati, AP, M. Si</u> NIP 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida <u>Paryanto, S. Sos, M.T</u> NIP 19600609 198902 1 001	 Kepala DINSO SP3 APPKB <u>MARTIN EFENDI, S. Hut, M. M</u> NIP 19790905 200801 1 018
---	---	---	--

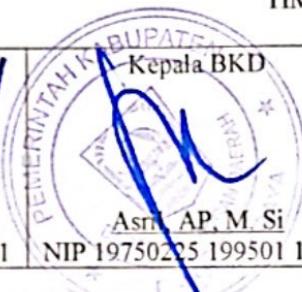
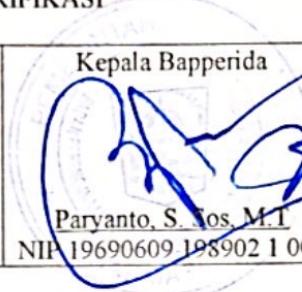
GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD	: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
TAHUN ANGGARAN	: 2024				
PROGRAM	Program Penempatan Tenaga Kerja				
KODE PROGRAM	2.07.04				
KEGIATAN	Pengelola Informasi Pasar Kerja				
HASIL/OUTPUT	Meningkatkannya Pemenuhan Kesempatan Kerja				
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah Pencaker 1.816 Laki-laki ➢ Jumlah Pencaker 2.677 Perempuan ➢ Permenaker No 29 Tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ <i>Akses</i> Pelayanan Informasi lowongan kerja laki-laki dan perempuan mendapatkan akses yang sama ➢ <i>Partisipasi</i> Mendapatkan informasi lowongan kerja yang ada di Dharmasraya ➢ <i>Manfaat</i> Meningkatkan peurustamaan gender dalam penempatan tenaga kerja, informasi lowongan yang di berikan pada pencari kerja <p>b. Penyebab Internal Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas.</p> <p>c. Penyebab Eksternal Masih kurangnya informasi tentang lowongan kerja yang terbuka baik secara offline maupun online.</p>				
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Mendata Tenaga Kerja yang responsive gender			
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Tujuan</td><td>Menyediakan informasi lowongan untuk Angkatan Kerja</td></tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td><td>Rp. 50.841.000,-</td></tr> </table>	Tujuan	Menyediakan informasi lowongan untuk Angkatan Kerja	Alokasi Anggaran
Tujuan	Menyediakan informasi lowongan untuk Angkatan Kerja				
Alokasi Anggaran	Rp. 50.841.000,-				
	Komponen/ aktifitas 2				
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Tujuan</td><td></td></tr> </table>	Tujuan		
Tujuan					

	Alokasi Anggaran	
	Total anggaran	50.841.000,-
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Output Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja Outcome Mengurangi angka pengangguran	



TIM VERIFIKASI

 Inspektorat <u>Drs. Andy Sumantri, CfrA</u> NIP 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD <u>Asri AP, M.Si</u> NIP 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida <u>Paryanto, S. Sos, M.T</u> NIP 19690609 198902 1 001	 Kepala DJNSOSP3APPKB <u>MARTIN EFENDI, S. Hut, M. M</u> NIP 19790905 200801 1 018
---	--	---	--

FORM KAK/ TOR

Program		Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
Sasaran Program		Meningkatnya Pelayanan
Kegiatan		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
Sub Kegiatan		Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klister kompetensi
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan berbasis Kompetensi
	Gambaran Umum	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan setiap tahun
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan
	Indikator Kinerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Bertambahnya pengetahuan Pendidikan keterampilan dan keahlian bagi Angkatan Kerja
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Merekut Angkatan Kerja untuk Mengikuti pelatihan dan Pendidikan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Menyesuaikan
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : UPT BLK Sungai Dareh Penanggung Jawab : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jadwal		Januari sd juni 2024
Biaya		Rp. 50.841.000,-

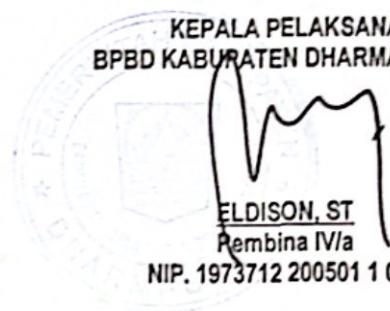


MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat (Servise delivery)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2024

<p>Kegiatan : Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</p> <p>Sub Kegiatan : Pencarian, Pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota</p> <p>Tujuan : Memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban secara cepat dan tanggap</p>	<p>Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan SPM Sub Kebencanaan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Kebencanaan.</p> <p>Jumlah korban bencana pada tahun 2024 sebanyak 3766 jiwa</p>	<p>Akses: Lambatnya respon kaum perempuan terhadap informasi sehingga lambatnya proses pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana</p> <p>Partisipasi: Dalam proses pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kaum perempuan sering terikat dengan tanggung jawab yang lain(mengurus keluarga) serta keterbatasan fisik daripada kaum laki-laki</p>	<p>Adanya kebiasaan ketergantungan kaum perempuan terhadap laki-laki dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana</p>	<p>Adanya keterikatan budaya yang ada didaerah setempat yang selalu mendahulukan laki-laki daripada perempuan</p>	<p>Keseimbangan kaum laki-laki dan perempuan dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana</p>	<p>Meminta Pemerintah setempat untuk melakukan pelatihan kepada kaum laki-laki dan perempuan dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana</p>	<p>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana</p>	<p>Out put : Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana</p> <p>Out come Upaya penyelamatan dan evakuasi korban dapat dilakukan secara cepat dan tanggap</p>
--	---	---	---	---	---	---	---	---

Pulau Punjung, *Juni* 2024

KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN DHARMASRAYA



ELDISON, ST

Rembina IV/a

NIP. 1973712 200501 1 012

Tim Verifikasi



GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

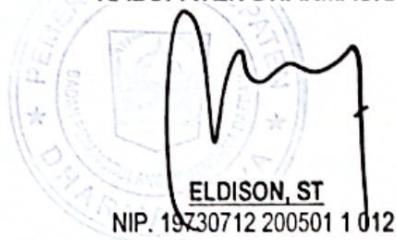
SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TAHUN ANGGARAN : 2024

PROGRAM	PENANGGULANGAN BENCANA	
KODE PROGRAM	1.05.03	
KEGIATAN	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
HASIL/OUTPUT	Meningkatnya jumlah peserta pelatihan dan tingkat kesiapsiagaan bencana dari kaum laki-laki	
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <p>Jumlah Peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana pada tahun 2024 sebanyak 100 orang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perempuan Dewasa : 70 orang • Laki-laki dewasa : 30 orang <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Tidak sesuai dengan responsif gender jumlah laki-laki dengan perempuan yang menjadi peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana. b) (Minimnya minat kaum laki-laki mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana) <p>b. Penyebab Internal</p> <p>Peserta pelatihan kurang memahami tujuan dari pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana dengan Pemerintah Nagari yang daerahnya termasuk daerah rawan bencana</p> <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Koordinasi lintas sektor yang masih belum optimal b) Kurangnya minat peserta laki-laki untuk mengikuti kegiatan terkait pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 	
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Meminta Pemerintah Nagari yang daerahnya termasuk daerah rawan bencana untuk memprioritaskan peserta atau setidaknya sama banyaknya peserta laki-laki dan perempuan dalam mengikuti kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
	Tujuan	Meningkatnya kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana
	Alokasi Anggaran	
	Komponen/ Aktifitas 2	Melaksanakan pelatihan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana
	Tujuan	Meningkatnya jumlah peserta pelatihan dan tingkat kesiapsiagaan bencana dari kaum laki-laki
	Alokasi Anggaran	
	Total Anggaran	Rp. 150.006.000,- (Seratus lima puluh juta enam ribu rupiah)

Capaian Program	<p>Out put :</p> <p>Meningkatnya jumlah peserta pelatihan dan gladi kesiapsiagaan bencana dari kaum perempuan</p> <p>Out come</p> <p>Menurunnya tingkat resiko bencana bagi masyarakat rawan bencana</p>
-----------------	--

Pulau Punjung, Juni 2024

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN DHARMASRAYA,



Tim Verifikasi



GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

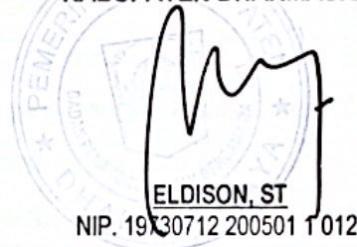
SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TAHUN ANGGARAN : 2024

PROGRAM	PENANGGULANGAN BENCANA										
KODE PROGRAM	1.05.03										
KEGIATAN	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana										
HASIL/OUTPUT	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pencarian, pertolongan dan evaluasi korban bencana										
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Jumlah korban bencana pada tahun 2024 sebanyak 2.291 jiwa yang terdiri dari seluruh masyarakat</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Faktor Kesenjangan <ul style="list-style-type: none"> a. Lambatnya respon kaum perempuan terhadap informasi sehingga lambatnya proses pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana b. Dalam proses pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kaum perempuan sering terikat dengan tanggung jawab yang lain(mengurus keluarga) serta keterbatasan fisik daripada kaum laki-laki b. Penyebab Internal Adanya kebiasaan ketergantungan kaum perempuan terhadap laki-laki dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana c. Penyebab Eksternal Adanya keterikatan budaya yang ada di daerah setempat yang selalu mendahulukan laki-laki daripada perempuan 										
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Tujuan</td> <td>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td></td> </tr> </table> Komponen/ Aktifitas 2 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Tujuan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td></td> </tr> </table>	Tujuan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Alokasi Anggaran		Tujuan		Alokasi Anggaran		<p>Meminta Pemerintah setempat untuk melakukan pelatihan kepada kaum laki-laki dan perempuan dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana</p>	
Tujuan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana										
Alokasi Anggaran											
Tujuan											
Alokasi Anggaran											
	Total Anggaran	41.008.000,- (Empat puluh satu juta delapan ribu rupiah)									

Capaian Program	Out put : Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana
	Out come Upaya penyelamatan dan evaluasi korban dapat dilakukan secara cepat dan tanggap

Pulau Punjung, Jun 2024

**KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN DHARMASRAYA,**



Tim Verifikasi



Drs. Andy Sumanto, C.Fr.A
NIP 19681220 199009 1 001



Asril, AP, M.Si
NIP 19750225 1995011001



Parvianto, S.Sos, M.T
NIP 19690609 198902 1 001



Martin Efendi, HS, S.Hut, MM
NIP 19790905 200801 1 018

FORM KAK/ TOR

Program		Program Penanggulangan Bencana
Sasaran Program		Terlaksananya penanggulangan bencana di daerah
Kegiatan		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Sub Kegiatan		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota
Latar Belakang	Dasar Hukum	Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Kebencanaan
	Gambaran Umum	Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana bagi warga negara yang berada di kawasan rawan bencana
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Kegiatan berupa pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana sesuai dengan potensi bencana yang berada di kawasan rawan bencana
	Indikator Kinerja	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (orang)
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dalam menghadapi bencana
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Mengundang masyarakat dan tokoh masyarakat yang berdomisili di kawasan rawan bencana untuk mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana di tempat yang telah ditentukan.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Menyesuaikan dengan kondisi tempat
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggung Jawab : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya
Jadwal		Bulan Maret 2024
Biaya		Rp. 150.006.000,-

Pulau Punjung, J^{an}uari 2024
 Kepala Pelaksana,

ELDISON, ST
 NIP. 19730712 200501 1 012

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024

Urusan	: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
Unit Organisasi	1.05.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi	1.05.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
Kegiatan	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Sub Kegiatan	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota
Sumber Pendanaan		APBD
Lokasi Kegiatan		Dharmasraya
Waktu Pelaksanaan		Januari s/d Desember 2024
Kelompok Sasaran		Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana
Jumlah 2023		352.640.000,- (Tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
Jumlah 2024		150.006.000,- (seratus lima puluh juta enam ribu rupiah)
Jumlah 2025		

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

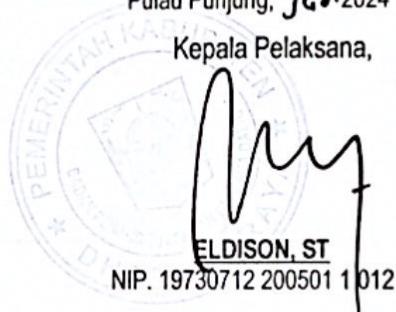
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Memperoleh layanan pencegahan & kesiapsiagaan terhadap bencana	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	100 %
Keluaran	Terlaksananya pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	150.006.000,-
Hasil	Memperoleh layanan pencegahan & kesiapsiagaan terhadap bencana	100 orang 100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Hitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI					150.006.000
5.1. 2	BELANJA BARANG DAN JASA					150.006.000
5.1.2.01	BELANJA BARANG					51.370.000
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					6.370.000
	BBM Pertalite	637	liter	10.000		6.370.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja pakaian dinas lapangan					45.000.000
	Pakaian seragam lapangan Spesifikasi :Bahan kaus	100	lembar	100.000		10.000.000
	Pakaian seragam pelatihan Spesifikasi: Bahan katun	40	lembar	500.000		20.000.000
	Rompi Spesifikasi: Logo bordir	100	lembar	150.000		15.000.000
5.1.02.02	Belanja jasa					30.850.000

5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					30.850.000
	ATK Kegiatan	100	paket	65.000		6.500.000
	Bahan Cetak	20	M1	45.000		900.000
	Honorarium					2.950.000
	Makanan dan Minuman					10.500.000
	Uang saku peserta					10.000.000
5.1.02..04.01	Belanja Perjalanan Dinas					67.786.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan Biasa					44.686.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja perjalanan dalam kota					23.100.000
Grand Total						150.006.000

Pulau Punjung, Jumat 2024

Kepala Pelaksana,



RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024

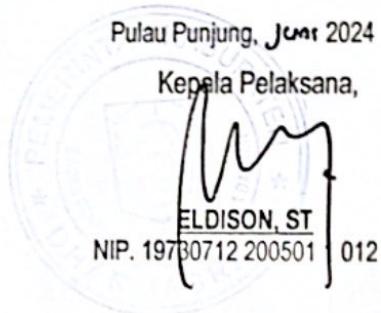
Urusan	: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
Unit Organisasi	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
Kegiatan	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Sub Kegiatan	1.05.03.2.03.03	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
Sumber Pendanaan		APBD
Lokasi Kegiatan		Dharmasraya
Waktu Pelaksanaan		Januari s/d Desember 2024
Kelompok Sasaran		Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana
Jumlah 2023		Rp. 37.125.000,-(Tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
Jumlah 2024		Rp. 41.008.000,-(Empat puluh satu juta delapan ribu rupiah)
Jumlah 2025		

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program Masukan Keluaran Hasil	Memperoleh layanan pencegahan & kesiapsiagaan terhadap bencana Dana yang dibutuhkan Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi Jumlah/persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Hitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI					41.008.000
5.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA					41.008.000
5.1.2.01	BELANJA BARANG					5.000.000
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.000.000
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					5.000.000
	BBM Pertalite	500	liter	10.000		5.000.000
5.1.02.02	Belanja jasa					26.000.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa tenaga penanganan bencana					26.000.000

5.1.2..04	Belanja Perjalanan Dinas					10.008.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa					5.608.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja perjalanan dalam kota					4.400.000
Grand Total						41.008.000



MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
Penugasan Prioritas Nasional/Global seperti Pencapaian SDG's

OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Program Pendaftaran Penduduk Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan : Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Tujuan : Tersedianya	- Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 memiliki Penduduk sejumlah 237.724 Jiwa. Terdiri dari Laki-laki 120.602 Jiwa dan Perempuan 117.122 Jiwa. - Jumlah penduduk usia 17 Tahun ke atas atau sudah menikah berjumlah 171.011 jiwa, dan yang telah melakukan perekaman 163.446 orang (95,58%) - Jumlah penduduk dibawah 17 tahun dan /atau belum menikah	Akses: Masih timpangnya pengarusutamaan gender menyangkut pelayanan terutama pada masyarakat yang jauh dari pusat pelayanan Manfaat : Meningkatnya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Partisipasi: - Sudah Dilakukan Pelayanan, namun belum menyentuh masyarakat yang	- Pelayanan yang masih belum tepat sasaran karena SDM belum memahami apa yang menjadi prioritas	- Kurangnya anggaran untuk melakukan pelayanan yang responsif gender - Dukungan dari pihak eksternal	- Menyusun KAK 1. Melakukan rencana kegiatan dan strategi dalam mencapai tujuan 2. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang 3. Memingkatkan kapasitas SDM	1. Melakukan Sosialisasi kegiatan dan strategi dalam mencapai tujuan 2. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang 3. Memingkatkan kapasitas SDM	Meningkatnya pelayanan dan cakupan persentase cakupan KTP-el KIA	Out put - Meningkatnya persentase cakupan KTP-el KIA Out come - Terwujudnya Pelayanan yang responsif gender

Dokumen Administrasi Kependudukan.	sejumlah 70.504 orang dan yang telah memiliki Kartu Identitas Anak 46.678 orang (66,21%)	jauh dari pusat pelayanan Kontrol:						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Pulau Punjung, Juni 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,
KABUPATEN DHARMASRAYA



ABDI AMRI, SE

NIP 19641231 198612 1 002

Tim Verifikasi

 Inspektorat <u>Drs. Andy Sumanto, CFrA</u> NIP 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD <u>Asrik AP, M.Si</u> NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida <u>Paryanto, S.Sos, M.T</u> NIP 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial P3A PPKB <u>Martin Efendi, S. Hut, M. M</u> NIP. 19790905 200801 1 018
--	---	--	--

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD

: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN ANGGARAN: 2024

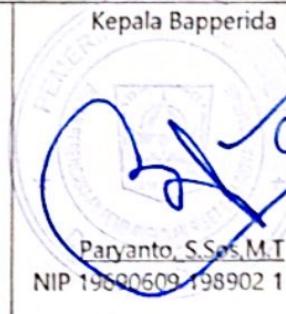
PROGRAM	Program Pendaftaran Penduduk		
KODE PROGRAM	2.12.02		
KEGIATAN	Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
HASIL/OUTPUT	Tersedianya Dokumen Administrasi Kependudukan.		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 memiliki Penduduk sejumlah 237.724 Jiwa. Terdiri dari Laki-laki 120.602 Jiwa dan Perempuan 117.122 Jiwa. - Jumlah penduduk usia 17 Tahun ke atas atau sudah menikah berjumlah 171.011 jiwa, dan yang telah melakukan perekaman 163.446 orang (95,58%) - Jumlah penduduk dibawah 17 tahun dan /atau belum menikah sejumlah 70.504 orang dan yang telah memiliki Kartu Identitas Anak 46.678 orang (66,21%) <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan Masih timpangnya pengarusutamaan gender menyangkut pelayanan terutama pada masyarakat yang jauh dari pusat pelayanan</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <p>a) Pelayanan yang masih belum tepat sasaran karena SDM belum memahami apa yang menjadi prioritas</p> <p>c. Penyebab Eksternal</p> <p>A) Kurangnya anggaran untuk melakukan pelayanan yang responsif gender</p>		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas	Melakukan Pelayanan jemput bola	
		Tujuan	Meningkatnya persentase cakupan KTP-el KIA
		Melengkapi sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan kegiatan pendataan	
		Tujuan	Meningkatnya persentase cakupan KTP-el KIA
	Total Anggaran	Rp. 40.091.250	
Capaian Program	<p>Out put</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya persentase cakupan KTP-el dan KIA <p>Out come</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya Pelayanan yang responsif gender 		

Pulau Punjung, Juni 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,
KABUPATEN DHARMASRAYA,



Tim Verifikasi

 Inspektorat Pemerintah Kabupaten Dr. Andi Sumarto, CFrA NIP 19681220199009 1 001	 Kepala BKD Pemerintah Kabupaten Badri Asril AP, M.Si NIP. 19750225199501 1 001	 Kepala Bapperida Pemerintah Kabupaten Paryanto, S.Sos, M.T NIP 19890609198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial, P3A PPKB Martin Efendi, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018
--	--	--	---

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

OPD : DINAS KESEHATAN

PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender	
<p>Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Masalah : Masih rendahnya kunjungan penderita hipertensi laki-laki 35,4% dari pada kunjungan penderita hipertensi perempuan 59,3% untuk cek kesehatan pengukuran tekanan darah satu kali sebulan</p> <p>(Kemenkes RI,2017)</p> <p>Data sasaran : Jumlah estimasi penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun Total : 47.515 Laki-laki : 24.865 Perempuan : 22.650 Mendapat pelayanan kesehatan Laki-laki : 8.801 (35,4%) Perempuan : 13.425 (59,3%)</p>	<p>Hipertensi merupakan salah satu faktor risiko dari kasus penyakit tidak menular yang terjadi akibat adanya peningkatan tekanan darah sistolik $\geq 140/90$ mmHg sehingga menyebabkan terjadinya angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas)</p> <p>Akses : Masih ada jarak tempuh dari rumah penderita hipertensi jauh ke faskes</p> <p>Partisipasi : Masih rendahnya kesadaran laki-laki untuk melakukan cek kesehatan pengukuran tekanan darah minimal satu kali sebulan</p> <p>Kontrol : Masih kurangnya media promosi kesehatan di media cetak maupun elektronik tentang bahaya penyakit hipertensi</p> <p>Manfaat : Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat posbindu PTM</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat posbindu PTM Kurangnya promosi pelaksanaan kegiatan posbindu PTM pada masyarakat di wilayah setempat Kurangnya edukasi kepada penderita hipertensi terhadap perubahan gaya hidup sehat Kurangnya advokasi pada lintas sektor terhadap pelaksanaan posbindu PTM 	<ul style="list-style-type: none"> Pada saat siang hari laki-laki jarang di rumah karena berperan sebagai pemenuhan kebutuhan perekonomian keluarga Kurangnya pengetahuan keluarga terhadap bahaya penyakit hipertensi Masih kurangnya komitmen lintas sektor dan tokoh masyarakat dalam mendukung kegiatan posbindu PTM 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kunjungan penderita hipertensi , laki-laki untuk melakukan pengukuran tekanan darah satu kali sebulan sebagaimana yang telah dilakukan oleh penderita hipertensi perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> Mengupayakan peran lintas sector dan tokoh masyarakat dalam Kegiatan posbindu PTM di setiap Nagari Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat tentang manfaat dan pelaksanaan posbindu PTM Meningkatkan promosi kesehatan tentang bahaya penyakit hipertensi di medsos dan media cetak Tingkatkan edukasi kepada keluarga dan penderita hypertensi khusus laki-laki tentang pola hidup sehat ,bahaya penyakit hipertensi dan kepatuhan minum obat hipertensi pada saat kunjungan rumah penderita hipertensi Tingkatkan kunjungan penderita hipertensi khususnya laki-laki dengan kegiatan posbindu PTM di masjid setelah sholat jum'at. 	<p>Jumlah estimasi penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun Total : 47.515 Laki-laki : 24.865 Perempuan : 22.650 Mendapat pelayanan kesehatan Laki-laki : 8.801 (35,4%) Perempuan : 13.425 (59,3%)</p>	<p>Output : Meningkatkan kunjungan penderita hipertensi laki-laki untuk melakukan cek kesehatan, pengukuran tekanan darah minimal satu kali sebulan</p> <p>Input : Tersedianya anggaran di Renja tahun 2025 sebanyak Rp.110.000.000,-</p> <p>Out Come : Pengawasan Penderita hipertensi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat menurunkan tingkat kematian yang di sebabkan Penyakit Tidak Menular (PTM) hipertensi.</p>	

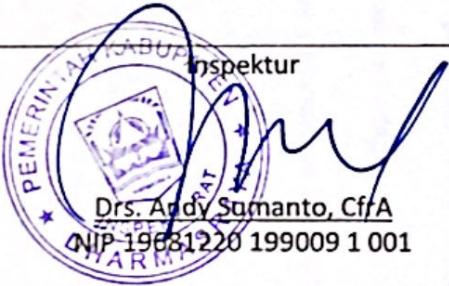
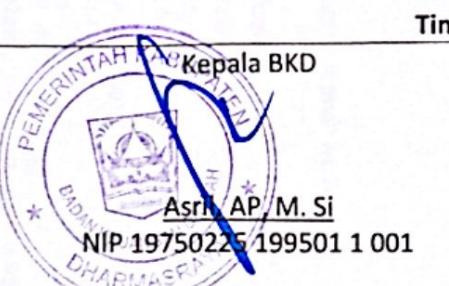
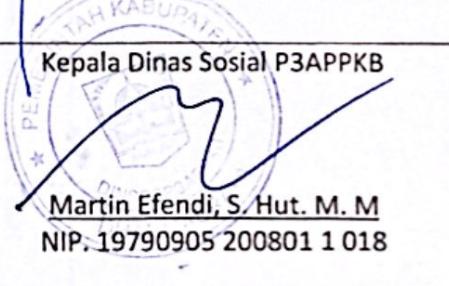
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender	
Tujuan : Meningkatkan peran serta penderita hipertensi , laki-laki untuk melakukan cek kesehatan pengukuran tekanan darah satu kali sebulan	-							

Pulauj Punjung, 26 Juni 2024
 Plt.Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Dharmasraya



Hj.Yosta Defina, S.Farm, Apt, M.KM
NIP. 19690810 199102 2 001

Tim Verifikasi

 <p>Inspektur Drs. Andy Sumanto, Cfa <u>NIP.19681220 199009 1 001</u></p>	 <p>Kepala BKD Asril AP, M. Si <u>NIP.19750225 199501 1 001</u></p>	 <p>Kepala Bapperida Paryanto, S. Sos, M.T <u>NIP.19690609 198902 1 001</u></p>	 <p>Kepala Dinas Sosial P3APPKB Martin Efendi, S. Hut. M. M <u>NIP.19790905 200801 1 018</u></p>
--	--	---	--

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

SKPD : DINAS KESEHATAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
KODE PROGRAM	1 02 02 2.02 0008
KEGIATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
HASIL/ OUTPUT	Meningkatkan kunjungan penderita hipertensi laki-laki untuk melakukan cek kesehatan, pengukuran tekanan darah minimal satu kali sebulan
ANALISA SITUASI	<p>Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Hipertensi merupakan salah satu faktor risiko dari kasus penyakit tidak menular yang terjadi akibat adanya peningkatan tekanan darah sistolik $\geq 140/90$ mmHg sehingga menyebabkan terjadinya angka kesakitan (morbidity) dan angka kematian (mortality) (Kemenkes RI,2017)</p> <p>Data sasaran : Jumlah estimasi penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun Total : 47.515 Laki-laki : 24.865 Perempuan : 22.650 Mendapat pelayanan kesehatan Laki-laki : 8.801 (35,4%) Perempuan : 13.425 (59,3%)</p> <p>Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses : Masih ada jarak tempuh dari rumah penderita hipertensi jauh ke faskes</p> <p>Partisipasi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Masih rendahnya kepedulian laki-laki terhadap kesehatan- Masih rendahnya kesadaran laki-laki untuk melakukan cek kesehatan pengukuran tekanan darah minimal satu kali sebulan <p>Kontrol : Masih kurangnya media promosi kesehatan di media cetak maupun elektronik tentang bahaya penyakit hipertensi</p> <p>Manfaat : Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat posbindu PTM</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none">- Kurangnya promosi pelaksanaan kegiatan posbindu PTM pada masyarakat di wilayah setempat- Kurangnya edukasi kepada penderita hipertensi terhadap perubahan gaya hidup sehat- Kurangnya advokasi pada lintas sektor terhadap pelaksanaan posbindu PTM <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none">- Pada saat siang hari laki-laki jarang di rumah karena berperan sebagai pemenuhan kebutuhan perekonomian keluarga- Kurangnya kepedulian keluarga terhadap bahaya penyakit hipertensi- Masih kurangnya komitmen lintas sektor dan tokoh masyarakat dalam mendukung kegiatan program posbindu PTM di nagari dan jorong

RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengupayakan peran lintas sektor dan tokoh masyarakat dalam Kegiatan posbindu PTM di setiap Nagari - Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat tentang manfaat dan pelaksanaan posbindu PTM - Meningkatkan promosi kesehatan tentang bahaya penyakit hipertensi di medsos dan media cetak - Tingkatkan edukasi kepada keluarga dan penderita hipertensi khusus laki-laki tentang pola hidup sehat, bahaya penyakit hipertensi dan kepatuhan minum obat hipertensi pada saat kunjungan rumah penderita hipertensi - Tingkatkan kunjungan penderita hipertensi khususnya laki-laki dengan kegiatan posbindu PTM di masjid setelah sholat jum'at
		Alokasi Anggaran	Rp. 110.000.000,-
	Total Anggaran	Tersedianya anggaran di Renja tahun 2025 sebanyak Rp.110.000.000,-	
Capaian Program	<p>Out put Meningkatkan kunjungan penderita hipertensi laki-laki untuk melakukan cek kesehatan, pengukuran tekanan darah minimal satu kali sebulan</p> <p>Out come Pengawasan Penderita hipertensi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat menurunkan tingkat kematian yang di sebabkan Penyakit Tidak Menular (PTM) hipertensi.</p>		

Pulau Punjung, 26 Juni 2024

Plt. Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Dharmasraya



Hj. Yosta Defiba, S.Farm, Apt, M.KM

NIP. 19690810 199102 2 001

Tim Verifikasi

 Dis. Andy Sumanto, CfrA NIP 19981220 199009 1 001	 Kepala BKD NIP 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida Paryanto, S. Sos, M.T NIP 19690609 198902 1 001	 Kepala DINOSOSP3APPKB Martin Efendi, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018
--	---	--	--

KERANGKA AJUAN KEGIATAN (KAK)

Trem Of Reference (TOR)

Program		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Sasaran Program		Penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun
Kegiatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Sub Kegiatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Latar Belakang	Dasar Hukum	1.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan PTM 2.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2019 Tentang Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM (Standar Pelayanan Minimal)
	Gambaran Umum	Meningkatkan kunjungan penderita hipertensi
Kegiatan	Uraian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sosialisasi tentang manfaat dan pelaksanaan posbindu PTM - Meningkatkan promosi dan mengupayakan peran lintas sector dan tokoh masyarakat dalam Kegiatan posbindu PTM di setiap Nagari dan Jorong - Tingkatkan edukasi kepada keluarga dan penderita hypertensi khusus laki-laki tentang pola hidup sehat ,bahaya penyakit hipertensi dan kepatuhan minum obat hipertensi pada saat kunjungan rumah penderita hipertensi - Tingkatkan kunjungan penderita hipertensi khususnya laki-laki dengan kegiatan posbindu PTM di masjid setelah sholat jum'at
	Indikator Kinerja	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
	Batasan Kegiatan	Meningkatkan peran serta penderita hipertensi , laki-laki untuk melakukan cek kesehatan pengukuran tekanan darah satu kali sebulan
Maksud dan Tujuan		Meningkatkan kunjungan pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Sosialisasi pelaksanaan kegiatan posbindu PTM, Promosi kesehatan, Advokasi
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Posbindu PTM di setiap Nagari di wilayah setempat
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Kabid.Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelola program PTM
Jadwal		Bulan Januari. s/d Desember 2025.
Biaya		Rp. 110.000.000,-

Pulau Punjung, 16 Juni 2024

Plt. Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Dharmasraya



Hj. Yosta Defina, S.Farm, Apt, M.KM

NIP. 19690810 199102 2 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

OPD : DINAS KESEHATAN

PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan lansia baik secara fisik maupun mental agar dimasa tua bahagia dan berdaya guna dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.	Akses : Masih ada jarak tempuh dari rumah lansia jauh ke posyandu lansia Partisipasi : Masih rendahnya kesadaran lansia laki-laki untuk melakukan cek kesehatan ke posyandu lansia Kontrol : Masih kurangnya komitmen lintas sector terkait dan tokoh masyarakat dalam mendukung program kesehatan lansia	<ul style="list-style-type: none"> Menghindari kegiatan menoton perlu dilakukan kegiatan berinovasi untuk meningkatkan kunjungan lansia laki-laki ke posyandu Kurang memadainya sarana dan prasarana di lapangan sehingga pelayanan kesehatan di posyandu lansia belum maksimal Masih kurangnya kerjasama dan advokasi pada lintas sektor terhadap pelaksanaan posyandu lansia 	<ul style="list-style-type: none"> Masih ada keluarga melibatkan lansia laki-laki ikut berperan sebagai pemenuhan ekonomi keluarga sehingga pada saat siang hari lansia laki-laki jarang di rumah Masih rendahnya peran serta keluarga lansia laki-laki untuk membawa lansia ke posyandu lansia Kurangnya keterlibatan tokoh masyarakat pada saat kegiatan posyandu lansia 	Meningkatkan kunjungan lansia laki-laki ke posyandu lansia untuk cek kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan advokasi pada lintas sector tentang pengadaan sarana dan prasarana di posyandu lansia di setiap jorong Ciptakan inovasi yang menarik dalam melakukan kegiatan di posyandu lansia sehingga kunjungan lansia laki-laki meningkat Menyesuaikan jadwal posyandu lansia dengan aktifitas lansia laki-laki Memberikan motivasi pada keluarga lansia laki-laki agar berperan aktif dalam pelaksanaan posyandu lansia pada saat kunjungan rumah 	Jumlah kunjungan lansia di tahun 2023 yaitu : Kunjungan Pra-lansia (45-59 Th) LK : 9.948 orang PR : 12.314 orang Lansia (60-69 Th) LK : 5.150 orang PR : 6.451 orang Lansia Resti > 70 Th LK : 2.909 orang PR : 3.002 orang	Output : Meningkatnya kunjungan lansia laki-laki ke posyandu lansia untuk cek kesehatan Input : Tersedianya anggaran di Renja tahun 2025 sebanyak Rp.100.000.000,-
Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada usia lanjut	Jumlah Sasaran							
Masalah : Kurangnya kunjungan lansia laki-laki ke posyandu lansia	Dharmasraya ada 197 posyandu lansia							
Tujuan : Meningkatkan kunjungan lansia laki-laki ke posyandu lansia untuk cek kesehatan	Jumlah Sasaran							

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Lansia Resti 7.508 orang LK : 4.009 orang PR : 3.499 orang Jumlah kunjungan lansia di tahun 2023 yaitu : Kunjungan Pra-lansia (45-59 Th) LK : 9.948 orang PR : 12.314 orang Lansia (60-69 Th) LK : 5.150 orang PR : 6.451 orang Lansia Resti > 70 Th LK : 2.909 orang PR : 3.002 orang	hanya periksa pengukuran tensi saja dan cek gula darah tanpa diberi obat							

Pulau Punjung, 26 Juni 2024
 Plt.Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Dharmasraya

Hj. Yosta Defina, S.Farm, Apt, M.KM
 NIP. 19690810 199102 2 001

Tim Verifikasi

 <p>Inspektur <u>Drs. Andy Sumento, CfrA</u> NIP. 19681220 199009 1 001</p>	 <p>Kepala BKD <u>Asril, AP, M. Si</u> NIP. 19750225 199501 1 001</p>	 <p>Kepala Bapperida <u>Paryanto, S.Sos, M.T</u> NIP. 19690609 198902 1 001</p>	 <p>Kepala Dinas Sosial P3APPKB <u>Martin Efendi, S. Hut. M.M</u> NIP. 19790905 200801 1 018</p>
---	---	--	---

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

SKPD : DINAS KESEHATAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
KODE PROGRAM	1 02 02 2.02 0007
KEGIATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
HASIL/ OUTPUT	Meningkatnya kunjungan lansia laki-laki ke posyandu lansia untuk cek kesehatan
ANALISA SITUASI	<p>Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Meningkatkan derajat kesehatan lansia baik secara fisik maupun mental agar dimasa tua bahagia dan berdaya guna dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. hal tersebut upaya yang dilakukan adalah kegiatan promotif dan preventif yaitu cek kesehatan berkala melalui posyandu lansia, di Kabupaten Dharmasraya ada 197 posyandu lansia.</p> <p>Jumlah Sasaran Jumlah lansia sebanyak 68.241 orang terdiri dari Laki-laki 35.744 orang dan Perempuan 32.497 orang dibagi atas tiga kelompok yaitu :</p> <p>Pra-lansia 39.494 orang LK : 20.666 orang PR : 18.828 orang</p> <p>Lansia 21.239 orang LK : 11.069 orang PR : 10.170 orang</p> <p>Lansia Resti 7.508 orang LK : 4.009 orang PR : 3.499 orang</p> <p>Jumlah kunjungan lansia di tahun 2023 yaitu : Kunjungan Pra-lansia (45-59 Th) LK : 9.948 orang PR : 12.314 orang Lansia (60-69 Th) LK : 5.150 orang PR : 6.451 orang Lansia Resti > 70 Th LK : 2.909 orang PR : 3.002 orang</p> <p>Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses : Masih ada jarak tempuh dari rumah lansia jauh ke posyandu lansia</p> <p>Partisipasi : Masih rendahnya kesadaran lansia laki-laki untuk melakukan cek kesehatan ke posyandu lansia</p> <p>Kontrol : Masih kurangnya komitmen lintas sektor terkait dan tokoh masyarakat dalam mendukung program kesehatan</p> <p>Manfaat : Kegiatan program menoton sehingga dapat menimbulkan kurang minat para kaum laki-laki untuk melakukan cek kesehatan karena pelayanan di posyandu hanya diperiksa pengukuran tensi saja dan cek gula darah tanpa diberi obat</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none">• Menghindari kegiatan menoton perlu dilakukan kegiatan berinovasi untuk meningkatkan kunjungan lansia laki-laki ke posyandu lansia untuk cek kesehatan

		<ul style="list-style-type: none"> kurang memadainya sarana dan prasarana di lapangan sehingga pelayanan kesehatan di posyandu lansia belum maksimal Masih kurangnya kerjasama dan advokasi pada lintas sektor terhadap pelaksanaan posyandu lansia <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih ada keluarga melibatkan lansia laki-laki ikut berperan sebagai pemenuhan ekonomi keluarga sehingga pada saat siang hari lansia laki-laki jarang di rumah Masih rendahnya peran serta keluarga lansia laki-laki untuk membawa lansia ke posyandu lansia Kurangnya keterlibatan tokoh masyarakat pada saat kegiatan posyandu lansia 						
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas	<table border="1"> <tr> <td>Tujuan</td><td> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan advokasi pada lintas sector tentang pengadaan sarana dan prasarana di posyandu lansia di setiap jorong Ciptakan inovasi yang menarik dalam melakukan kegiatan di posyandu lansia sehingga kunjungan lansia laki-laki meningkat Menyesuaikan jadwal posyandu lansia dengan aktifitas lansia laki-laki Memberikan motivasi pada keluarga lansia laki-laki agar berperan aktif dalam pelaksanaan posyandu lansia </td></tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td><td>Rp. 100.000.000,-</td></tr> <tr> <td>Total Anggaran</td><td>Tersedianya anggaran di Renja tahun 2025 sebanyak Rp.100.000.000,-</td></tr> </table>	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan advokasi pada lintas sector tentang pengadaan sarana dan prasarana di posyandu lansia di setiap jorong Ciptakan inovasi yang menarik dalam melakukan kegiatan di posyandu lansia sehingga kunjungan lansia laki-laki meningkat Menyesuaikan jadwal posyandu lansia dengan aktifitas lansia laki-laki Memberikan motivasi pada keluarga lansia laki-laki agar berperan aktif dalam pelaksanaan posyandu lansia 	Alokasi Anggaran	Rp. 100.000.000,-	Total Anggaran	Tersedianya anggaran di Renja tahun 2025 sebanyak Rp.100.000.000,-
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan advokasi pada lintas sector tentang pengadaan sarana dan prasarana di posyandu lansia di setiap jorong Ciptakan inovasi yang menarik dalam melakukan kegiatan di posyandu lansia sehingga kunjungan lansia laki-laki meningkat Menyesuaikan jadwal posyandu lansia dengan aktifitas lansia laki-laki Memberikan motivasi pada keluarga lansia laki-laki agar berperan aktif dalam pelaksanaan posyandu lansia 							
Alokasi Anggaran	Rp. 100.000.000,-							
Total Anggaran	Tersedianya anggaran di Renja tahun 2025 sebanyak Rp.100.000.000,-							
Capaian Program	<p>Out put Meningkatnya kunjungan lansia laki-laki ke posyandu lansia untuk cek kesehatan</p> <p>Out come Meningkatnya derajat kesehatan lansia baik secara fisik maupun mental agar dimasa tua bahagia dan berdaya guna dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.</p>							

Pulau Punjung, 26 Juni 2024

Plt. Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Dharmasraya



Tim Verifikasi

Inspektor	Kepala BKD	Kepala Bapperda	Kepala DINSP3APPKB
Drs. Andy Sulmanto, CfrA NIP 19681220 199009 1 001	Asril, AP, M. Si NIP 19750225 199501 1 001	Paryanto, S. Sos, M.T NIP 19690609 198902 1 001	Martin Efendi, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018

KERANGKA AJUAN KEGIATAN (KAK)

Trem Of Reference (TOR)

Program		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Sasaran Program		Pada Usia Lanjut
Kegiatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
Sub Kegiatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2019 Tentang Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM (Standar Pelayanan Minimal)
	Gambaran Umum	Meningkatkan kunjungan lansia untuk cek kesehatan
Kegiatan	Uraian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan advokasi pada lintas sector tentang pengadaan sarana dan prasarana di posyandu lansia di setiap jorong • Ciptakan inovasi yang menarik dalam melakukan kegiatan di posyandu lansia sehingga kunjungan lansia laki-laki meningkat • Menyesuaikan jadwal posyandu lansia dengan aktifitas lansia laki-laki • Memberikan motivasi pada keluarga lansia laki-laki agar berperan aktif dalam pelaksanaan posyandu lansia pada saat kunjungan rumah
	Indikator Kinerja	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
	Batasan Kegiatan	Meningkatkan kunjungan lansia laki-laki ke posyandu lansia untuk cek kesehatan
Maksud dan Tujuan		Meningkatkan kunjungan pelayanan kesehatan pada lansia laki-laki ke posyandu lansia untuk cek kesehatan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Advokasi ke lintas sector, Berinovasi dalam melakukan kegiatan,
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Fasyankes dan Posyandu lansia di setiap Nagari di wilayah setempat
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Kabid.Kesehatan Masyarakat dan Pengelola lansia
Jadwal		Bulan Januari. s/d Desember 2025.
Biaya		Rp. 100.000.000,-

Pulau Punjung, 26 Juni 2024

**Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Dharmasraya**



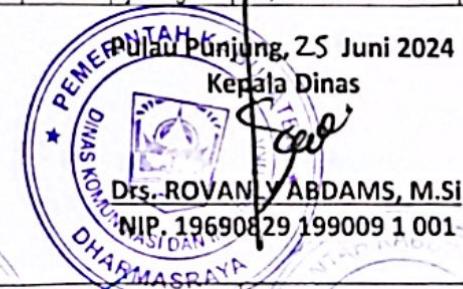
Hj. Yosta Defina, S.Farm, Apt, M.KM
NIP. 19690810 199102 2 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

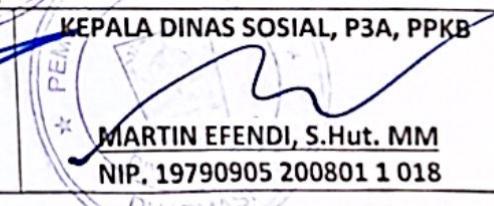
**OPD
PROGRAM**

**: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya
: Program Informasi dan Komunikasi Publik**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Gender
Program : Program Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Media Komunikasi Publik Tujuan : Terwujudnya Keterbukaan informasi publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.	Keterbukaan untuk memperoleh informasi sesuai dengan tuntutan perkembangan diera saat ini. Disahkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, sejalan dengan satu pilar informasi, yaitu Transparansi menuju <i>Clean Government</i> dan <i>Good Governance</i> . Keterbukaan informasi public ini juga menjadi target IKU dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik diharapkan informasi pembangunan dapat diakses untuk seluruh masyarakat termasuk ibu, anak dan lansia.	<u>Akses:</u> - Akses informasi untuk ibu, anak dan lansia yang lebih banyak di rumah masih terbatas <u>Partisipasi:</u> - Kurangnya minat masyarakat terutama ibu, anak dan lansia mengenai pentingnya mengakses informasi <u>Kontrol:</u> - Belum adanya kontrol untuk mengetahui fasilitas yang sama untuk pria, wanita, anak dan lansia <u>Manfaat :</u> - Perempuan, anak dan lansia tidak responsive terhadap informasi terutama dalam perkembangan pembangunan.	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terutama ibu, anak, dan lansia mengenai pentingnya informasi publik tentang berbagai kegiatan pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Kurangnya Keinginan Masyarakat Terutama Ibu, anak dan lansia untuk mengakses informasi public.	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi termasuk antar warga bapak, ibu, anak dan lansia.	- Melakukan sosialisasi kepada Nagari agar dapat menyampaikan bagi Jorong untuk memberikan informasi pembangunan secara sambung menyambung antar warga bapak, ibu, anak dan lansia. - Memperbanyak informasi kegiatan pembangunan melalui media spanduk yang diletakkan di masyarakat agar dapat diakses oleh ibu, anak dan lansia.	Keterbukaan untuk memperoleh informasi sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi public. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi public memperbanyak informasi di masyarakat agar dapat diakses oleh ibu, anak dan lansia.	<u>Input :</u> - Jumlah media internal (majalah, kalender, baliho, spanduk) yang informative bagi bapak, ibu, anak dan lansia <u>Output:</u> - Adanya penyampaian informasi pembangunan seluruh masyarakat Dharmasraya termasuk ibu, anak, dan lansia <u>Outcome :</u> - Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi pembangunan termasuk ibu, anak dan lansia



TIM VERIFIKASI



MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

**OPD
PROGRAM**

: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya
: Program Informasi dan Komunikasi Publik

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Gender
Program : Program Informasi dan Komunikasi Publik	Kegiatan ini merupakan peningkatan informasi public yang dilakukan secara eksternal melalui kerjasama media, yang dilaksanakan sesuai amanat Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Akses: Jumlah media perempuan atau media khusus anak yang mengajukan kerjasama sangat sedikit, hanya 1 media (Narasi). Partisipasi: Wartawati yang meliput kegiatan pembangunan yang memahami gender sangat kurang (\pm 10 orang) Kontrol: Tidak ada masalah (fasilitas yang sama diberikan untuk wartawati dan media khusus perempuan (Narasi)) Manfaat: Perempuan, anak dan lansia Dharmasraya tidak responsive terhadap Informasi perkembangan Pembangunan.	Belum ada sosialisasi kepada media untuk lebih banyak mengirimkan wartawan dalam peliputan kegiatan pembangunan yang memahami gender	- Jumlah media khusus perempuan atau media khusus anak yang mengajukan kerjasama sangat sedikit, hanya 1 media (Narasi). - Jumlah wartawati (4 orang) yang meliput kegiatan pembangunan dan belum memahami gender	Meningkatnya Kerjasama Media Nasional dan Lokal untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik yang berkualitas termasuk bapak, ibu, anak dan lansia.	Mengajukan kerjasama dengan Dinas Sosial, P3APPKB untuk melakukan sosialisasi gender kepada media	Mengajukan kerjasama dengan Dinas Sosial, P3APPKB untuk melakukan sosialisasi gender kepada media	Keterbukaan untuk memperoleh informasi sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana diharapkan adanya peningkatan jumlah wartawan yang memahami gender dan dapat memberikan informasi pembangunan yang setara bagi bapak, ibu, anak dan lansia.
Sub Kegiatan : Relasi Media								Input : - Jumlah wartawan yang memahami kesetaraan gender bagi bapak, ibu, anak dan lansia Output: - Jumlah kerjasama media nasional dan local yang memberikan informasi kesetaraan gender Outcome : - Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi pembangunan termasuk ibu, anak dan lansia
Tujuan : Meningkatnya Kerjasama Media Nasional dan Lokal								



Puluhanung, 25 Juni 2024
Kepala Dinas

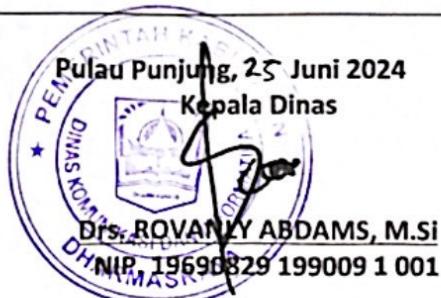
Drs. ROVANLY ABDAMS, M.Si
NIP. 19690829 199009 1 001

TIM VERIFIKASI

 Drs. ANDY SUMANTO, CfrA NIP. 19681220 199009 1 001	 KEPALA BKD ASRIL AP, M.Si NIP. 19690609 198902 1 001	 KEPALA BAPPEDA PARYANTO, S.Sos,M.T NIP. 19690609 198902 1 001	 KEPALA DINAS SOSIAL, P3A, PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut, MM NIP. 19790905 200801 1 018
---	--	---	--

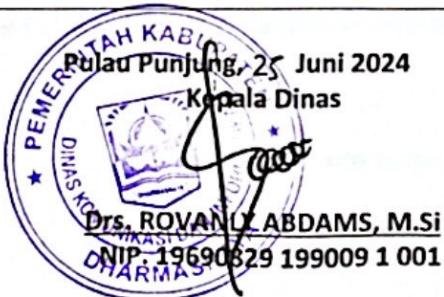
FORM KAK/TOR

Program	Informasi dan Komunikasi Publik	
Sasaran Program	Masyarakat	
Kegiatan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Sub Kegiatan	Pengeloaan Media Komunikasi Publik	
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
	Gambaran Umum	Untuk menyampaikan Informasi Pembangunan Kepada seluruh Masyarakat Dharmasraya, agar seluruh masyarakat memperoleh Informasi pembangunan termasuk ibu, anak dan lansia.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kepada Nagari untuk pembentukan jaring-jaring informasi tingkat nagari - Pengadaan Informasi kegiatan pembangunan melalui media Baliho dan spanduk setiap Jorong.
	Indikator Kinerja	Jumlah Media Internal (Vidiotron, Majalah, kelender, baliho, spanduk) yang Informatif
	Batasan Kegiatan	Masyarakat Dharmasraya
Maksud dan Tujuan	Untuk menyampaikan Informasi Pembangunan Kepada seluruh Masyarakat Dharmasraya	
Cara Pelaksanaan	Membentuk jaring-jaring informasi Pembangunan di tingkat nagari	
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten Dharmasraya	
Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Kegiatan	Pelaksana : PPTK sub Kegiatan Pengeloaan Media Komunikasi Publik Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
Jadwal	Januari s/d Desember 2024	
Biaya	350.000.000,-	



FORM KAK/TOR

Program	Informasi dan Komunikasi Publik	
Sasaran Program	Wartawati	
Kegiatan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Sub Kegiatan	Relasi Media	
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
	Gambaran Umum	Media Khusus Perempuan/anak yang mengajukan kerja sama sangat sedikit dan wartawati yang meliput pembangunan belum memahami gender
Kegiatan	Uraian Kegiatan	- Sosialisasi Gender kepada Media (kerjasama dengan Dinas Sosial, P3APPKB)
	Indikator Kinerja	Jumlah wartawati yang memahami Kesetaraan Gender
	Batasan Kegiatan	Wartawati
Maksud dan Tujuan	Untuk memberikan pemahaman kepada wartawati tentang kesetaraan gender	
Cara Pelaksanaan	Memberikan sosialisasi kepada wartawati tentang kesetaraan gender	
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten Dharmasraya	
Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Kegiatan	Pelaksana : PPTK sub Kegiatan Relasi Media Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
Jadwal	Januari s/d Desember 2024	
Biaya	475.797.813,-	



GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Informasi dan Komunikasi Publik
KEGIATAN	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	Relasi Media
KODE PROGRAM	2.16.02
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Kegiatan ini merupakan peningkatan informasi public yang dilakukan secara eksternal melalui kerjasama media, yang dilaksanakan sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, sejalan dengan satu pilar informasi, yaitu Transparansi menuju <i>Clean Government</i> dan <i>Good Governance</i>. Keterbukaan informasi public ini juga menjadi target IKU dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik diharapkan informasi pembangunan dapat diakses untuk seluruh masyarakat termasuk ibu, anak dan lansia.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah media perempuan atau media khusus anak yang mengajukan kerjasama sangat sedikit, hanya 1 media (Narasi). <p>Partisipasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wartawati yang meliput kegiatan pembangunan yang memahami gender sangat kurang (+ 10 orang) <p>Kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada masalah (fasilitas yang sama diberikan untuk wartawati dan media khusus perempuan (Narasi)) <p>Manfaat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perempuan, anak dan lansia Dharmasraya tidak responsive terhadap Informasi perkembangan Pembangunan. <p>b. Penyebab Kesejangan Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada sosialisasi kepada media untuk lebih banyak mengirimkan wartawan dalam peliputan kegiatan pembangunan yang memahami gender <p>c. Penyebab Kesenjangan Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah media khusus perempuan atau media khusus anak yang mengajukan kerjasama sangat sedikit, hanya 1 media (Narasi). - Jumlah wartawati (4 orang) yang meliput kegiatan pembangunan dan belum memahami gender <p>d. Tolak Ukur Jumlah Dana Rp. 475.797.813,-</p> <p>e. Indikator dan Target Kinerja</p>
CAPAIAN PROGRAM	

	<p><u>Input :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah wartawan yang memahami kesetaraan gender bagi bapak, ibu, anak dan lansia <p><u>Output:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kerjasama media nasional dan local yang memberikan informasi kesetaraan gender <p><u>Outcome :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi pembangunan termasuk ibu, anak dan lansia 												
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	475.797.813,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah) khusus untuk pelaksanaan kerjasama media dan proses kerja samanya												
RENCANA AKSI	<table border="1"> <tr> <td>Kegiatan 1</td><td colspan="2">Sosialisasi gender kepada media (kerjasama dengan Dinas Sosial, P3APPKB)</td></tr> <tr> <td>Masukan</td><td colspan="2">Rp. 0,00,- (dana melalui Dinas Sos, P3A, PPKB)</td></tr> <tr> <td>Keluaran</td><td colspan="2">Jumlah wartawan yang memahami gender</td></tr> <tr> <td>Hasil</td><td colspan="2">Tersebanya Informasi Kegiatan Pembangunan di Masyarakat</td></tr> </table>	Kegiatan 1	Sosialisasi gender kepada media (kerjasama dengan Dinas Sosial, P3APPKB)		Masukan	Rp. 0,00,- (dana melalui Dinas Sos, P3A, PPKB)		Keluaran	Jumlah wartawan yang memahami gender		Hasil	Tersebanya Informasi Kegiatan Pembangunan di Masyarakat	
Kegiatan 1	Sosialisasi gender kepada media (kerjasama dengan Dinas Sosial, P3APPKB)												
Masukan	Rp. 0,00,- (dana melalui Dinas Sos, P3A, PPKB)												
Keluaran	Jumlah wartawan yang memahami gender												
Hasil	Tersebanya Informasi Kegiatan Pembangunan di Masyarakat												



VERIFIKASI KEGIATAN

INSPEKTUR	KEPALA BKD	KEPALA BAPPERIDA	KEPALA DINAS SOSIAL, P3A, PPKB
Drs. ANDY SUMANTO, CfrA NIP. 19681220 199009 1 001	KEPALA BKD ASRIL AP., M.Si NIP. 19690609 198902 1 001	KEPALA BAPPERIDA PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	KEPALA DINAS SOSIAL, P3A, PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut. MM NIP. 19790905 200801 1 018

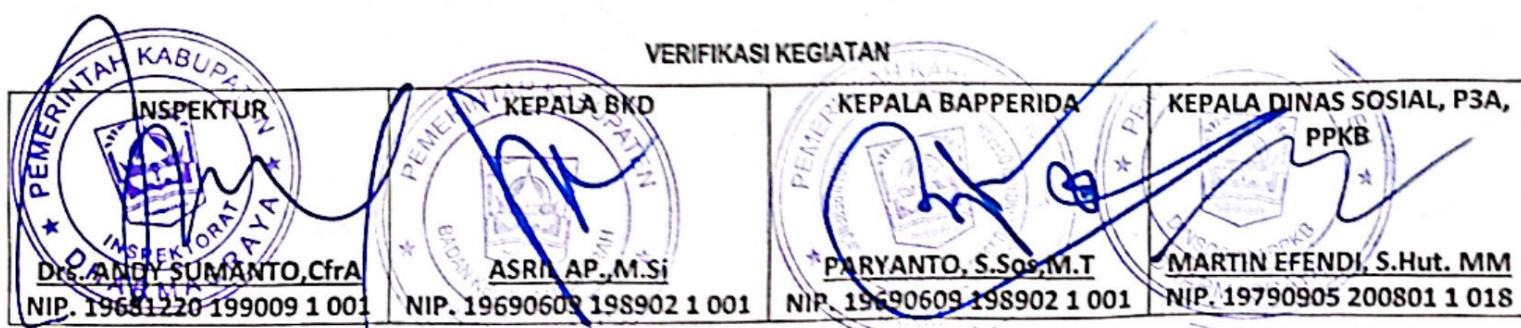
GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Informasi dan Komunikasi Publik
KEGIATAN	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
KODE PROGRAM	2.16.02
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Keterbukaan untuk memperoleh informasi sesuai dengan tuntutan perkembangan diera saat ini. Disahkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, sejalan dengan satu pilar informasi, yaitu Transparansi menuju <i>Clean Government</i> dan <i>Good Governance</i>. Keterbukaan informasi public ini juga menjadi target IKU dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik diharapkan informasi pembangunan dapat diakses untuk seluruh masyarakat termasuk ibu, anak dan lansia.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses informasi untuk ibu, anak dan lansia yang lebih banyak di rumah masih terbatas <p>Partisipasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya minat masyarakat terutama ibu, anak dan lansia untuk mengakses informasi <p>Kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya kontrol untuk mengetahui fasilitas yang sama untuk pria, wanita, anak dan lansia <p>Manfaat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perempuan, anak dan lansia tidak responsive terhadap Informasi terutama dalam perkembangan Pembangunan. <p>b. Penyebab Kesenjangan Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terutama ibu, anak, dan lansia mengenai pentingnya informasi publik tentang berbagai kegiatan pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. <p>c. Penyebab Kesenjangan Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Keinginan Masyarakat Terutama Ibu, anak dan lansia untuk mengakses informasi public.
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. Tolak Ukur Jumlah Dana Rp. 750.000.000,-</p> <p>2. Indikator dan Target Kinerja</p> <p>Input :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah media internal (vidiotron, majalah, kalender, baliho, spanduk) yang informative bagi bapak, ibu, anak

		dan lansia
	Output:	
	-	Adanya penyampaian informasi pembangunan seluruh masyarakat Dharmasraya termasuk ibu, anak, dan lansia
	Outcome :	
	-	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi pembangunan termasuk ibu, anak dan lansia
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM		350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Sosialisasi kepada Nagari untuk membentukan jaring-jaring informasi pembangunan di tingkat Nagari
	Masukan	Rp. 50.000.000,-
	Keluaran	Terlaksananya sosialisasi pembentukan jaring-jaring informasi pembangunan kepada Nagari se-Kabupaten Dharmasraya
	Hasil	Tersebanya Informasi Kegiatan Pembangunan di Masyarakat
	Kegiatan 2	Pengadaan informasi kegiatan pembangunan melalui media baliho dan spanduk di setiap jorong
	Masukan	Rp. 300.000.000,-
	Keluaran	Pemasangan spanduk kegiatan informasi pembangunan selama 1 tahun
	Hasil	Tersebanya Informasi Kegiatan Pembangunan di Masyarakat



MATRIX GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Kesenjangan Gender antara Laki – Laki dan Perempuan

OPD : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan

PROGRAM : Perencanaan dan Pembangunan Industri

IKU DAERAH dan SKPD

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industry Kabupaten / Kota Sub Kegiatan : Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	perempuan dalam dunia usaha khususnya industry rumah tangga Jumlah IKM Seluruhnya : 2633 orang Jumlah IKM Perempuan : 1843 (70 %) orang Jumlah IKM Laki – Laki : 790 orang (30 %)	Control: Kurangnya sosialisasi tentang persamaan kesempatan dalam berusaha Manfaat : Hilangnya kesenjangan dalam kesempatan berusaha						

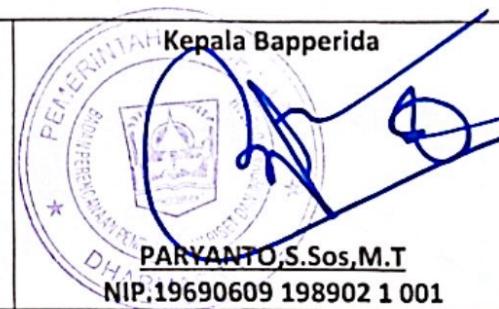
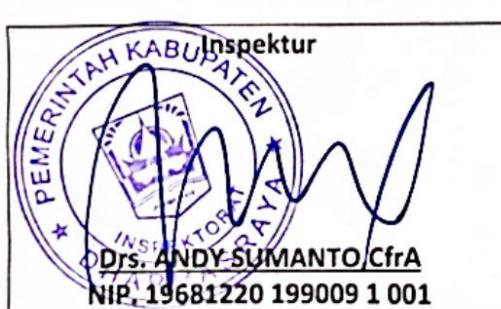
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
Tujuan : Meningkatnya pengetahuan pelaku IKM dalam diversifikasi produk dan packaging.								

Pulau Pulung, 24 Juni 2024

Kepala Dinas
PEMERINTAH KABUPATEN

NOFRIADI RONI PUSKA, ST, MT
Pembina Ikl / IV.b
NIP. 19801115 200501 1 013

TIM VERIFIKASI,



GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Perencanaan dan Pembangunan Industri
KEGIATAN	Penyusunan penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten / Kota
KODE KEGIATAN	3 31 02 2.01
HASIL / OUTPUT	Meningkatnya jumlah pelaku IKM yang laki – laki. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Jumlah pelaku IKM lebih di dominasi oleh kaum perempuan. Maka dengan adanya kegiatan pelatihan ini dapat memberikan pencerahan bahwasanya laki – laki juga bisa berperan sama halnya dengan perempuan dalam dunia usaha khusunya industry rumah tangga Jumlah IKM Seluruhnya : 2633 orang Jumlah IKM Perempuan : 1843 (70 %) Jumlah IKM Laki – Laki : 790 orang (30 %)</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses:</p> <p style="padding-left: 2em;">Kurangnya informasi tentang persamaan kesempatan dalam berusaha</p> <p>Partisipasi:</p> <p style="padding-left: 2em;">Kurangnya partisipasi laki – laki yang menjadi pelaku IKM</p> <p>Control:</p> <p style="padding-left: 2em;">Kurangnya sosialisasi tentang persamaan kesempatan dalam berusaha</p> <p>Manfaat :</p> <p style="padding-left: 2em;">Hilangnya kesenjangan dalam kesempatan berusaha</p> <p>b. Penyebab Internal Kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang persamaan kesempatan dalam berusaha.</p> <p>c. Penyebab Eksternal</p> <p>1. Pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa hanya perempuan yang cocok menjadi pelaku IKM 2. Kurangnya koordinasi dengan pemerintah di kecamatan dan nagari</p>
RENCANA AKSI	<p>Komponen / Aktifitas 1 Melakukan sosialisasi tentang kesetaraan hak dalam berusaha. Tujuan : Menyampaikan tentang persamaan hak dalam menentukan usaha dan tidak ada perbedaan kesetaraan gender dalam hal tersebut.</p> <p>Komponen / Aktifitas 2. Mengadakan pelatihan bagi IKM dalam diversifikasi produk dan packaging dan Pengadaan leaflet, brosur yang menyampaikan persamaan kesempatan dalam berusaha. Tujuan : Melatih IKM dalam hal diversifikasi produk dan packaging.</p>
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. Tolak Ukur Jumlah Dana sebesar Rp. 350.000.000,00</p> <p>2. Indikator dan Target Kinerja</p> <p><u>Input :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengusulan dana untuk mengangkat kegiatan tersebut sebesar Rp. 350.000.000,00

	Output:								
	<ul style="list-style-type: none"> - Hasilnya terciptanya para pelaku IKM muda sehingga meningkatnya perekonomian masyarakat 								
	Outcome :								
	<ul style="list-style-type: none"> - Perekonomian masyarakat jauh lebih maju dan meningkat, sehingga kehidupan masyarakat lebih sejahtera lagi. 								
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)								
RENCANA AKSI	<table border="1"> <tr> <td>Kegiatan 1</td><td>Mengajukan pengusulan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00 untuk Kegiatan Pelatihan disertifikasi produk dan packaging</td></tr> <tr> <td>Masukan</td><td>Rp. 350.000.000,00</td></tr> <tr> <td>Keluaran</td><td>Kegiatan Pelatihan disertifikasi produk dan packaging</td></tr> <tr> <td>Hasil</td><td>Terciptanya para pelaku IKM muda sehingga meningkatnya perekonomian masyarakat.</td></tr> </table>	Kegiatan 1	Mengajukan pengusulan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00 untuk Kegiatan Pelatihan disertifikasi produk dan packaging	Masukan	Rp. 350.000.000,00	Keluaran	Kegiatan Pelatihan disertifikasi produk dan packaging	Hasil	Terciptanya para pelaku IKM muda sehingga meningkatnya perekonomian masyarakat.
Kegiatan 1	Mengajukan pengusulan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00 untuk Kegiatan Pelatihan disertifikasi produk dan packaging								
Masukan	Rp. 350.000.000,00								
Keluaran	Kegiatan Pelatihan disertifikasi produk dan packaging								
Hasil	Terciptanya para pelaku IKM muda sehingga meningkatnya perekonomian masyarakat.								



VERIFIKASI KEGIATAN

Drs. ANDY SUMANTO, CfrA NIP.196812201990091001	ASRIL AP, M.Si NIP.19750225 199501 1 001	PARYANTO, S.Sos, M.T NIP.196906091989021001	MARTIN EFENDI, S.Hut, MM NIP.19790905 200801 1 018

FORM KAK/ TOR

Program		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Sasaran Program		Meningkatnya perencanaan dan pembangunan industry
Kegiatan		Penyusunan penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industry Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan		Koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Perindustrian No 110/M.IND/Per/12/2015 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota Perda Kabupaten Dhramasraya no.6 Th 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten tahun 2019 – 2039
	Gambaran Umum	Kegiatan Pelatihan dan sosialisasi ini di peruntukkan bagi IKM yang berada dibawah binaan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelatihan dan sosialisasi ini direncanakan akan diikuti oleh 100 IKM
	Indikator Kinerja	Terlatihnya IKM dalam diversifikasi produk dan packaging
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Melatih IKM laki – laki dan perempuan untuk peningkatan omzet dan meningkatkan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Mengundang 100 IKM dan mendatangkan narasumber yang relevan.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Hotel Jakarta Indah
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Bidang Perindustrian Penanggung Jawab : Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan.
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 350.000.000,-

Pulau Punjung, 24 Juni 2024



MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat (Servise delivery)

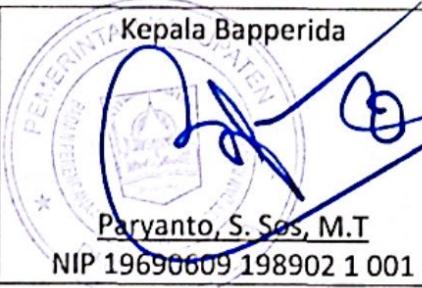
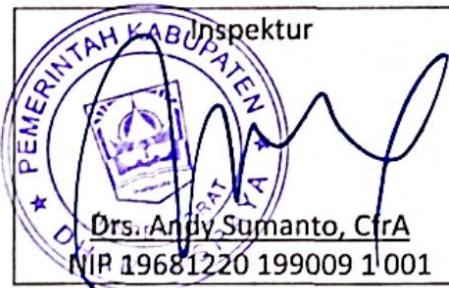
Tujuan : Pembentukan Kampung Iklimsehingga	Kelompok Teknis Pelaksana Kampung Iklim di tingkat tapak yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT) yang anggotanya terdiri atas 100% perempuan dengan berkoordinasi dengan perangkat nagari atau jorong di daerah yang bersangkutan						
---	--	--	--	--	--	--	--

OPD

:Dinas Lingkungan Hidup



Tim Verifikasi



GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Lingkungan Hidup
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
KODE PROGRAM	2.11.03				
KEGIATAN	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				
HASIL/OUTPUT	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan				
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Kampung Iklim di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 yang akan diusulkan terdiri atas Kecamatan Tiumang, Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Pulau Punjung. Kelompok Teknis Pelaksana Kampung Iklim di tingkat tapak yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT) yang anggotanya terdiri atas 100% perempuan dengan berkoordinasi dengan perangkat nagari atau jorong di daerah yang bersangkutan.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Faktor Kesenjangan <ul style="list-style-type: none"> a) Masih kurangnya responsif gender dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim b) Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim belum merasa penting oleh laki-laki b. Penyebab Internal <ul style="list-style-type: none"> a) Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender b) Kurangnya pemahaman dan komitmen dari pihak terkait tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim c) Kurangnya Pemahaman SDM tentang Pengarusutamaan Gender c. Penyebab Eksternal <ul style="list-style-type: none"> a) Masih rendahnya alokasi dana terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim b) Koordinasi lintas sector yang masih belum optimal 				
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Sosialisasi tentang Program Kampung Iklim yang responsive gender			
		<table border="1"> <tr> <td>Tujuan</td><td>Untuk mengetahui pemahaman tentang Program Kampung Iklim yang responsive gender</td></tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td><td></td></tr> </table>	Tujuan	Untuk mengetahui pemahaman tentang Program Kampung Iklim yang responsive gender	Alokasi Anggaran
Tujuan	Untuk mengetahui pemahaman tentang Program Kampung Iklim yang responsive gender				
Alokasi Anggaran					
	Komponen/ Aktifitas 2	Pemberian Penghargaan terhadap Nagari yang telah menerapkan program kampung iklim			
		<table border="1"> <tr> <td>Tujuan</td><td>Memberikan motivasi ke Nagari lain untuk mengikuti kegiatan Program Kampung Iklim.</td></tr> </table>	Tujuan	Memberikan motivasi ke Nagari lain untuk mengikuti kegiatan Program Kampung Iklim.	
Tujuan	Memberikan motivasi ke Nagari lain untuk mengikuti kegiatan Program Kampung Iklim.				

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Lingkungan Hidup
TAHUN ANGGARAN : 2025

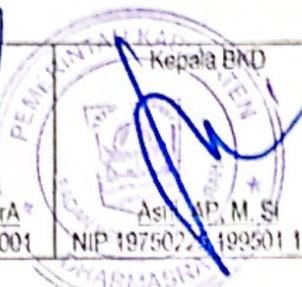
PROGRAM	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
KODE PROGRAM	2.11.03		
KEGIATAN	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		
HASIL/OUTPUT	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca darisektorlingkunganhidup yang dilaksanakan		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Kampung Iklim di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 yang akan diusulkan terdiri atas Kecamatan Tiumang, Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Pulau Punjung. Kelompok Teknis Pelaksana Kampung Iklim di tingkat tapak yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT) yang anggotanya terdiri atas 100% perempuan dengan berkoordinasi dengan perangkat nagari atau jorong di daerah yang bersangkutan.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Faktor Kesenjangan <ul style="list-style-type: none"> a) Masih kurangnya responsif gender dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim b) Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim belum merasa penting oleh laki-laki b. Penyebab Internal <ul style="list-style-type: none"> a) Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender b) Kurangnya pemahaman dan komitmen dari pihak terkait tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim c) Kurangnya Pemahaman SDM tentang Pengarusutamaan Gender c. Penyebab Eksternal <ul style="list-style-type: none"> a) Masih rendahnya alokasi dana terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim b) Koordinasi lintas sector yang masih belum optimal 		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Sosialisasi tentang Program Kampung Iklim yang responsive gender	
		Tujuan	Untuk mengetahui pemahaman tentang Program Kampung Iklim yang responsive gender
	Komponen/ Aktifitas 2	Alokasi Anggaran	
		Pemberian Penghargaan terhadap Nagari yang telah menerapkan program kampung iklim	
		Tujuan	Memberikan motivasi ke Nagari lain untuk mengikuti kegiatan Program Kampung Iklim.

Capaian Program	<p>Out put Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan</p> <p>Out come Terbentuknya Kampung Iklim baru</p>
------------------------	---

Sikabat, 25 Juni 2024



Tim Verifikasi

 Drs. Andi Sumanto, CfrA NIP. 19691220 1990091 001	 Asri AP, M.Si NIP. 19750226 1995011 001	 Paryanto, S. Sos, M.T NIP. 19690609 1989021 001	 MARTIN EFENDI, S. Hut, M. M NIP. 19790905 2008011 018
--	--	---	--

FORM KAK/ TOR

Program		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Sasaran Program		Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
	Gambaran Umum	Kegiatan Program Kampung Iklim dilaksanakan setiap tahunnya
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pembinaan terhadap Kelompok Masyarakat di Nagari yang akan diusulkan menjadi kampung iklim
	Indikator Kinerja	Terbentuknya Kampung Iklim
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ditingkat tapak
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Koordinasi, Sinkronisasi pelaksanaan Pengendalian Emisi, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan PulauPunjung.
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2025	
Biaya	Rp. 69.166.400,-	



Tim Verifikasi

Inspektorat	Kepala BKD	Kepala Bapperida	Kepala DINSO&PPKB
Drs. Andy Sumentro, Cfa NIP 1965220199009 1 001	Asri AP, M.Si NIP 19750225 199501 1 001	Paryanto, S. Sos. M.T NIP 19690609 198902 1 001	MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP 19790905 200801 1 018

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025

Urusan :						
Unit Organisasi	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup				
Sub Unit Organisasi	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup				
Program	2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
Kegiatan	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan	2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				
Sumber Pendanaan		APBD				
Lokasi Kegiatan		Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Pulau Punjung.				
Waktu Pelaksanaan		Januari s/d Desember 2025				
Kelompok Sasaran		KWT				
Jumlah 2024		46.897.000,-				
Jumlah 2025		69.166.400,-				
Jumlah 2026						
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program Masukan Keluaran Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				69.166.400,-	
Rincian Hitungan						
Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					69.166.400,-
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA					69.166.400,-
5.1.02.01.01	BELANJA BARANG PAKAI HABIS					14.000.000

5.1.02.01.01.0026	BBelanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					500.000
	spanduk	2	Paket	250.000	0	500.000.
5.1.02.01.01.00052	Belanja Natura dan Pakan Natura					4.500.000
	Nasi	150	Bungkus	22.000	0	3.300.000
	Snack	150	Kotak	8000	0	1.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Pembawa Acara dan Panitia					9.800.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1	Paket	9.500.000		9.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					35.866.400
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Paket	15.836.400		15.836.400
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Paket	17.030.000		20.030.000
Grand Total						69.166.400,-



Tim Verifikasi

Drs. Andy Sumanto, CFA NIP 19681220 199009 1 001	Kepala BKD Ashi AP, M.Si NIP 19750225 199501 1 001	Kepala Bapperida Paryanto, S. Sos. M.T NIP 19690609 198902 1 001	Kepala DINSO SP3APPKB MARTIN EFENDI, S. Hut, M. M NIP. 19790905 200801 1 018
---	--	--	--

Tujuan :	Sekolah yang dibina untuk mengikuti Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Adiwiyata) menuju Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten tahun 2025 adalah SDN 02 Pulau Punjung, SDN 01 Sungai Rumbai, SMPN 02 Koto Baru, SMPN 1 Padang Laweh, SMAN 1 Tiumang						
----------	--	--	--	--	--	--	--

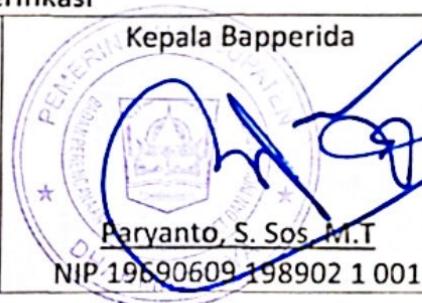
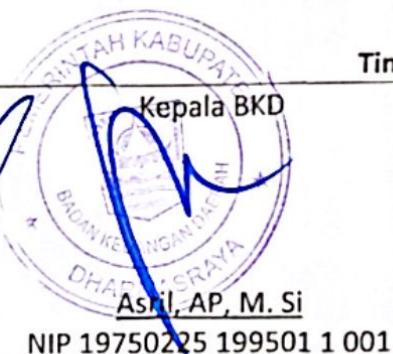
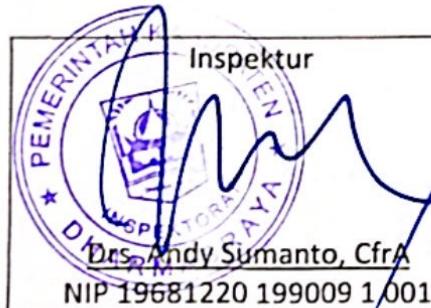
OPD

:Dinas Lingkungan Hidup

Bikabay, 25 Juni 2025



Tim Verifikasi



GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Lingkungan Hidup
TAHUN ANGGARAN : 2024

PROGRAM	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		
KODE PROGRAM	2.11.09		
KEGIATAN	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
HASIL/OUTPUT	Bertambahnya sekolah berwawasan lingkungan yang responsif gender		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Sekolah yang dibina untuk mengikuti Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah(Adiwiyata) menuju Sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten tahun 2025 adalah SDN 02 Pulau Punjung, SDN 01 Sungai Rumbai, SMPN 02 Koto Baru, SMPN 1 Padang Laweh, SMAN 1 Tiumang.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tidak sesuai dengan responsif gender jumlah laki-laki dengan perempuan sehingga keterlibatan laki-laki dalam pembinaan belum maksimal b) Terdapat kesenjangan antara jumlah guru laki-laki (40%) dan perempuan (60%) <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender b) Kurangnya Pemahamanan SDM tentang Pengarusutamaan Gender <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Koordinasi lintas sector yang masih belum optimal b) Masih rendahnya alokasi dana 		
RENCANA AKSI	Komponen/Aktifitas 1	Sosialisasi tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Sekolah yang responsif gender	
	Tujuan	Untuk mengetahui pemahaman tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Sekolah yang responsif gender	
	Alokasi Anggaran		
	Komponen/Aktifitas 2	Pemberian Penghargaan Terhadap Sekolah yang memperoleh gelar sekolah berwawasan lingkungan	
	Tujuan	Agar sekolah lebih termotivasi untuk mengikuti gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Sekolah	

	Alokasi Anggaran	
Total Anggaran	20.893.000,-	
Capaian Program	<p>Out put Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH</p> <p>Out come Terbentuknya Sekolah berwawasan lingkungan</p>	



Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapperida	Kepala DINSOSP3APPKB
Drs. Andy Simamto, CfrA NIP. 19681220 199009 1 001	Asril AP, M. Si NIP. 19750225 199501 1 001	Paryanto, S. Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018

FORM KAK/ TOR

Program		Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Sasaran Program		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Kegiatan		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup
Latar Belakang	Dasar Hukum	Undang- undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
	Gambaran Umum	Kegiatan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Sekolah dilaksanakan setiap tahunnya
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pembinaan terhadap Sekolah yang berwawasan lingkungan
	Indikator Kinerja	Terbentuknya Sekolah yang berwawasan lingkungan
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Membentuk gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Sekolah
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Koordinasi, Sinkronisasi pelaksanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Sekolah
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Sekolah Se-Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2025	
Biaya	Rp. 20.893.000,-	



Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapperida	Kepala DINOSP3APPKB
Drs. Andi Sumanto, Cfa NIP 19681220 199009 1 001	Asril, AP, M. Si NIP 19750225 199501 1 001	Paryanto, S. Sos, M.T. NIP 19690609 198902 1 001	MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN SKPD/ INOVASI/ KESENJANGAN GENDER/ PENCAPIAIAN SDG's/ PENCAPIAIAN SPM/ SERVIVE DELIVERY (Pilih Kategori yang sesuai dengan program masing-masing OPD & Kecamatan)

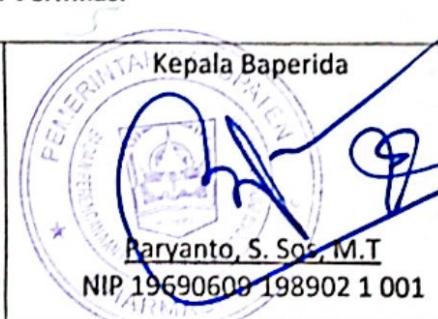
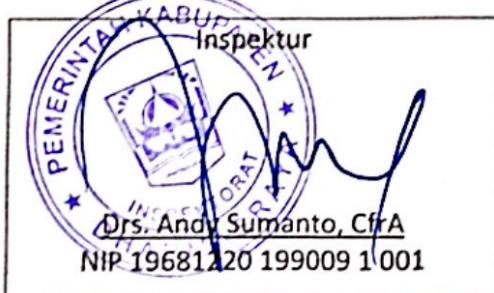
OPD : DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
PROGRAM : PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Penanganan Kerawanan Pangan Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu Daerah Kabupaten/Kota) Tujuan : Meningkatkan pengadaan,	- Jumlah daerah rentan rawan pangan sebanyak 11 Nagari dengan Jumlah 120 Balita Sasaran - Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan sebanyak 32,706 Ton - Dampak Inflasi Harga Pangan - Jumlah Lumbung Pangan yang ada di kabupaten didharmasraya sebanyak 6 unit	Akses: Masih tinnginya angka stunting yang diakibatkan karena kurangnya kesadaran ibu hamil dalam mengambil tindakan pencegahan bayi lahir stunting Partisipasi: Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemenuhan gizi yang baik bagi anak Control: Kurang terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam mengambil kebijakan pencegahan stunting sejak dini.	- Masih kurangnya sosialisasi tentang pemberian gizi yang baik pada anak balita - Masih kurangnya kepedulian ibu tentang anak lahir stunting - Masih rendahnya jumlah lumbung pangan yang sesuai standard - Masih kurangnya koordinasi dengan lintas sector dan Pemuka masyarakat. - Masih kurangnya sarana informasi baik media cetak dan elektronik - Masih rendahnya	- Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi yang baik untuk balita - Kurangnya dukungan keluarga terhadap pemenuhan gizi yang baik untuk balita karna kondisi keuangan yang rendah - Kurangnya sosialisasi tenaga kesehatan tentang pencegahan stunting sejak dini	- Menurunkan jumlah angka anak yang mengalami gizi buruk dan stunting. - Tersedianya dan tersalurkannya cadangan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat di daerah rawan pangan . - Meningkatkan kesadaran ibu untuk pencegahan stunting sejak dini	- Melaksanakan Sosialisasi - Meningkatkan jumlah lumbung pangan yang sesuai standart - Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh lintas sector dan pemuka masyarakat - Meningkatkan kesadaran ibu untuk pencegahan stunting sejak dini	- Jumlah daerah rentan rawan pangan sebanyak 11 Nagari dengan Jumlah 120 Balita Sasaran - Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan sebanyak 32,706 Ton - Dampak Inflasi Harga Pangan - Jumlah Lumbung Pangan yang ada di kabupaten didharmasraya sebanyak 6 unit - Jumlah petugas lapangan 61 orang, Laki-laki 42 dan Perempuan 19	Output : - Melaksanakan sosialisasi sebanyak 120 orang - Pemberian bantuan untuk perbaikan lumbung pangan sebanyak 6 unit - Melaksanakan bimtek untuk petugas lapangan sebanyak 61 Orang. Input: Anggaran Rp. 169.999.300 Outcome : - Menurunkan angka

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan pangan. Sasaran : Daerah Rentan Rawan pangan dan Balita Stunting	- Jumlah petugas lapangan 61 orang, Laki-laki 42 dan Perempuan 19 Orang.	Manfaat: -	kompetensi petugas lapangan			lapanga	Orang.	stunting pada anak balita - Meningkatnya Ketersediaan Pangan



Tim Verifikasi



MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN SKPD/ INOVASI/ KESENJANGAN GENDER/ PENCAPAIAN SDG's/ PENCAPAIAN SPM/ SERVIVE DELIVERY (Pilih Kategori yang sesuai dengan program masing-masing OPD & Kecamatan)

OPD : DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

PROGRAM : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan	- Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, 234.509 Jiwa	Akses: Rendahnya Konsumsi Ikan masyarakat terutama pada Wanita Hamil, ibu menyusul dan balita	- Masih kurangnya sosialisasi tentang nilai protein yang terkandung pada ikan untuk wanita hamil, ibu menyusul dan anak balita	- Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang nilai protein yang terkandung pada ikan untuk wanita hamil, ibu menyusul dan anak balita	- Menigkatkan penyediaan ikan untuk dikonsumsi oleh wanita hamil, ibu menyusul dan anak balita	- Melaksanakan Sosialisasi	- Jumlah Produksi Ikan Daerah	Output : - Jumlah Konsumsi Ikan Masyarakat
Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Kebutuhan akan ikan untuk dikonsumsi rata-rata per hari > 200 Gr/ Kap/Hr - Produksi Ikan Tahun 2023 adalah 25.449 Ton	Partisipasi: Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi ikan	- Masih rendahnya jumlah usaha pengelola ikan konsumsi	- Kurangnya pelaku usaha pengolahan ikan konsumsi dalam bentuk UMKM	- Meningkatkan peran serta masyarakat terutama ibu rumah tangga dalam penyediaan dan pengolahan ikan yang akan dikonsumsi oleh keluarga.	- Meningkatkan jumlah usaha pengelola ikan konsumsi	- Jumlah produksi ikan olahan	- Jumlah pembudidaya ikan yang berkembang
Sub Kegiatan : Peningkatan Ketersediaan ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Kota	- Jumlah luas usaha budidaya ikan : 500 Ha - Jumlah Pelaku usaha pengolahan ikan : 7 Kelompok	Bagi pertumbuhan anak balita	Control: Kurang terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam mengambil kebijakan	- Masih kurangnya koordinasi dengan lintas sektor dan pemuka masyarakat.	- Kurangnya dukungan keluarga terhadap pemenuhan gizi yang baik untuk wanita hamil, ibu menyusul dan anak balita karena kondisi keuangan yang rendah	- Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh lintas sektor dan pemuka masyarakat	- Jumlah kelompok pengolah ikan yang berkembang	Input: Anggaran Rp. 20.547.000
Tujuan : Meningkatkan ketersediaan ikan untuk masyarakat	- Tingkat konsumsi ikan daerah Tahun 2023 : 36 Kg perkapita per	Manfaat: -				- Pengadaan media informasi	- Jumlah pelaku usaha pengolahan ikan	Outcome : Meningkatnya Angka konsumsi ikan
							- Jumlah petugas penyuluhan perikanan sebanyak 3 orang (1 perempuan dan 2 laki-laki)	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
dan konsumsi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita Sasaran: Meningkatkan Konsumsi Ikan Daerah, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita	- Tahun Jumlah petugas penyuluhan perikanan sebanyak 3 orang (1 perempuan dan 2 laki-laki)			- Kurangnya Inovasi dalam pengelolaan ikan untuk di konsumsi				

Tim Verifikasi

Inspektur Drs. Andi Sumanto, CfrA NIP 19681220 199009 1 001	Kepala BKD Asril, AP, M. Si NIP 19750225 199501 1 001	Kepala Baperida Paryanto, S. Sos, M.T NIP 19690609 198902 1 001	Kepala DINAS P3APPKB MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018
---	---	---	---



GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN SKPD/ INOVASI/ KESENJANGAN GENDER/
PENCAPAIAN SDG's/ PENCAPAIAN SPM/ SERVIVE DELIVERY (Pilih Kategori yang
sesuai dengan program masing-masing OPD & Kecamatan)**

SKPD : DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
KODE PROGRAM	3.25.06		
KEGIATAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
HASIL/ OUTPUT	Jumlah Kelompok usaha budidaya ikan dan usaha pengolahan ikan yang berkembang		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsumsi ikan yang masih rendah jika dibandingkan dengan angka ideal yang dibutuhkan tubuh - Terbatasnya akses masyarakat terutama ibu rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan ikan karena kurang tersedia dan harga yang cukup tinggi <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan Masih kurang dan rendahnya konsumsi dan pemahaman masyarakat pentingnya mengkonsumsi ikan untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita</p> <p>b. Penyebab Internal <ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya sosialisasi tentang nilai protein yang terkandung pada ikan untuk wanita hamil, ibu menyusui dan anak balita - Rendahnya jumlah pelaku usaha pengolahan ikan konsumsi yang menakibatkan anak balita kurang mengenal pentingnya mengkonsumsi ikan. </p> <p>c. Penyebab Eksternal <ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang nilai protein yang terkandung pada ikan untuk wanita hamil, ibu menyusui dan anak balita - Kurangnya dukungan keluarga terhadap pemenuhan gizi yang baik untuk wanita hamil, ibu menyusui dan anak balita karna kondisi keuangan yang rendah - Kurangnya inovasi dalam pengelolaan ikan untuk dikonsumsi </p>		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sosialisasi kepada Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita - Meningkatkan jumlah usaha pengelola ikan konsumsi agar anak balita lebih semangat untuk mengkonsumsi ikan - Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh lintas sector dan pemuka masyarakat - Pengadaan media informasi untuk memudahkan masyarakat pengenalan tentang pentingnya mengkonsumsi ikan 	
	Tujuan	Meningkatkan ketersediaan ikan untuk masyarakat dan konsumsi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita	
	Alokasi Anggaran	Rp 20.547.000,-	
	Total Anggaran	Rp. 20.547.000,-	

Capalan Program	<p>Out put:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah usaha Pengelolaan ikan konsumsi - Jumlah Konsumsi Ikan Masyarakat <p>Out come :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Angka konsumsi ikan
-----------------	--



Tim Verifikasi

Inspektur Drs. Andy Sumanto, Cfa NIP 19631220 199009 1 001	Kepala BKD Asri, AP, M. Si NIP 19750225 199501 1 001	Kepala Baperida Paryanto, S. Sos, M.T NIP 19690609 198902 1 001	Kepala DINOSOSP3APPKB MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018
--	--	---	--

FORM KAK/ TOR

Program		PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Sasaran Program		Masyarakat, Ibu hamil, Ibu Menyusui dan Balita
Kegiatan		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024
	Gambaran Umum	Tersedianya Ikan Konsumsi, Usaha Pengolahan Ikan dan terfasilitasinya gemarikan dan forikan.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> -Mengembangkan kelompok usaha pengolahan ikan yang telah ada dan menumbuhkan usaha pengolahan ikan yang baru -Meningkatkan Konsumsi ikan yang masih rendah dibandingkan angka ideal yang dibutuhkan tubuh dengan cara mengadakan kegiatan Gemarikan dan Forikan
	Indikator Kinerja	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatkan Angka konsumsi Ikan -Meningkatkan Produksi Ikan Segar dan Ikan Olahan -Meningkatkan pendapatan usaha masyarakat pengolahan ikan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		<ul style="list-style-type: none"> -Melakukan Sosialisasi manfaat makan ikan dan pemberian makanan berbahan ikan kepada ibu hamil dan anak-anak -Melakukan monitoring pada pelaku usaha pengolahan ikan agar sesuai dengan prosedur.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Dinas Pangan dan Perikanan
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Kepala Bidang Perikanan Penanggung Jawab : Kepala Bidang Perikanan
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 20.547.000

Sikabau, Juni 2024

**KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN,
KABUPATEN DHARMASRAYA**



GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN SKPD/ INOVASI/ KESENJANGAN GENDER/ PENCAPAIAN SDG's/ PENCAPAIAN SPM/ SERVIVE DELIVERY (Pilih Kategori yang sesuai dengan program masing-masing OPD & Kecamatan)

SKPD : DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						
KODE PROGRAM	2.09.04						
KEGIATAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						
HASIL/OUTPUT	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah daerah rentan rawan pangan sebanyak 11 Nagari dengan Jumlah 120 Balita Sasaran - Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan sebanyak 32,706 Ton - Dampak Inflasi Harga Pangan - Jumlah Lumbung Pangan yang ada di kabupaten didharmasraya sebanyak 6 unit - Jumlah petugas lapangan 61 orang, Laki-laki 42 dan Perempuan 19 Orang. <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemenuhan gizi yang baik bagi anak, sehingga mengakibatkan masih tingginya angka stunting di masyarakat.</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya sosialisasi tentang pemberian gizi yang baik pada anak balita - Masih kurangnya kepedulian ibu tentang anak lahir stunting - Masih rendahnya jumlah lumbung pangan yang sesuai standard - Masih kurangnya koordinasi dengan lintas sector dan Pemuka masyarakat. - Masih kurangnya sarana informasi baik media cetak dan elektronik - Masih rendahnya kompetensi petugas lapangan <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi yang baik untuk balita - Kurangnya dukungan keluarga terhadap pemenuhan gizi yang baik untuk balita kama kondisi keuangan yang rendah - Kurangnya sosialisasi tenaga kesehatan tentang pencegahan stunting sejak dini. 						
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">- Melaksanakan Sosialisasi</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">- Meningkatkan jumlah lumbung pangan yang sesuai standard</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">- Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh lintas sector dan pemuka masyarakat</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">- Pengadaan media informasi</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">- Meningkatkan kapasitas petugas lapangan</td> </tr> </table> Tujuan Meningkatkan pengadaan, pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan pangan. Alokasi Anggaran Rp 169.999.300,-	- Melaksanakan Sosialisasi	- Meningkatkan jumlah lumbung pangan yang sesuai standard	- Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh lintas sector dan pemuka masyarakat	- Pengadaan media informasi	- Meningkatkan kapasitas petugas lapangan	
- Melaksanakan Sosialisasi							
- Meningkatkan jumlah lumbung pangan yang sesuai standard							
- Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh lintas sector dan pemuka masyarakat							
- Pengadaan media informasi							
- Meningkatkan kapasitas petugas lapangan							
	Total Anggaran	Rp. 169.999.300,-					

Capaian Program	<p>Out put:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi sebanyak 120 orang - Pemberian bantuan untuk perbaikan lumbung pangan sebanyak 6 unit - Melaksanakan bimtek untuk petugas lapangan sebanyak 61 Orang. <p>Out come :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menurunkan angka stunting pada anak balita - Meningkatnya Ketersediaan Pangan
-----------------	---

Sikabau, Juni 2024



Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bappeda	Kepala DINOSOP3APPKB
Drs. Andy Sumanto, Cfa NIP 19681220 199009 1 001	Astil AP, M. Si NIP 19750225 199501 1 001	Paryanto, S. Sos, M.T NIP 19690609 198902 1 001	MARTIN EFENDI, S. Hut, M. M NIP. 19790905 200801 1 018

FORM KAK/ TOR

Program		PENGOLAHAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
Sasaran Program		Daerah Rentan Rawan Pangan dan Balita Stunting
Kegiatan		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kemandirian Pangan Daerah 3. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024
	Gambaran Umum	Tersedianya Bantuan untuk daerah rentan rawan pangan dan balita stunting.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> -Memberikan bantuan berupa makanan kepada daerah rentan rawan pangan dan balita stunting - Memberikan bantuan kepada Lumbung Pangan Masyarakat untuk memperbaiki produksi, agar cadangan pangan daerah tetap tersedia.
	Indikator Kinerja	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah.
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengadaan, pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan pangan.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		<ul style="list-style-type: none"> -Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemberian gizi kepada anak balita - Mendistribusikan bantuan makanan per 3 (tiga) bulan berturut-turut - Memberikan bantuan ke Lumbung Pangan Masyarakat berupa perbaikan.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Dinas Pangan dan Perikanan
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		<p>Pelaksana : PPTK Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Penanggung Jawab : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan</p>
Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2025	
Biaya	Rp. 169.999.300	



MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD DAN PENCAPAIAN SPM

OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3		Langkah 4	La ng ka h 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8		Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL			
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal yang merupakan urusan pemerintah wajib yang di selenggarakan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah SPM Bidang pekerjaan Umum dan penataan ruang	<p>Akses :</p> <ul style="list-style-type: none"> - terbatasnya informasi bagi masyarakat tentang pengelolaan dan Pemanfaatan jaringan perpipaan <p>Partisipasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya peluang atau kesempatan bagi kelompok perempuan untuk penyampaian informasi untuk penentuan lokasi keterlibatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya jumlah Jaringan perpipaan sesuai kebutuhan masyarakat - Kurangnya sosialisasi bagi masyarakat terutama perempuan dan anak-anak dalam pengelolaan jaringan perpipaan - Koordinasi yang masih kurang - Jumlah SDM 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Pemahaman dan kesadaran tentang manfaat jaringan perpipaan - Kurangnya pengetahuan di Masyarakat terutama di kelompok perempuan dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan perpipaan - Kurangnya perempuan dalam 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak bagi seluruh lapisan masyarakat - Terbangunnya jaringan perpipaan dengan kompetensi - Pengadaan sarana dan prasarana - Pengadaan sarana informasi media cetak 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pembangunan Sambungan Rumah (SR) sebanyak 200 Rumah Tangga - Melakukan sosialisasi Meningkatkan koordinasi - Menambah Jumlah SDM Sesuai kompetensi - Pengadaan sarana dan prasarana - Pengadaan sarana informasi media cetak 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penduduk / rumah tangga yang terlanyani air minum jaringan perpipaan dengan pembangunan yang responsif gender 4 Lokasi 	<p>Output : Terbangunnya Sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan dengan pembangunan yang responsif gender 4 Lokasi</p> <p>Input : Rp. 2000.000.000,-</p> <p>Outcome : Tersedia nya akses air Minum aman dengan pembangunan yang responsif gender</p>		

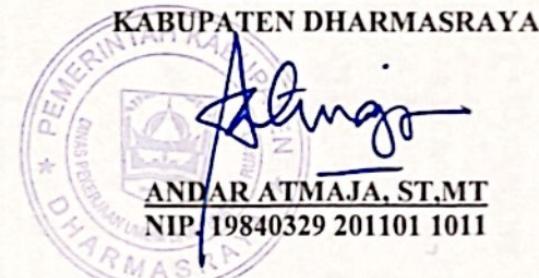
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum(SPA M) Jaringan Perpipaan Tujuan : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Sasaran : Meningkatnya layanan penyediaan air minum	SPM merupakan peranan yang penting dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik bagi pemerintah daerah sebagai perangkat hya g memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun bagi masyarakat tang mendapatkan pelayanan, bagi oemerintah daerah SPM dapat di jadikan dasar tolok ukur dalam penentuan anggaran yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan khususnya pada urusan wajib yang diperlukan masyarakat, dengan adanya SPM akan menjadi acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah	dalam pemeliharaan dan pengelolaan jaringan perpipaan Kontrol : <ul style="list-style-type: none">- Kurangnya pengetahuan di Masyarakat terutama di kelompok perempuan dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan perpipaan Manfaat :<ul style="list-style-type: none">- Belum semua masyarakat merasakan manfaat pembangunan penampung air pada kegiatan Pengelolaan dan	yang belum memadai <ul style="list-style-type: none">- Kurangnya Sarana dan Prasarana yang memadai- Pembinaan dan Penyuluhan masih kurang optimal- Masih kurangnya Media Informasi baik media cetak dan elektronik		pengelolaan dan pemanfaatannya	- dan elektronik - Membuat Juknis		

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal</p> <p>Peraturan Menteri dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan Minimal</p> <p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M. 2018 tentang standar teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
	<p>Jenis pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum pemerintah daerah kabupaten Dharmasraya terdiri atas</p> <p>a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan</p> <p>b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik</p> <p>Permasalahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur air limbah / sanitasi infrastruktur air Minum Perpipaan 							

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
	- Masih kurang kesadaran masyarakat tentang prilaku hidup sehat dan bersih							

Plt. KEPALA DINAS PUPR
KABUPATEN DHARMASRAYA



Andar Atmaja
ANDAR ATMAJA, ST,MT
NIP. 19840329 201101 1011

Tim Verifikasi

<p>Inspektur Drs. Andy Sumanto, Cfa NIP. 19661220 199009 1 001</p>	<p>Kepala BKD Asril AP, M. Si NIP. 19750225 199501 1 001</p>	<p>Kepala Bapperida Paryanto, S. Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala DJNSOSP3APPKB MARTIN EFENDI, S. Hut, M. M NIP. 19790905 200801 1 018</p>
--	--	--	--

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)
INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD
DAN PENCAPAIAN SPM

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KODE PROGRAM	1.03.05
KEGIATAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
HASIL/OUTPUT	Terbangunnya Sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan dengan pembangunan yang responsif gender 4 Lokasi
ANALISA SITUASI	<p>4. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal yang merupakan urusan pemerintah wajib yang di selenggarakan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah SPM Bidang pekerjaan Umum dan penataan ruang</p> <p>SPM merupakan peranan yang penting dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik bagi pemerintah daerah sebagai perangkat hya g memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun bagi masyarakat tang mendapatkan pelayanan, bagi oemerintah daerah SPM dapat di jadikan dasar tolok ukur dalam penentuan anggaran yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan khususnya pada urusan wajib yang diperlukan masyarakat, dengan adanya SPM akan menjadi acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal - Peraturan Menteri dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan Minimal - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M. 2018 tentang standar teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jenis pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum pemerintah daerah kabupaten Dharmasraya terdiri atas Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan <p>Permasalahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur air Minum Perpipaan - Masih kurang kesadaran masyarakat tentang prilaku hidup sehat dan bersih - Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Air Minum perpipaan <p>5. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses</p> <ul style="list-style-type: none"> - terbatasnya informasi bagi masyarakat tentang pengelolaan dan Pemanfaatan jaringan perpipaan <p>Partisipasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnyapeluang atau kesempatan bagi kelompok perempuan untuk penyampaian informasi untuk penentuan lokasi keterlibatan dalam pemeliharaan dan pengelolaan jaringan perpipaan <p>Kontrol :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnyapengetahuan di Masyarakat terutama di kelompok perempuan dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan perpipaan

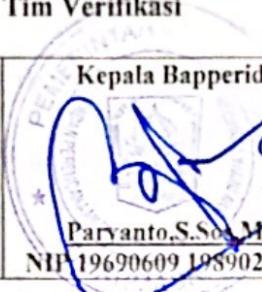
	<p>Manfaat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum semua masyarakat merasakan manfaat pembangunan penampung air pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota <p>Penyebab Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Masih terbatasnya jumlah jaringan perpipaan sesuai kebutuhan masyarakat b. Kurangnya sosialisasi bagi masyarakat terutama perempuan dan anak-anak dalam pengelolaan jaringan perpipaan c. Koordinasi yang masih kurang d. Jumlah SDM yang belum memadai e. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang memadai f. Pembinaan dan Penyuluhan masih kurang optimal g. Masih kurangnya Media Informasi baik media cetak dan elektronik <p>Penyebab Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kurangnya Pemahaman dan kesadaran tentang manfaat jaringan perpipaan b. Kurangnya pengetahuan di Masyarakat terutama di kelompok perempuan dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan perpipaan 																				
RENCANA AKSI	<table border="1"> <tr> <td>Komponen/ Aktifitas 1</td><td> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pembangunan SPAL S Sambungan Rumah (SR) sebanyak 200 Rumah Tangga - Melakukan sosialisasi - Meningkatkan koordinasi - Menambah Jumlah SDM Sesuai kompetensi - Pengadaan sarana dan prasarana - Pengadaan sarana informasi media cetak dan elektronik </td></tr> <tr> <td></td><td> <table border="1"> <tr> <td>Tujuan</td><td></td></tr> <tr> <td>Alokasi</td><td>Rp. 2000.000.000,-</td></tr> <tr> <td>Anggaran</td><td></td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Komponen/ Aktifitas 2</td><td> <table border="1"> <tr> <td>Tujuan</td><td></td></tr> <tr> <td>Alokasi</td><td></td></tr> <tr> <td>Anggaran</td><td></td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Total Anggaran</td><td>Rp. 2000.000.000,-</td></tr> </table>	Komponen/ Aktifitas 1	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pembangunan SPAL S Sambungan Rumah (SR) sebanyak 200 Rumah Tangga - Melakukan sosialisasi - Meningkatkan koordinasi - Menambah Jumlah SDM Sesuai kompetensi - Pengadaan sarana dan prasarana - Pengadaan sarana informasi media cetak dan elektronik 		<table border="1"> <tr> <td>Tujuan</td><td></td></tr> <tr> <td>Alokasi</td><td>Rp. 2000.000.000,-</td></tr> <tr> <td>Anggaran</td><td></td></tr> </table>	Tujuan		Alokasi	Rp. 2000.000.000,-	Anggaran		Komponen/ Aktifitas 2	<table border="1"> <tr> <td>Tujuan</td><td></td></tr> <tr> <td>Alokasi</td><td></td></tr> <tr> <td>Anggaran</td><td></td></tr> </table>	Tujuan		Alokasi		Anggaran		Total Anggaran	Rp. 2000.000.000,-
Komponen/ Aktifitas 1	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pembangunan SPAL S Sambungan Rumah (SR) sebanyak 200 Rumah Tangga - Melakukan sosialisasi - Meningkatkan koordinasi - Menambah Jumlah SDM Sesuai kompetensi - Pengadaan sarana dan prasarana - Pengadaan sarana informasi media cetak dan elektronik 																				
	<table border="1"> <tr> <td>Tujuan</td><td></td></tr> <tr> <td>Alokasi</td><td>Rp. 2000.000.000,-</td></tr> <tr> <td>Anggaran</td><td></td></tr> </table>	Tujuan		Alokasi	Rp. 2000.000.000,-	Anggaran															
Tujuan																					
Alokasi	Rp. 2000.000.000,-																				
Anggaran																					
Komponen/ Aktifitas 2	<table border="1"> <tr> <td>Tujuan</td><td></td></tr> <tr> <td>Alokasi</td><td></td></tr> <tr> <td>Anggaran</td><td></td></tr> </table>	Tujuan		Alokasi		Anggaran															
Tujuan																					
Alokasi																					
Anggaran																					
Total Anggaran	Rp. 2000.000.000,-																				
Capaian Program	<p>Out put : Terbangunnya Sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan dengan pembangunan yang responsif gender 4 Lokasi</p> <p>Out come :</p> <p>Tersedianya akses air Minum aman dengan pembangunan yang responsif gender</p>																				

Sungai Dareh, Juni 2024

Plt. KEPALA DINAS PUPR
KABUPATEN DHARMASRAYA



Tim Verifikasi

 Inspektur <u>Drs. Andi Santanta, C.P.A</u> NIP. 19681201 1990091 001	 Kepala BKD <u>Asri AP, M.Si</u> NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida <u>Paryanto, S.Sos, M.T</u> NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala DINSOSP3APPKB <u>MARTIN EFFENDI, S.Hut,M.M</u> NIP. 19790905 200801 1 018
--	---	---	---

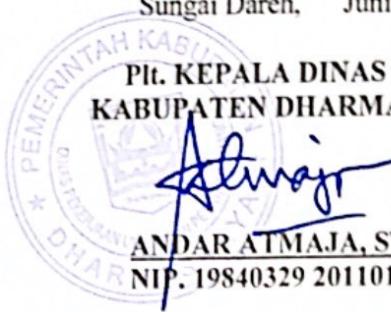
FORM KAK/ TOR

Program		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Sasaran Program		Rumah Tangga berpenghasilan rendah
Kegiatan		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 2. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan Minimal 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M. 2018 tentang standar teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Gambaran Umum	<p>Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal yang merupakan urusan pemerintah wajib yang di selenggarakan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah SPM Bidang pekerjaan Umum dan penataan ruang</p> <p>SPM merupakan peranan yang penting dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik bagi pemerintah daerah sebagai perangkat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun bagi masyarakat mendapatkan pelayanan, bagi pemerintah daerah SPM dapat dijadikan dasar tolak ukur dalam penentuan anggaran yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan khususnya pada urusan wajib yang diperlukan masyarakat, dengan adanya SPM akan menjadi acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah</p>
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pembangunan Sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan
	Indikator Kinerja	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun
	Batasan Kegiatan	

Maksud dan Tujuan	Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
Cara Pelaksanaan Kegiatan	Membuat Perencanaan, Melakukan Pembangunan Fisik dan Melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang
Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya	Rp. 2000.000.000,-

Sungai Dareh, Juni 2024

Plt. KEPALA DINAS PUPR
KABUPATEN DHARMASRAYA



Andar Atmaja
ANDAR ATMAJA, ST,MT
NIP. 19840329 201101 1011

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
INOVASI DUTA PERIZINAN DPMPTSP DHARMASRAYA

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROGRAM : Program Pelayanan Penanaman Modal

TAHUN : 2024

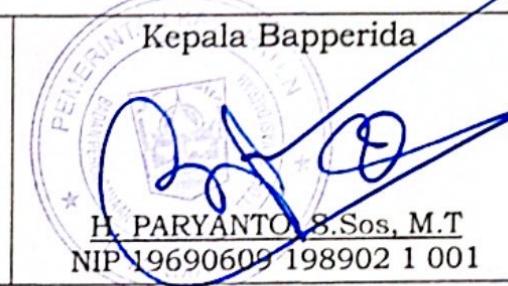
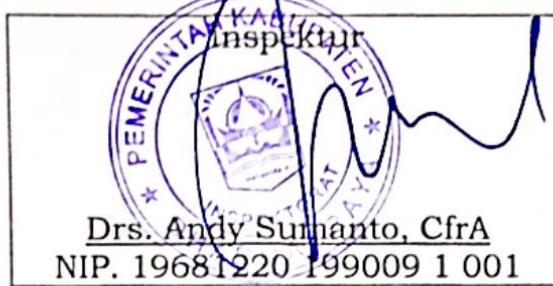
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Peraturan BKPM RI no 2 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non fisik fasilitas penanaman modal DPMPTSP	Akses: Bimbingan Teknis/Sosialisasi kemudahan Berusaha diikuti petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non fisik fasilitas penanaman modal DPMPTSP	Kurangnya pengembangan SDM pengelolah perizinan	Pelaku Usaha laki-laki disebabkan karena laki-laki adalah pekerja dan bertanggung jawab kepada keluarga	Dengan pengurusan secara online akan dapat pemangkas waktu dan dapat dilakukan secara mandiri	Peningkatan Bimbingan Perizinan berusaha secara online Kemudahan Berusaha oleh provinsi bierokrasi,menghemat waktu dan dapat dilakukan secara mandiri	1. Meningkatkan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kabupaten Dharmasraya Dalam Memfasilitasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kepada pelaku usaha serta duta	Input : Kualitas Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Dharmasraya Berusaha i Kemudahan Berusaha
Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Melakukan Bimtek/Sosialisasi kemudahan berusaha kepada Pelaku Usaha melalui Dana DAK Non Fisik Fasilitasi	Partisipasi: Pelaku Usaha belum semuanya mengerti tentang OSS-RBA Online dan LKPM Online Kontrol : Terbatasnya pengetahuan Masyarakat/pelaku usaha terhadap					2. Meningkatkan Pemahaman kepada pelaku usaha Mengenai Ketentuan	Outcome : Meningkatnya Jumlah Peserta Bimbingan Teknis/Sosialisasinya Kemudahan Berusaha Berusaha

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Tujuan : Untuk meningkatkan Pemahaman dan keterampilan kepada Pelaku Usah	Penanaman Modal Tahun 2024 2. Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha ini dilakukan melalui pertemuan dengan partisipan pelaku usaha dan narasumber yang kompeten	sistem teknologi terbaru				duta perizinan yang nantinya akan ditempatkan diseluruh Nagari Nagari	Pelaksanaan Penanaman Modal.	

Sikabau, 25 Juni 2024
KEPALA DINAS PMPTSP


NALDI, S.STP,M.Si.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP 19820411 200012 1 002

Tim Verifikasi



GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)
INOVASI DUTA PERIZINAN DPMPTSP DHARMASRAYA

SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TAHUN ANGGARAN : 2024

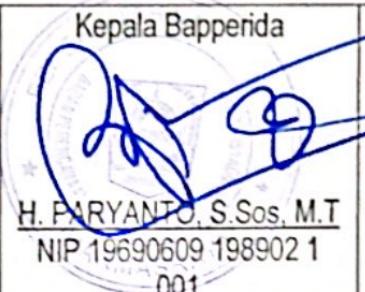
PROGRAM	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
KODE PROGRAM	2.18.05
KEGIATAN	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
HASIL/OUTPUT	Untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan kepada Pelaku Usaha
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan BKPM RI no 2 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non fisik fasilitas penanaman modal DPMPTSP Melakukan Bimtek/Sosialisasi kemudahan berusaha kepada Pelaku Usaha melalui Dana DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun 2024 Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha ini dilakukan melalui pertemuan dengan partisipan pelaku usaha dan narasumber yang kompeten <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses</p> <ul style="list-style-type: none"> Bimbingan Teknis/Sosialisasi kemudahan Berusaha diikuti 450 Pelaku Usaha Partisipasi Pelaku Usaha belum semuanya mengerti tentang OSS-RBA Online dan LKPM Online. <p>Kontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya pengetahuan Masyarakat/pelaku usaha terhadap sistem teknologi terbaru <p>b. Penyebab Internal</p> <p>Kurangnya pengembangan SDM pengelolah perizinan</p> <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> Banyaknya Pelaku Usaha laki-laki disebabkan karena laki-laki adalah pekerja dan Bertanggung jawab kepada keluarga

CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak ukur Jumlah dana Rp. 319.052000	
	2. Indikator dan target kinerja <u>Input</u> Dana yang diusulkan sebesar Rp. 319.052000 <u>Output</u> Meningkatnya Jumlah Peserta Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha <u>Outcome</u> Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Yang Memiliki Perizinan Berusaha	
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 319.052000	
RENCANA AKSI	Kegiatan	Peningkatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha oleh provinsi maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kepada pelaku usaha serta duta duta perizinan yang nantinya akan ditempatkan diseluruh Nagari Nagari.
	Tujuan	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Dharmasraya Dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Penanaman Modal 2. Meningkatkan Pemahaman Pelaku Usaha Mengenai Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal.
	Indikator Output	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Yang Memiliki Perizinan Berusaha

Sikabau, 25 Juni 2024



Tim Verifikasi

 <p>Inspektorat Drs. ANDY SUMANTO, CfrA NIP 19581220 199009 1 001</p>	 <p>Kepala BKD ASRIL AP, M.Si NIP 19750225 199501 1 001</p>	 <p>Kepala Bapperida H. PARYANTO, S.Sos, M.T NIP 19690609 198902 1 001</p>	 <p>Kepala Dinas Sosial P3A PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut.M.M NIP 19790905 200801 1 018</p>
---	--	--	--

FORM KAK/ TOR

Program		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Sasaran Program		Pelaku Usaha
Kegiatan		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan BKPM RI nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko Peraturan BKPM RI no 2 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non fisik fasilitas penanaman modal
	Gambaran Umum	Kegiatan dilakukan dengan pemberian konsultasi, sosialisasi, ataupun bimbingan teknis serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Indikator Kinerja	Terbitnya Perizinan dan Non perizinan Sesuai Ketentuan
	Batasan Kegiatan	Peningkatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha meliputi proses perizinan berusaha dan non berusaha
Maksud dan Tujuan		<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Dharmasraya Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang undangan Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai perizinan
Cara Pelaksanaan Kegiatan	Melalui Bimbingan Teknis/Sosialisasi	
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten Dharmasraya	
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan	Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	

	Penanggung Jawab : Kepala Dinas DPMPTSP
Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya	Rp. 319.052000

Sikabau, 25 Juni 2024



MATRIX GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD

OPD : Dinas Pendidikan

PROGRAM : Pengelolaan Pendidikan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9	
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER				KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender	
Program : Pengelolaan Pendidikan	1. Data peserta didik laki-laki dan perempuan di SD Kabupaten Dharmasraya Laki-laki = 2267 siswa, Perempuan = 1474 siswa	Akses : Belum semua siswa yang mendapatkan biaya personal (Seragam Sekolah)	- Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pembelajaran dan Kebudayaan, Nomor. 052/C/Kep/D/82 "Sekolah secara formal berhak memakai seragam sekolah terhadap siswanya dengan bermacam alasan karena seragam sekolah ialah suatu perlengkapan menciptakan kerapian, ketertiban serta keteraturan siswa dalam melakukan aktivitas pembelajaran.	Belum semua masyarakat menerima seragam sekolah baru jenjang Sekolah Dasar	Terlaksananya bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa laki-laki dan perempuan	1. Pendataan dan verifikasi data. 2. Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa	Jumlah peserta didik SD laki-laki dan perempuan yang menerima bantuan perlengkapan sekolah	Input : Rp 2.451.500.000 Output : Jumlah peserta didik SD laki-laki dan perempuan yang tidak mendapatkan bantuan biaya personil (seragam yang menerima bantuan perlengkapan sekolah)	
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	2. Jumlah peserta didik SD laki-laki dan perempuan yang menerima biaya personal (Seragam Sekolah)	Partisipasi : -	Kontrol : Masyarakat khususnya siswa baru di jenjang pendidikan sekolah dasar	Manfaat :					
Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Laki-laki : 2267 siswa, Perempuan : 1474 siswa								

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Tujuan : terlaksananya bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa	(Seragam Sekolah) Laki-laki : 2267 siswa, Perempuan : 1474		<u>kelas ekonomi dari siswa yang dari berbagai elemen"</u>					Out Come : Meningkatnya kesejahteraan peserta didik SD laki-laki dan perempuan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Pengelolaan Pendidikan	1. Data peserta didik laki-laki dan perempuan di SMP Kabupaten Dharmasraya Laki-laki = 2336 siswa, Perempuan = 1273 siswa	Akses : Belum semua siswa yang mendapatkan biaya personal (Seragam Sekolah)	- Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pembelajaran dan Kebudayaan, Nomor. 052/C/Kep/D/82 "Sekolah secara formal berhak memakai seragam sekolah terhadap siswanya dengan bermacam alasan karena seragam sekolah ialah suatu perlengkapan menciptakan kerapian, ketertiban serta keteraturan siswa dalam melakukan aktivitas pembelajaran.	Belum semua masyarakat menerima seragam sekolah baru	Terlaksananya bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa laki-laki dan perempuan	1. Pendataan dan verifikasi data. 2. Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa	Jumlah peserta didik SMP laki-laki dan perempuan yang menerima bantuan perlengkapan sekolah	Input : Rp 1.648.500.000
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	2. dan perempuan yang menerima biaya personal (Seragam Sekolah)	Partisipasi : -	Kontrol : Masyarakat khususnya siswa baru di jenjang pendidikan sekolah dasar					Output : Jumlah peserta didik SMP laki-laki dan perempuan yang tidak mendapatkan bantuan biaya personil (seragam yang menerima bantuan perlengkapan sekolah
Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar							
Tujuan : terlaksananya bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa	3. siswa dan Jumlah peserta didik SMP laki-laki dan perempuan yang menerima biaya personal (Seragam Sekolah) Laki-laki : 2336 siswa, Perempuan : 1273 siswa	Manfaat : -	<u>Seragam sekolah sebagai penghilang kesenjangan antara kelas ekonomi dari siswa yang dari berbagai elemen"</u>					Out Come : Meningkatnya kesejahteraan peserta didik SMP laki-laki dan perempuan

FORM KAK/ TOR

Program		Program Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik PAUD
Sasaran Program		Siswa Sekolah Dasar
Kegiatan		Pengelolaan Pendidikan PAUD
Sub Kegiatan		Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik PAUD
Latar Belakang	Dasar Hukum	3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
	Gambaran Umum	Kabupaten Dharmasraya memiliki Data peserta didik laki-laki dan perempuan di SMP Kabupaten Dharmasraya Laki-laki = 2336 siswa, Perempuan = 1273 siswa Jumlah peserta didik SMP laki-laki dan perempuan yang menerima Biaya Personil (Seragam Sekolah) Laki-laki : 2336 siswa, Perempuan : 1273 siswa
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik PAUD berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022
	Indikator Kinerja	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Dharmasraya
	Batasan Kegiatan	Untuk tahun 2024 kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik PAUD Berdasarkan Permendikbud dikhkususkan untuk Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Dharmasraya
Maksud dan Tujuan		Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik PAUD Kabupaten Dharmasraya
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Pengadaan Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama / Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik PAUD Kabupaten Dharmasraya

Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan	Pelaksana : Dinas Pendidikan Sekolah Yang Menerima Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik PAUD
Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2024
Biaya	Rp 287.500.000

Pulau Punjung, Jun 2024
Kepala,



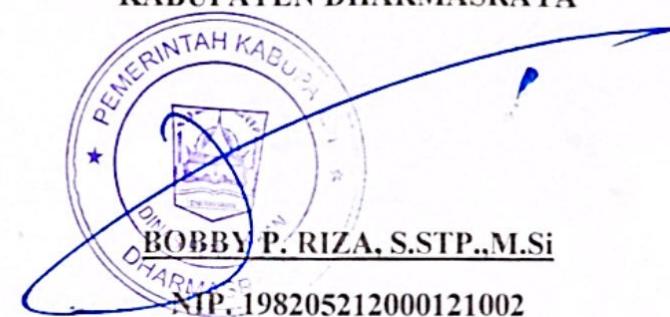
Tim Verifikasi

Inspektor DINSOSPARKB DRS ANDI SUMANTO Cfra NIP 19681220 199009 1 001	Kepala BKD PEMERINTAH KABUPATEN BADAN KEGIATAN DAN DILAKUKAN ASRILAP, M.Si NIP 19750225 199501 1 001	Kepala Bapppeda PEMERINTAH KABUPATEN H. PARYANTO, S.Sos. M.T NIP 19690609 198902 1 001	Kepala Dinas Sosial P3A PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut.M.M NIP. 19790905 200801 1 018
--	---	---	---

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
	Laki-laki : 2267 siswa, Perempuan : 1474 siswa			0				Out Come : Meningkatnya kesejahteraan peserta didik SMP laki-laki dan perempuan

Pulau Punjung, Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DHARMASRAYA



Tim Verifikasi

Inspektur



Drs. Andy Sumanto, Cfra

NIP 19681220 199009 1 001

Kepala BKD



Asril, AP, M. Si

NIP 19750225 199501 1 001

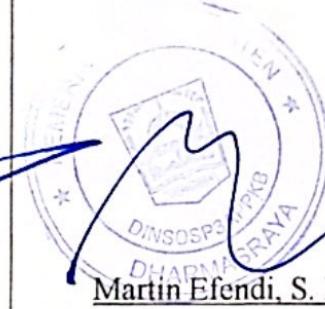
Kepala BAPPERIDA



Paryanto, S. Sos, M.T

NIP 19690609 198902 1 001

Kepala DINSOSP3APPK



Martin Efendi, S. Hut. M. M

NIP. 197909052008011018

FORM KAK/ TOR

Program		Program Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik Sekolah Dasar
Sasaran Program		Siswa Sekolah Dasar
Kegiatan		Pengelolaan Pendidikan Dasar
Sub Kegiatan		Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik Sekolah Dasar
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
	Gambaran Umum	Kabupaten Dharmasraya memiliki Data peserta didik laki-laki dan perempuan di SD Kabupaten Dharmasraya, Laki-laki = 2267 siswa, Perempuan = 1474 siswa. Jumlah peserta didik SD laki-laki dan perempuan yang menerima Biaya Personil (Seragam Sekolah). Laki-laki : 2267 siswa, Perempuan : 1474 siswa
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik Sekolah Dasar berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022
	Indikator Kinerja	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik Sekolah Dasar Kabupaten Dharmasraya
	Batasan Kegiatan	Untuk tahun 2024 kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik Sekolah Dasar Berdasarkan Permendikbud dikhkususkan untuk Sekolah Dasar di Kabupaten Dharmasraya
Maksud dan Tujuan		Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik Sekolah Dasar Kabupaten Dharmasraya
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Pengadaan Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik Sekolah Dasar Kabupaten Dharmasraya

Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan	Pelaksana : Dinas Pendidikan Sekolah Yang Menerima Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik Sekolah Dasar
Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2024
Biaya	Rp 2.451.500.000,-

Pulau Punjung, Junj 2024

Kepala,



BOBBY P. RIZA, S.STP.,M.Si
NIP 198205212000121002

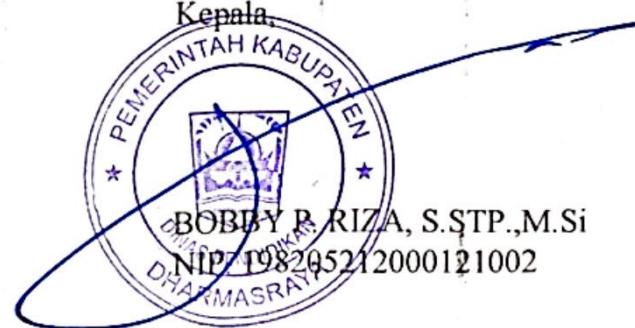
Tim Verifikasi

Inspektur DISANDY, SUMANTO GfrA NIP 19681220 199009 1 001	Kepala BKD CASRI LAP.,M.Si NIP 19750225 199501 1 001	Kepala Bappeda H. PARYANTO, S.Sos, M.T NIP 19690609 198902 1 001	Kepala Dinas Sosial P3A EFENDI,S.Hut.M.M MARTIN NIP. 19790905 200801 1 018
--	--	---	---

	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama / Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik Sekolah Dasar Kabupaten Dharmasraya
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan	Pelaksana : Dinas Pendidikan Sekolah Yang Menerima Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik Sekolah Menengah Pertama
Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2024
Biaya	Rp 1.648.500.000

Pulau Punjung, Junj 2024

Kepala



Tim Verifikasi

Inspektorat PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA DISANDY SUMANTO CfrA NIP 19681220 199009 1 001	Kepala BKD PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA ASRIL AP.,M.Si NIP 19750225 199501 1 001	Kepala Bapppeda PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA H. PARYANTO, S.Sos. M.T NIP 19690609 198902 1 001	Kepala Dinas Sosial P3A PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA PPKB MARTIN EFENDI,S.Hut.M.M NIP. 19790905 200801 1 018
---	---	--	---

FORM KAK/ TOR

Program		Program Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik Sekolah Dasar
Sasaran Program		Siswa Sekolah Dasar
Kegiatan		Pengelolaan Pendidikan Dasar
Sub Kegiatan		Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik Sekolah Dasar
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
	Gambaran Umum	Kabupaten Dharmasraya memiliki Data peserta didik laki-laki dan perempuan di SD Kabupaten Dharmasraya, Laki-laki = 2267 siswa, Perempuan = 1474 siswa. Jumlah peserta didik SD laki-laki dan perempuan yang menerima Biaya Personil (Seragam Sekolah). Laki-laki : 2267 siswa, Perempuan : 1474 siswa
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik Sekolah Dasar berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022
	Indikator Kinerja	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik Sekolah Dasar Kabupaten Dharmasraya
	Batasan Kegiatan	Untuk tahun 2024 kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik Sekolah Dasar Berdasarkan Permendikbud dikhususkan untuk Sekolah Dasar di Kabupaten Dharmasraya
Maksud dan Tujuan		Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik Sekolah Dasar Kabupaten Dharmasraya
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Pengadaan Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik Sekolah Dasar Kabupaten Dharmasraya

Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan	Pelaksana : Dinas Pendidikan Sekolah Yang Menerima Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik Sekolah Dasar
Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2024
Biaya	Rp 2.451.500.000,-

Pulau Punjung, Junj 2024

Kepala,



BOBBY P. RIZA, S.STP.,M.Si
NIP 198205212000121002

Tim Verifikasi

Inspektorat	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial P3A PPKB
 DRS. ANDY SUMANTO CirA NIP 19681220 199009 1 001	 ASRI AP.,M.Si NIP 19750225 199501 1 001	 H. PARYANTO, S.Sos., M.T. NIP 19690609 198902 1 001	 MARTIN EFENDI,S.Hut.M.M NIP. 19790905 200801 1 018

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
PERSENTASE CAPAIAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA

OPD : Dinas Perhubungan

PROGRAM : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Program Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	• Belum tersedianya pelataran sarana dan prasarana parkir terpadu khususnya di wilayah Koto Besar (Abai Siat) dengan jumlah populasi penduduk tahun 2019 ada 5.664 jiwa 2.888 laki-laki serta 2776 perempuan (data BPS tahun 2019)	Akses : • Sarana pelataran dan prasarana parkir terpadu belum memenuhi kebutuhan.	• Belum terpenuhi nya tempat pelataran dan parkir yang responsif gender dan terpadu bagi masyarakat Koto Besar. Partisipasi : • Kurang nyamannya masyarakat dan Petugas Dishub yang berjaga di Koto Besar ada 7 nagari (Abai Siat) dalam parkir dan menunggu mobil penumpang dan barang	• Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembebasan lahan parkir. • Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat tempat parkir. • Belum optimalnya koordinasi dengan lintas sektor dan pemuka masyarakat. • Masih belum tersedia tempat angutan barang dan penumpang yang responsif gender.	Pembangunan pelataran dan sarana prasarana tempat parkir yang nyaman bagi seluruh masyarakat	• Melakukan pembangunan pelataran sarana dan prasarana parkir terpadu yang nyaman bagi seluruh masyarakat	Berdasarkan data dari BPS tahun 2019 tentang jumlah penduduk di wilayah Koto Besar 5.664 jiwa 2.888 laki-laki serta 2776 perempuan belum memiliki sarana dan prasarana parkir barang dan penumpang	Input : Berdasarkan kebutuhan dalam pembangunan tersebut maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp.240.000.000,-
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	• Berdasarkan data Jumlah Nagari Di Daerah Bps Tahun 2019 Kecamatan Koto Besar ada 7 nagari di antaranya abai siat, Bonjol, Koto Besar, Koto Gadang, Koto Laweh, Koto Ranah dan Koto Tinggi.	Kontrol : • Belum diakomodinya kebutuhan pelataran dan sarana dan			• Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat tempat parkir. • Koordinasi kepada lintas sektor dan pemuka masyarakat tentang pelataran parkir angutan barang dan penumpang yang responsif gender.		Output : Tersedianya 2 unit (pembangunan pelataran sarana dan prasarana parkir terpadu dan satu unit kendaraan roda dua, roda empat atau pun angkutan barang dan penumpang.	Out Come : Meningkatkan kenyamanan
Sub Kegiatan : Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	• Berdasarkan standar SRP (Satuan Ruang Parkir) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk atau sepeda motor) termasuk ruang bebas dan lebar							
Tujuan : Tersedianya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Responsive Gender	• Berdasarkan standar SRP (Satuan Ruang Parkir) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk atau sepeda motor) termasuk ruang bebas dan lebar							

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
	bukaan pintu. Adapun ruang parkir untuk masing-masing jenis kendaraan Menurut Standar Dir.Jend. Bina Marga adalah untuk bus/truk (3,40 x12,50 (m ²) =42,5 m ² ,mobil penumpang 2,50 m ² x2,00 m ² =12,5 m ² dan sepeda motor 0.75x2,00(m ²)=1,5m ² .	prasaranra parkir terpadu sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kecamatan Koto Besar Manfaat:-						masyarakat dalam parkir dan menunggu mobil angkutan barang dan penumpang

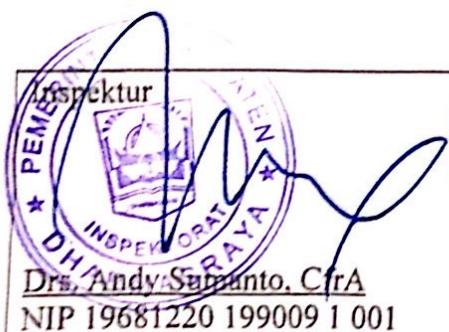
Gunung Medan, Juni 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DHARMASRAYA



CATUR IBYANDRI M, S.STP.,M.Si.,
NIP.19770121 199511 1 003

Tim Verifikasi



GENDER BUDGET STATEMENT

Persentase Capaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota
 (Jumlah Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten Kota Yang Terbangun)

SKPD : Dinas Perhubungan

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		
KODE PROGRAM	2.15.01		
KEGIATAN	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota		
HASIL/OUTPUT	Tersedianya 2 unit (pembangunan pelataran sarana dan prasarana parkir terpadu dan satu unit pelataran sarana dan prasarana parker angkutan barang dan penumpang)		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <p>Berdasarkan data dari BPS tahun 2019 jumlah populasi penduduk ada 5664 jiwa .2888 laki –laki dan 2776 perempuan.</p> <p>Nagari yang berada di kecamatan koto besar diantaranya: abai siat,bonjol,koto besar,koto gadang,koto rawah,koto ranah dan koto tinggi.</p> <p>Berdasarkan standar SRP (Satuan Ruang Parkir) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk atau sepeda motor) termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu. Adapun ruang parkir untuk masing –masing jenis kendaraan Menurut Standar Dir.Jend. Bina Marga adalah untuk bus/truk (3,40 x12,50 (m²) =42,5 m²,mobil penumpang 2,50 m² x2,00 m²=12,5 m² dan sepeda motor 0,75x2,00(m²)=1,5m².</p>		
PROSES	<p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Sarana pelataran dan prasarana parkir terpadu belum memenuhi kebutuhan. ✚ Kurang nyamannya masyarakat dan Petugas Dishub yang berjaga di Koto Besar (Abai Siat) dalam parkir dan menunggu mobil penumpang dan barang. ✚ Belum diakomodinya kebutuhan pelataran dan sarana dan prasarana parkir terpadu sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kecamatan Koto Besar. <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Belum terpenuhi nya tempat pelataran dan parkir yang responsif gender dan terpadu bagi masyarakat Koto Besar. ✚ Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat tempat parkir. ✚ Belum optimalnya koordinasi dengan lintas sektor dan pemuka masyarakat. ✚ Masih belum tersedia tempat angutan barang dan penumpang yang responsif gender. <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembebasan lahan parkir. ✚ Masih rendahnya kesadaran masyarakat (petugas parkir) dalam mengatur ketertiban parkir. 		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Tujuan	Melakukan pembangunan pelataran sarana dan prasarana parkir terpadu
	Alokasi Anggaran		Masih nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 2	Tujuan	Melakukan pembangunan pelataran sarana dan prasarana parkir angkutan barang dan penumpang.
			Masih nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Tujuan	Pembangunan pelataran sarana dan prasarana tempat parkir yang
	Alokasi Anggaran		nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 2	Tujuan	Pembangunan pelataran sarana dan prasarana tempat parkir yang
			nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat

	Alokasi Anggaran	
Total Anggaran	Rp 240.000.000,-	
Capaian Program		Out put Tersedianya 2 unit pembangunan pelataran parkir terpadu dan satu unit pelataran sarana dan prasarana parker angkutan barang dan penumpang.
Out come Meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam parker dan menunggu mobil angkutan barang dan penumpang.		

Gunung Medan, Juni 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DHARMASRAYA**



**CATUR EBY ANDRI M, S.STP.,M.Si.,
NIP.19770121199511 1 003**

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD KABUPATEN	Kepala Bappperda	Kepala Dinas Sosial P3APPKB
Drs. Andy Sumianto, CfrA NIP 19681220 199009 1 001	Asri AP, M. Si NIP 19750225 199501 1 001	Paryanto, S. Sos, M.T. NIP 19690609 198902 1 001	MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP 19790905 200801 1 018

FORM KAK/ TOR

Program		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Sasaran Program		Terlaksananya pembangunan parkir yang responsive gender untuk masyarakat dan petugas dishub.
Kegiatan		Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota
Sub Kegiatan		Jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten kota yang terbangun
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
	Gambaran Umum	Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota belum bias terlaksana sampai tahun ini 2024
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Adanya pembangunan dan pelataran parkir terpadu
	Indikator Kinerja	Terbentuknya pembangunan dan pelataran parkir yang terpadu
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Melakukan pengadaan untuk pembangunan pelataran parkir terpadu
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Koordinasi, Sinkronisasi pelaksanaan pengadaan untuk pembangunan pelataran parkir terpadu
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Abai siat dan sungai rumbai Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp.240.000.000,-

Gunung Medan, Juni 2024



Tim Verifikasi

Inspektor Drs. Andi Supriadi, C.Fra NIP 19681010 199009 1 001	Kepala BKD Asril AP, M. Si NIP. 19750225 199501 1 001	Kepala Bappperida Paryanto, S. Sos. M.T NIP 19690609 198902 1 001	Kepala Dinas Sosial P3APPKB MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018
---	---	---	--

MATRIX GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

OPD : Dinas Perhubungan

PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
<p>Program : • Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan : • Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>Sub Kegiatan : • Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya</p> <p>Tujuan : • Tersedianya toilet yang</p>	<p>Berdasarkan jumlah ASN 27 orang,CPNS 4 Orang, Honda 3 orang dan THL 173 Maka belum tercukupi untuk ke toilet dengan jumlah orang yang 207 orang dengan 2 toilet yang belum responsif gender. Satu unit dalam keadaan rusak berat dan satu unit dalam keadaan rusak sedang.</p>	<p>Akses : • sarana toilet yg belum memenuhi kebutuhan. • Jarak antara toilet dengan kantor cukup jauh Partisipasi :- Kontrol : Belum diakomodinya kebutuhan toilet sesuai dg jumlah ASN,CPNS,Honda dan THL Manfaat kurang nyamannya ASN,CPNS, Honda dan THL</p>	<p>Permen PU NO 38 th 2007 tentang "pembagian urusan pemerintah antara pemerintah daerah kabupaten kota" dan peraturan pemerintah Permen PU no 6 th 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis risiko sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dimana</p>	<p>Masih rendahnya kontribusi anggaran pada Dinas Perhubungan untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya toilet yang responsif gender. • Tersedianya toilet yang responsif gender bagi semua lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan unit toilet yang responsif gender. • Mengajukan penambahan anggaran untuk pembangunan toilet yang sesuai dengan responsif gender. 	<p>Jumlah ASN 27 orang,CPNS 4. Orang, Honda 3 orang dan THL 173 Maka belum tercukupi untuk ke toilet dengan jumlah orang yang 207.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toilet yg ada belum responsif gender. <p>Jumlah toilet ada 2 yg satu unit dalam keadaan rusak berat dan satu unit dalam keadaan rusak sedang.</p>	<p>Input :memberi ruang untuk perempuan /laki-laki mendapatkan toilet yang responsif gender sebanyak 2 banding 3 dengan anggaran yang diusulkan sebesar Rp.220.000.000,- /4 unit toilet</p> <p>Output : Tersedianya 4 toilet yg responsif gender.</p> <p>Out Come : Meningkat kenyamanan ASN,CPNS, Honda dan THL</p>

responsif gender.			bangunan/ gedung responsive gender.	yg					
----------------------	--	--	--	----	--	--	--	--	--

Gunung Medan,

Juni 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DHARMASRAYA**



Tim Verifikasi



GENDER BUDGET STATEMENT

**Persentase Capaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota
(Jumlah Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten Kota Yang Terbangun)**

SKPD : Dinas Perhubungan

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota															
KODE PROGRAM	2.15.01.2.07.11															
KEGIATAN	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah															
HASIL/OUTPUT	Tersedianya 4 toilet yg responsif gender.															
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Berdasarkan jumlah ASN 27 orang,CPNS 4 Orang, Honda 3 orang dan THL 173 Maka belum tercukupi untuk ke toilet dengan jumlah orang yang 207 orang dengan 2 toilet yang belum responsif gender. Satu unit dalam keadaan rusak berat dan satu unit dalam keadaan rusak sedang.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> o sarana toilet yg belum memenuhi kebutuhan. o Jarak antara toilet dengan kantor cukup jauh o Belum diakomodinya kebutuhan toilet sesuai dengan jumlah ASN,CPNS,Honda dan THL o kurang nyamannya ASN,CPNS, Honda dan THL dalam penggunaan toilet. 															
RENCANA AKSI	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Komponen/ Aktifitas 1</td> <td>Tujuan</td> <td>Tersedianya toilet yang responsif gender.</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td>Rp.200.000.000,-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Komponen/ Aktifitas 2</td> <td>Tujuan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Anggaran</td> <td colspan="2">Rp.200.000.000,-</td></tr> </table>			Komponen/ Aktifitas 1	Tujuan	Tersedianya toilet yang responsif gender.	Alokasi Anggaran	Rp.200.000.000,-	Komponen/ Aktifitas 2	Tujuan		Alokasi Anggaran		Total Anggaran	Rp.200.000.000,-	
Komponen/ Aktifitas 1	Tujuan	Tersedianya toilet yang responsif gender.														
	Alokasi Anggaran	Rp.200.000.000,-														
Komponen/ Aktifitas 2	Tujuan															
	Alokasi Anggaran															
Total Anggaran	Rp.200.000.000,-															
Capaian Program	<p>Out put: Tersedianya 4 toilet yg responsif gender.</p> <p>Out come : Meningkat kenyamanan ASN,CPNS, Honda dan THL dalam penggunaan toilet yang responsive gender.</p>															

Gunung Medan, Juni 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DHARMASRAYA**



Tim Verifikasi

Inspektorat Dandim Sumenep Cpt.A NIP 19681020 199009 1 001	Republik Indonesia PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP BAPKPD SUMENEP Asril AP, M. Si NIP 19750225 199501 1 001	Kepala Bappperda Paryanto, S. Sos. M.T NIP 19690809 198902 1 001	Kepala Dinas Sosial D2APPKB MARTIN EFENDI, S. Hut, M. M NIP 19790905 200801 1 018
--	--	--	---

FORM KAK/ TOR

Program		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
Sasaran Program		Terlaksananya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Kegiatan		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Sub Kegiatan		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
Latar Belakang	Dasar Hukum	PP No 16 Tahun 2021 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2016 Peraturan pemerintah No 27 Tahun 2014
	Gambaran Umum	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya belum terealisasikan tahun 2024
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
	Indikator Kinerja	Terbentuknya toilet yang responsive gender
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Melakukan kegiatan dalam pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Koordinasi, Sinkronisasi pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp.200.000.000,-

Gunung Medan, Juni 2024



Tim Verifikasi

Drs. Andi Sumarto, CfrA NIP 19681220 199009 1 001	Kepala BKD Asril, AP, M. Si NIP 19750225 199501 1 001	Kepala Bapperaida Paryanto, S. Sos, M.T. NIP. 19600609 198902 1 001	Kepala Dinas Sosial P3APPKB MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018
--	---	---	--

MATRIX GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C

OPD : Dinas Perbuhungan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembukaan Wawasan	ISU GENDER	KEBLIAKAN DAN RENCANA KEDEPAN	PENGUKURAN HASIL				
		Faktor Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Kabupaten Dharmasraya semenjak Tahun 2018 sampai saat ini 2024 n Lalu Lintas jumlah terminal yang di kelola hanya unit Jalan (LLAJ) terminal. Untuk lokasi hanya berada di pasar pulau punjung kecamatan pulau punjung. Jenis Terminal penumpang Tipe C	Kegiatan : Pengelolaan Terminal penumpang	Akses : • Peluang akses dalam menggunakan sarana prasarana didalam terminal tidak memadai. Sarana terminal tidak lengkap.	SDM: belum optimalknya pemahaman SDM perihal konsep gender. Belum maksimalnya himbauan tentang kesetaraan gender disertai dengan pengaplikasian atau pemasangan signal/tanda/rambu jasa angkutan umum yang umum lebih responsive gender.	Masih adanya anggapan bahwa perempuan hanya mengurusi pekerjaan domestik. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi tentang proses pengelolaan angkutan umum yang terkait gender.	• Sosialisasi kepada pegawai yang bertugas di terminal umum di pulau punjung. Untuk memberikan kepada dengan aparatur terkait.	• Meningkatkan konsultasi dengan tenaga ahli/parkir.	Berdasarkan data BPS tahun 2017-2019 jumlah penduduk untuk pulau di terminal punjung kurang lebih ada jiwa. dari 2018 sampai 2024. Itu semua karena sarana prasarana yang belum lengkap.	Input :- Output : belum optimal nya penyelenggaran penduduk untuk terminal pulau di terminal punjung kurang ada jiwa. dari 2018 sampai 2024. Itu karena sarana prasarana yang belum lengkap.
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Tujuan : Tersedianya Penyebarluasan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	• Berdasarkan UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang hanya membagi kewenangan pengelolaan terminal menjadi tipe A,B dan C.	• Tempat ibu menyusui tidak ada.	• Partisipasi L/P gender tugas pekerjaan lapangan kebanyakan laki - laki. Operator angkutan umum didomisili laki-laki.	Out Come : Terciptanya transportasi angkutan umum yang selamat, aman lancar dan terkendali untuk semua jenis kendaraan yang beroperasi di terminal. Pengguna terminal setara gener baik laki-laki maupun perempuan.			

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
	pelayanannya, terminal penumpang diklasifikasikan kedalam tiga tipe terminal (PP KJ No.43 tahun 1993) yaitu terminal penumpang Tipe C, yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES). Manfaat : Agar pelaksanaan pekerjaan pengetola terminal angkutan umum di pulau punjung belum sesuai dengan proposional gender.	Kontrol : Pejabat yang melakukan pengawas terhadap kegiatan pengelolaan terminal angkutan umum didomisili laki-laki.						

Gunung Medan, Juni 2024



Tim Verifikasi

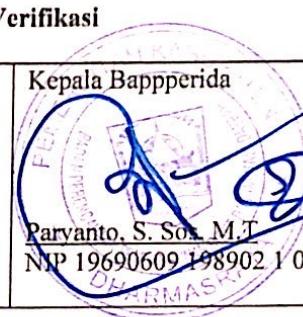
Inspektur

Drs. Andy Sumanto, CfrA
NIP 19681220 199009 1 001



Kepala Bappperida

Paryanto, S. Sos. M.T
NIP 19690609 198902 1 001



Kepala Dinas Sosial P3APPKB

MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M
NIP. 19790905-200801 1 018



GENDER BUDGET STATEMENT
Persentase Capaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota
(Jumlah Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten Kota Yang Terbangun)

SKPD : Dinas Perhubungan

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)													
KODE PROGRAM	2.15.02.2.03													
KEGIATAN	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C													
HASIL/ OUTPUT	Belum optimal nya penyelenggaraan terminal angkutan umum di pulau punjung dari 2018 sampai 2024. Itu semua karena sarana prasarana yang belum lengkap.													
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <p>Kabupaten Dharmasraya semenjak Tahun 2018 sampai saat ini 2024 Jumlah terminal yang dikelola hanya 1 unit terminal. Untuk lokasi hanya berada di pasar pulau punjung kecamatan pulau punjung. Jenis pelayanan yang dilakukan pada terminal mengatur sirkulasi penumpang angkutan umum. Menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan terminal. Berdasarkan UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang hanya membagi berdasarkan kewenangan pengelolaan terminal menjadi tipe A,B dan C. terminal sendiri merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan , menaikkan atau menurunkan orang/ barang serta perpindahan mode angkutan.Fungsi pelayanannya, terminal penumpang diklasifikasikan kedalam tiga tipe terminal (PP RI No.43 tahun 1993) yaitu Terminal penumpang Tipe C, yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES).</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peluang akses dalam menggunakan sarana prasarana didalam terminal tidak memadai. Sarana terminal tidak lengkap. • Tidak adanya angkutan umum (angkot) • Belum memiliki tempat duduk ruang tunggunpenumpang. • Tempat ibu menyusui tidak ada. Partisipasi gender L/P tugas pekerjaan lapangan kebanyakan laki –laki. Operator kendaraan angkutan umum didomisili laki-laki. • Pejabat yang melakukan pengawas terhadap kegiatan pengelolaan terminal angkutan umum didomisili laki-laki. 													
RENCANA AKSI	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Komponen/ Aktifitas 1</td> <td>Tujuan</td> <td>Terbentuknya terminal tipe c yang responsive gender</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Komponen/ Aktifitas 2</td> <td>Tujuan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Anggaran</td> <td>Rp -</td> <td></td> </tr> </table>	Komponen/ Aktifitas 1	Tujuan	Terbentuknya terminal tipe c yang responsive gender	Alokasi Anggaran	-	Komponen/ Aktifitas 2	Tujuan		Alokasi Anggaran		Total Anggaran	Rp -	
Komponen/ Aktifitas 1	Tujuan		Terbentuknya terminal tipe c yang responsive gender											
	Alokasi Anggaran	-												
Komponen/ Aktifitas 2	Tujuan													
	Alokasi Anggaran													
Total Anggaran	Rp -													
Capaian Program	<p>Out put: belum optimal nya penyelenggaraan terminal angkutan umum di pulau punjung dari 2018 sampai 2024. Itu semua karena sarana prasarana yang belum lengkap.</p> <p>Out come: Terciptanya transportasi angkutan umum yang selamat, aman lancar dan terkendali untuk semua jenis kendaraan yang beroperasi di terminal.</p> <p>Pengguna terminal setara generasi baik laki-laki maupun perempuan.</p>													

Gunung Medan, Juni 2024



Tim Verifikasi

Inpektor	Kepala BKD	Kepala Bappperida	Kepala Dinas Sosial PSAPPKB
Drs. Andi Sumanto, Cfa NIP 19681220 199009 001	Astri AP, M.Si NIP 19750225 199501 1 001	Paryanto, S.Sos, M.T NIP 19690609 198902 1 001	MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018

FORM KAK/ TOR

Program		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Sasaran Program		Terlaksananya terminal tipe c yang responsive gender
Kegiatan		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Sub Kegiatan		Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
Latar Belakang	Dasar Hukum	Perda No 6 Tahun 2013 UU No 23 Tahun 2014
	Gambaran Umum	Pengadaan terminal tipe c yang responsive gender
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
	Indikator Kinerja	Jumlah rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan	Adanya terminal tipe c yang responsive gender	
Cara Pelaksanaan Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi pelaksanaan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang responsive gender	
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Pasar Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya	
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan	Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan	
Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2025	
Biaya	-	

Gunung Medan, Juni 2024



Tim Verifikasi

Inspektor	Kepala BKD	Kepala Rapplerida	Kepala Dinas Sosial P3APPKB
Drs. Andy Sumanto, Cfa NIP 19681220 199009 1 001	Asril, AP, M. Si NIP 19750225 199501 1 001	Pawanto, S. Sos, M.T NIP 19690609 198902 1 001	MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Kegiatan : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Sub Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota Tujuan : Menciptakan masyarakat gemar membaca Sasaran Meningkatkan minat budaya baca masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahunnya mengacu pada Undang- undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ✓ Jumlah kunjungan Perpustakaan daerah dan Puskel Minimal berdasarkan standar nasional 24.000 orang Realisasi tahun 2023 berjumlah 154.042 atau 33,28% ✓ Koleksi buku yang tidak sesuai dengan kebutuhan pemustaka ✓ Masih banyaknya Perpustakaan yg belum terkunjungi oleh Perpustakaan Keliling ✓ Petugas layanan masih kurang 1 orang (Sopir) ✓ Nilai Tingkat Gegemaran Membaca masih rendah di Kab.Dharmasraya. 	Akses: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Akses utk melayani ke perpustakaan nagari,tbm belum terlayani secara maksimal ✓ Informasi keberadaan pusda belum diketahui oleh masyarakat ✓ Kurangnya orang berkunjung ke perpustakaan ✓ Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan Perpustakaan daerah. ✓ Koleksi buku yang tidak sesuai dengan kebutuhan pemustaka ✓ Kurang pengawasan dan evaluasi Dpk Partisipasi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kurangnya minat baca di tingkat Sekolah dan Masyarakat ✓ Masih kurangnya koordinasi dg lintas sektor dan pemuka masyarakat. ✓ Masih kurangnya sarana informasi melalui media cetak dan elektronik Control: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Koleksi buku yang tidak sesuai dengan kebutuhan pemustaka Manfaat :	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Masih kurangnya Judul/koleksi buku sesuai dengan kebutuhan pemustaka pada Perpustakaan ✓ Kurangnya Sosialisasi ke masyarakat tentang keberadaan perpustakaan daerah. ✓ Masih kurangnya minat baca di tingkat Sekolah dan Masyarakat ✓ Kurangnya sarana informasi melalui media cetak dan elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Masyarakat masih banyak yang belum merasakan mamfaat keberadaan Perpustakaan keliling. ✓ Kurangnya minat baca di tingkat Sekolah dan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menciptakan masyarakat gemar membaca ✓ Melakukan layanan perpustakaan keliling ✓ Meningkatkan Sosialisasi dan pembinaan. ✓ Menambah koleksi buku sesuai dengan kebutuhan pemustaka ✓ Meningkatkan koordinasi pd lintas sektor dan masyarakat ✓ Pengadaan sarana informasi baik cetak maupun eektronik 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah Kunjungan tahun 2020 67.742 orang ✓ Jumlah Kunjungan tahun 2021 202.273 org ✓ Jumlah Kunjungan tahun 2022 152.286 orang ✓ Jumlah Kunjungan tahun 2023 154.042 orang ✓ Jumlah koleksi buku 1.595.873 eksemplar ✓ Jumlah kendaraan perpustakaan keliling sebanyak 3 ✓ Jumlah perpustakaan Sekolah, Nagari , TBM sebanyak 334 ✓ Jumlah perpustakaan Sekolah ,nagari, TBM yg sdh dikunjungi th 2022 sebanyak 42 	<p>Output - Jumlah kunjungan/ pemustaka sekolah, nagari dan TBM tahun 2024 sebanyak 150.000 orang.</p> <p>- Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan tahun 2024,248 layanan</p> <p>Input</p> <p>Target Anggaran tahun 2024 Rp. 150.000.000,-</p> <p>Outcome Meningkatkan kegemaran membaca di masyarakat</p>	



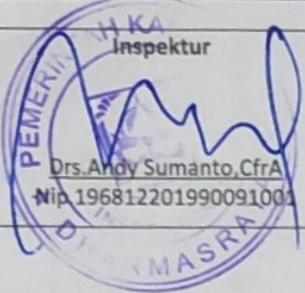
Kota Padang, 20 Juni 2024

Mukha...

(Mukhamad Syukri, S.Pd., SD., MM.)

Pemerintah IV.a

NIP 19690117 199402 1 000



HKA
Inspektur

Drs. Andy Sumanto, CfrA
Nip. 196812201990091001



Kepala BKD
Asril-SRIL AP, Msi
Nip. 197502251995011001

Tim Verifikasi



Kepala Bappeda
Paryanto, S.Sos, MT
Nip. 196906091989021001



Kepala Dinas Sosial P3A PPKB
Martin Efendi, HS, Hut., MM
Nip. 197909052008011018

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN ANGGARAN : 2024

PROGRAM	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN																	
KODE PROGRAM	2.23.02																	
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahunnya mengacu pada Undang- undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ✓ Koleksi buku yang tidak sesuai dengan kebutuhan pemustaka. ✓ Masih banyaknya Perpustakaan yg belum terkunjungi oleh Perpustakaan Keliling. <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Akses utk melayani ke perpustakaan nagari,tbm belum terlayani secara maksimal ✓ Kurangnya orang berkunjung ke perpustakaan ✓ Koleksi buku yang tidak sesuai dengan kebutuhan pemustaka <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kurangnya Promosi tentang koleksi buku yang ada di perpustakaan ✓ Masih kurangnya Judul/koleksi buku sesuai dengan kebutuhan pemustaka pada Perpustakaan ✓ Kurangnya Sosialisasi ke masyarakat tentang keberadaan perpustakaan daerah <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Masyarakat masih banyak yang belum merasakan mamfaat keberadaan Perpustakaan keliling. ✓ Kurangnya minat baca di tingkat Sekolah dan Masyarakat. 																	
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. Tolak Ukur: Perpustakaan yang dibina</p> <p>2. Indikator dan Target Kinerja : Persentase Perpustakaan yang Dibina / 6,31%</p>																	
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 129.990.050,- PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN																	
RENCANA AKSI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Kegiatan 1</td> <td>Melakukan Layanan perpustakaan keliling</td> </tr> <tr> <td>Masukan</td> <td>Rp59.995.250,-</td> </tr> <tr> <td>Keluaran</td> <td>Jumlah pemustaka sekolah, nagari</td> </tr> <tr> <td>Hasil</td> <td>Meningkatnya pengunjung perpustakaan</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Kegiatan 2</td> <td>Meningkatkan Sosialisasi dan pembinaan</td> </tr> <tr> <td>Masukan</td> <td>Rp. 39.884.800,-</td> </tr> <tr> <td>Keluaran</td> <td>Perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan dan, Perpustakaan yang terakreditasi</td> </tr> <tr> <td>Hasil</td> <td>Meningkatnya pengunjung perpustakaan</td> </tr> </table>		Kegiatan 1	Melakukan Layanan perpustakaan keliling	Masukan	Rp59.995.250,-	Keluaran	Jumlah pemustaka sekolah, nagari	Hasil	Meningkatnya pengunjung perpustakaan	Kegiatan 2	Meningkatkan Sosialisasi dan pembinaan	Masukan	Rp. 39.884.800,-	Keluaran	Perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan dan, Perpustakaan yang terakreditasi	Hasil	Meningkatnya pengunjung perpustakaan
Kegiatan 1	Melakukan Layanan perpustakaan keliling																	
Masukan	Rp59.995.250,-																	
Keluaran	Jumlah pemustaka sekolah, nagari																	
Hasil	Meningkatnya pengunjung perpustakaan																	
Kegiatan 2	Meningkatkan Sosialisasi dan pembinaan																	
Masukan	Rp. 39.884.800,-																	
Keluaran	Perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan dan, Perpustakaan yang terakreditasi																	
Hasil	Meningkatnya pengunjung perpustakaan																	



Inspektur	Kepala BKD	Tim Verifikasi	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial P3A PPKB
Drs. Andy Sumanto, C.A Nip.196812201990091001	Asril-SRIL,AP.,MSi Nip. 197502251995011001	Paryanto,S.Sos,MT Nip.196906091988021001	Martin Efendi,HS,Hut.,MM Nip. 197909052008011018	

FORM KAK / TOR

Program		Program Pembinaan Perpustakaan						
Sasaran Kegiatan		Meningkatkan minat budaya baca masyarakat melalui Layanan perpustakaan keliling/ outdoor maupun indoor.						
Kegiatan		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota						
Sub Kegiatan		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota						
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 2. Peraturan Daerah Nonor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan perpustakaan 						
	Gambaran Umum	Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan adalah mendorong bagaimana peserta didik dan Masyarakat di Nagari tersebut untuk gemar membaca atau membiasakan untuk membaca sehingga membaca akan menjadi budaya bagi siswa dan masyarakat. Kegiatan tersebut di layani dalam bentuk pelaksanaan perpustakaan keliling untuk melayani kebutuhan siswa di sekolah dan Masyarakat di Nagari-Nagari dalam bentuk Buku bacaan .						
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Melakukan Layanan Perpustakaan keliling ke SMA/sederat, SMP/sederat, TBM dan Nagari di Kab.Dharmasraya						
	Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pemustaka sekolah, nagari dan TBM./ 154.042 orang 2. Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi/ 248 layanan 						
	Batasan kegiatan	-						
Maksud dan Tujuan		Menciptakan masyarakat gemar membaca dan Menumbuhkembangkan kegemaran membaca melalui berbagai bacaan dan media						
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Kegiatan dilaksanakan bulan Januari s/d November 2024 dengan cara melakukan layanan perpustakaan keliling ke sekolah, TBM Nagari di Kab.Dharmasraya dengan target 248 layanan.						
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kab. Dharmasraya						
Pelaksana dan Penanggung Jawab kegiatan		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Pelaksana</td> <td>: Kabid Perpustakaan</td> </tr> <tr> <td>Penanggung</td> <td>: Kepala Dinas Perpustakaan Dan</td> </tr> <tr> <td>Jawab</td> <td>Kearsipan</td> </tr> </table>	Pelaksana	: Kabid Perpustakaan	Penanggung	: Kepala Dinas Perpustakaan Dan	Jawab	Kearsipan
Pelaksana	: Kabid Perpustakaan							
Penanggung	: Kepala Dinas Perpustakaan Dan							
Jawab	Kearsipan							
Jadwal		Bulan Januari s/d November 2024						
Biaya		Rp. 59.995.250						



MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

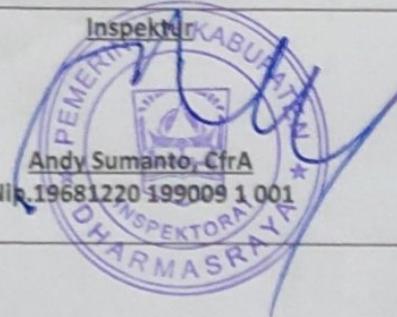
OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

PROGRAM : Program Pengelolaan Arsip

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base- Line)	Indikator Gender
Program : Pengelolaan Arsip	✓ Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip	Akses: ✓ Perangkat Daerah dan Perangkat Nagari masih adanya yang belum melaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan NSPK	Keterbatasan Sarana Prasarana kearsipan	✓ Kurangnya pemahaman SDM pengelola kearsipan perangkat daerah tentang pentingnya arsip.	Meningkatkan SDM Pengelola/ petugas Kearsipan	✓ Melaksanakan bimtek kearsipan bagi pengelola arsip perangkat daerah	✓ Persentase Perangkat Daerah yang mengelola 2020 = 39,47%	-Output ✓ Jumlah SDM, pengelola arsip Perangkat daera yang memperoleh bimtek kearsipan/38 orang.
Kegiatan : Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	✓ Masih adanya Perangkat Daerah dan Perangkat nagari yang belum mengelola Arsip secara baku	Partisipasi: ✓ Tidak tersedianya jabatan fungsional arsiparis di setiap OPD. ✓ Petugas pengelola arsip yang tidak berlatar pendidikan kearsipan		✓ Keterbatasan Sarana Prasoarana kearsipan	✓ Melakukan pembinaan pada petugas kearsipan di Perangkat Daerah	✓ Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku 2021 = 47,37		
Sub kegiatan: Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		Control: ✓ Data pengelola arsip Perangkat Daerah yang tercantum dalam SK Bupati. ✓ Data anjab ABK OPD		✓ Masih ada perangkat daerah yang belum mengelola arsip sesuai dengan NSPK	✓ Melakukan pengawasan		✓ Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara baku tahun 2022 = 57,89%	
Tujuan : Mewujudkan Tata Kearsipan yang Baik pada Kelembagaan Pemerintah Daerah		Manfaat :					✓ Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara baku tahun 2023 = 68,42%	
Sasaran: Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu								



Tim Verifikasi



Andy Sumanto, Cfa
Nip. 19681220 199009 1 001



Asril SRIH AP.,MSI
Nip. 19750225 199501 1 001



Paryanto, S.Pd.,MT
Nip. 19690609 198902 1 001



Martin Efendi, HS, Hut.,MM
Nip. 19790905 200801 1 018

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN ANGGARAN : 2024

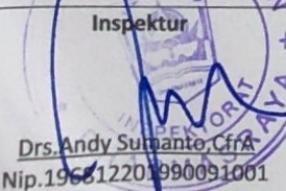
PROGRAM	Program Pengelolaan Arsip		
KODE PROGRAM	2.24.03		
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) ✓ Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip ✓ Masih adanya Perangkat Daerah dan Perangkat nagari yang belum mengelola Arsip secara baku		
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan ✓ Perangkat Daerah dan Perangkat Nagari masih adanya yang belum melaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan NSPK ✓ Tidak tersedianya jabatan fungsional arsiparis di setiap OPD. ✓ Data pengelola arsip Perangkat Daerah yang tercantum dalam SK Bupati. b. Penyebab Internal ✓ Keterbatasan Sarana Prasarana kearsipan c. Penyebab Eksternal ✓ Kurangnya pemahaman SDM pengelola kearsipan perangkat daerah tentang pentingnya arsip. ✓ Keterbatasan Sarana Prasoarana kearsipan ✓ Masih ada perangkat daerah yang belum mengelola arsip sesuai dengan NSPK		
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur : Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban. 2. Indikator dan Target Kinerja : Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Bimtek Kearsipan dan target kinerja 38 orang		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 147.246.000 Pengelolaan Arsip		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Melaksanakan Bimtek Pengelolaan Kearsipan	
		Masukan Rp. 88.277.000	
		Keluaran Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Bimtek Kearsipan	
	Kegiatan 2	Hasil Meningkatnya SDM pengelola kearsipan	
		Melakukan pengawasan	
		Masukan Rp. 43.029.000	
	Kegiatan 3	Keluaran Terkelolanya arsip OPD	
		Hasil Arsip tertata sesuai dengan aturan yang berlaku	
		Melaksanakan Bimtek Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)	
		Masukan Rp. 15.940.000	
		Keluaran Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Bimtek JIKN	
		Hasil Meningkatnya SDM dalam peningkatan Digitalisasi Arsip	

Kota Padang, 20 Juni 2024



(Mukhammad Syukri, S.Pd, SD, MM
Pembina XIV.a
NIP. 19690910 199403 1 008

Tim Verifikasi



Drs. Andy Sumanto, C.F.A.
Nip. 196812201990091001



Asni SRIL, AP., MSi
Nip. 197502251995011001



Paryanto, S.Sos, MT
Nip. 196906091989021001



Martin Efendi, HS, Hut., MM
Nip. 197909052008011018

FORM KAK / TOR

Program		Program Pengelolaan Arsip
Sasaran Kegiatan		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia kearsipan melalui Bimbingan Teknis Kearsipan
Kegiatan		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
Latar Belakang	Dasar Hukum	1.Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan 2.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
	Gambaran Umum	Kegiatan Bimbingan Teknis Kearsipan ini adalah membina SDM penyelenggara kearsipan perangkat daerah agar pengelolaan kearsipan dapat terlaksana dengan baik
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Masing masing Perangkat Daerah mengutus 1 (satu) orang peserta untuk mengikuti Bimbingan Teknis Kearsipan
	Indikator Kinerja	Jumlah SDM perangkat daerah yang menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan NSPK melalui Bimtek Kearsipan.
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Mewujudnya sistem penyelenggaraan kearsipan daerah sesuai dengan NSPK
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Kegiatan Bimtek dilaksanakan selama 2 (dua) hari yang akan diikuti oleh utusan Perangkat Daerah sebanyak 1 (satu) orang yaitu Pengelola Arsip
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung Jawab kegiatan		Pelaksana : Kabid Penyelenggaraan Kearsipan/PPTK Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Jadwal		Bulan Juli 2024
Biaya		Rp. 88.277.000



MATRIX GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD

OPD : Dinas Pertanian

PROGRAM : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Tujuan : Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	Data tahun 2024 - Jumlah kelompok tani di Kabupaten Dharmasraya yaitu 1.516 unit - Jumlah kelompok wanita tani yaitu 289 unit - Komoditi yang dikelola kelompok tani yaitu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan - Komoditi yang dikelola kelompok wanita tani yaitu tanaman pekarangan rumah	Akses : Kaum perempuan kurang mendapat akses yang sama dari kaum laki-laki dalam sector pertanian Partisipasi : Sebagian besar penduduk yang bekerja di bidang pertanian berjenis kelamin laki-laki Kontrol : Kontrol terhadap pelaksanaan pertanian masih didominasi kaum laki-laki Manfaat : Kaum perempuan kurang mendapat manfaat dari pengembangan pertanian	- Kurang tersedianya kegiatan pertanian yang kondusif untuk kaum perempuan - Terbatasnya bantuan sarana dan prasarana	- Stigma masyarakat bahwa pelaku usaha bidang pertanian dominan laki-laki - Stigma masyarakat tenaga kaum laki-laki lebih kuat dari kaum perempuan - Perempuan kurang diberdayakan dalam kegiatan pertanian	Pengembangan dan pemberdayaan kelompok wanita tani (KWT) untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta peran KWT dalam meningkatkan ekonomi keluarga	Penyediaan bibit atau benih tanaman untuk penunjang pemberdayaan kelompok wanita tani serta melakukan pembinaan untuk pengembangan kelompok tani dan kelompok wanita tani	- Jumlah kelompok wanita tani yaitu 289 unit - Bantuan dari APBN berupa P2L(Pekarang an Pangan Lestari) yang diterima oleh 3 kelompok wanita tani pada tahun 2023 - Bantuan bibit, benih, polybag dan pupuk kandang kepada beberapa kelompok wanita tani pada tahun 2023	Input : Anggaran Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman sebesar Rp. 125.000.000,- Output : Pengadaan benih dan bibit tanaman hortikultura serta sarana pendukungnya serta pembinaan untuk pengembangan KWT di Kab. Dharmasraya Out Come : Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman hortikultura serta pemberdayaan kelompok wanita tani dalam sector pertanian

Pulau Punjung, 20 Juni 2024



Tim Verifikasi

<p>Inspektur Drs. Andy Sumanto, CfrA NIP 19681220 199009 1 001</p>	<p>Kepala BKD Asrin AP, M.Si NIP 19750225 199501 1 001</p>	<p>Kepala Bapperida Paryanto, S.Sos, M.T NIP 19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial P3APPKB MARTIN EFENDI, S.Hut, M.M NIP 19790905 200801 1 018</p>
--	--	--	--

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD

SKPD : Dinas Pertanian

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
KODE PROGRAM	3.27.02
KEGIATAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
HASIL/ OUTPUT	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <p>Data tahun 2024</p> <ul style="list-style-type: none">- Jumlah kelompok tani di Kabupaten Dharmasraya yaitu 1.516 unit- Jumlah kelompok wanita tani yaitu 289 unit- Komoditi yang dikelola kelompok tani yaitu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan- Komoditi yang dikelola kelompok wanita tani yaitu tanaman pekarangan rumah <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none">- Akses Kaum perempuan kurang mendapat akses yang sama dari kaum laki-laki dalam sector pertanian- Partisipasi Sebagian besar penduduk yang bekerja di bidang pertanian berjenis kelamin laki-laki- Kontrol Kontrol terhadap pelaksanaan pertanian masih didominasi kaum laki-laki- Manfaat Kaum perempuan kurang mendapat manfaat dari pengembangan pertanian <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none">- Kurang tersedianya kegiatan pertanian yang kondusif untuk kaum perempuan- Terbatasnya bantuan sarana dan prasarana <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none">- Stigma masyarakat bahwa pelaku usaha bidang pertanian dominan laki-laki- Stigma masyarakat tenaga kaum laki-laki lebih kuat dari kaum perempuan- Perempuan kurang diberdayakan dalam kegiatan pertanian

RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Penyediaan bibit atau benih tanaman untuk penunjang pemberdayaan kelompok wanita tani serta melakukan pembinaan untuk pengembangan kelompok tani dan kelompok wanita tani
	Tujuan	Pengembangan dan pemberdayaan kelompok wanita tani (KWT) untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta peran KWT dalam meningkatkan ekonomi keluarga
	Alokasi	Rp. 125.000.000,-
	Anggaran	
	Total Anggaran	Rp. 125.000.000,-
Capaian Program	Out put	Penyediaan benih dan bibit tanaman hortikultura serta sarana pendukungnya serta pembinaan untuk pengembangan KWT di Kab. Dharmasraya
	Out come	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman hortikultura serta pemberdayaan kelompok wanita tani dalam sector pertanian



Tim Verifikasi



FORM KAK/ TOR

Program		Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Sasaran Program		Petani
Kegiatan		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan No. 83/KPTS/RC.110/J/10/2020 tentang Petunjuk Teknis Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2021 Undang-undang No. 4 Tahun 2006 tentang Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian
	Gambaran Umum	Di Kabupaten Dharmasraya terdapat 1.516 unit kelompok tani dan diantaranya sebanyak 289 unit merupakan kelompok wanita tani. Pengembangan dan peningkatan kapasitas kelompok wanita tani dapat dilakukan dengan penyediaan benih/bibit tanaman yang sesuai untuk KWT dan pemanfaat pekarangan seperti benih/bibit komoditas tanaman hortikultura.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Penyediaan bibit atau benih tanaman serta sarana prasarana untuk penunjang pemberdayaan kelompok wanita tani serta melakukan pembinaan untuk pengembangan kelompok tani dan kelompok wanita tani
	Indikator Kinerja	Jumlah bibit/benih tanaman hortikultura yang diserahkan dan terlaksananya pembinaan terhadap kelompok wanita tani
	Batasan Kegiatan	Penyerahan bantuan benih/bibit, Bimbingan Teknis.
Maksud dan Tujuan		Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Melalui penyerahan bantuan bibit/benih tanaman hortikultura serta bimbingan teknis terhadap kelompok wanita tani
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Bidang Hortikultura Dinas Pertanian
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 125.000.000,-



FORM KAK/ TOR

Program		Penyuluhan Pertanian
Sasaran Program		Petani dan Penyuluh Pertanian
Kegiatan		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
Sub Kegiatan		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Peraturan Menteri Pertanian No. 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Sekolah Lapangan Pertanian Peraturan Menteri Pertanian No. 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani
	Gambaran Umum	Di Kabupaten Dharmasraya terdapat 1.516 unit kelompok tani dan diantaranya sebanyak 289 unit merupakan kelompok wanita tani
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pembinaan, pelatihan dan pelaksanaan sekolah lapang bagi kelompok tani dan kelompok wanita tani
	Indikator Kinerja	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi
	Batasan Kegiatan	Pada kegiatan sekolah lapang dilakukan pembinaan, pelatihan terkait pertanian yang pelaksanaannya responsive gender
Maksud dan Tujuan		Peningkatan kapasitas SDM Pertanian laki-laki maupun perempuan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Pelaksanaan sekolah lapang bagi kelompok tani dan kelompok wanita tani
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Bidang Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 150.000.000,-

Pulau Punjung, 20 Juni 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN

KABUPATEN DHARMASRAYA



RENCANA AKSI	Komponen/Aktifitas 1	Pelaksanaan pelatihan pembinaan kelompok tani dan kelompok wanita tani dalam bentuk sekolah lapang yang responsive gender
	Tujuan	Peningkatan kapasitas SDM Pertanian baik laki-laki maupun perempuan
	Alokasi Anggaran	Rp 150.000.000,-
	Total Anggaran	Rp 150.000.000,-
Capaian Program	Out put Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi Out come Peningkatan kapasitas SDM pertanian baik laki-laki maupun perempuan	

Pulau Punjung, 20 Juni 2024



Tim Verifikasi

--	--	--	--

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD

SKPD : Dinas Pertanian

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Penyuluhan Pertanian
KODE PROGRAM	3.27.07
KEGIATAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
HASIL/OUTPUT	Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Data tahun 2024</p> <ul style="list-style-type: none">- Jumlah kelompok tani di Kabupaten Dharmasraya yaitu 1.516 unit- Jumlah kelompok wanita tani yaitu 289 unit- Pembinaan kelompok tani berupa sekolah lapang dilaksanakan pada 2 kelompok tani dengan komoditi tanaman pangan (padi) <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none">- Akses Kaum perempuan kurang mendapat akses yang sama dari kaum laki-laki dalam sektor pertanian- Partisipasi Sebagian besar pelaku usaha di sektor pertanian berjenis kelamin laki-laki- Kontrol Kontrol terhadap pertanian masih didominasi kaum laki-laki- Manfaat Kaum perempuan kurang mendapat manfaat dari pengembangan pertanian <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none">- Kurangnya media pembelajaran dalam rangka meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan dalam sektor pertanian- Peserta kegiatan sekolah lapang yang dilaksanakan masih di dominasi oleh kaum laki-laki <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none">- Stigma masyarakat bahwa kelompok tani dominan laki-laki- Tenaga kaum laki-laki lebih kuat dari perempuan dalam persepsi masyarakat

Pulau Punjung, 20 Juni 2024



Tim Verifikasi

 Drs. Andy Sumanto, CFA NIP 19681220 199009 1 001	 Asri, AP, M. Si NIP 19750225 199501 1 001	 Paryanto, S.Sos, M.T NIP 19690609 198902 1 001	 MARTIN EFENDI, S. Hut, M. M NIP 19790905 200801 1 018
---	--	---	--

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

PROGRAM : Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
Program : Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Tujuan : Meningkatnya peran pemuda dan olahraga dalam mewujudkan masyarakat sehat dan berprestasi	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan - Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional. - Olahraga kerap dipandang sebagai dunianya kaum laki-laki. - pemahaman masyarakat tentang kaum perempuan dan olahraga cukup beralasan, terutama jika dikaitkan dengan tolehan sejarah masa lampau kebudayaan Indonesia secara umum. Makna tersebut berimplikasi pada persepsi masyarakat tentang kaum perempuan, terutama ketika dikaitkan dengan upaya menggali potensi untuk meraih prestasi dalam olahraga yang membutuhkan keperkasaan, kekuatan, dan kemandirian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Akses : Hanya beberapa Cabang olahraga yang diminati kaum/atlet Perempuan - Partisipasi : Kurangnya Minat Masyarakat Khususnya atlet Perempuan dalam mengikuti kejuaraan olahraga - Kontrol : Belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas terkait keikutsertaan atlet perempuan dalam kejuaraan - Manfaat : 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kegiatan Olahraga belum responsive gender - Kurangnya Cabang Olahraga yang bisa di ikuti perempuan - Dukungan peralatan dan perlengkapan Olahraga yang belum merata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya Tingkat Kesadaran masyarakat khususnya perempuan dalam mewujudkan masyarakat sehat dan berprestasi - Kurangnya Dukungan Masyarakat dan Dunia Usaha Terhadap Pengembangan Olahraga dan Hanya Bergantung Pada Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran pemuda dan olahraga dalam mewujudkan masyarakat sehat dan berprestasi dengan menambah jumlah cabang olahraga yang dibina (yang responsive gender) - Jumlah Atlet berprestasi Kabupaten Kota yang responsive gender - Pemberian Penghargaan kepada Atlet olahraga yang berprestasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan dan Seleksi Atlit Daerah yang responsive gender - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten Kota yang responsive gender - Atlet yang mengikuti kejurnas tahun 2022. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah cabang olahraga yang Aktif Bisa tercapai : 25 cabor - Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi : 15 cabor - Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional : 4 Cabor - Jumlah pelatih bersertifikat : 20 Orang. - Atlet yang mengikuti kejurnas tahun 2022. 	Input : Target anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Rp. 250.000.000,- Output : Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Outcome : Meningkatnya Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah ,Provinsi ,Nasional (yang responsive gender)

Atlet yang mengikuti Kejuaraan Nasional tahun 2022.
Laki-laki = 60 orang
Perempuan = 10 orang

Atlet yang mengikuti Kejuaraan Nasional tahun 2023.
Laki-laki = 24 orang
Perempuan = 5 orang

- Atlet yang mengikuti Kejuaraan Nasional tahun 2023.
Laki-laki = 24 orang
Perempuan = 5 orang

Pulau Punjung, Juni 2024
Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga



H. ST. M TAUFIK, SE. MM
NIP. 19640815 198911 1 001

TIM VERIFIKASI



PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN : 2024
ANGGARAN

PROGRAM	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan												
KODE PROGRAM	2.19.03												
KEGIATAN	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.												
SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota												
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan - Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional. - Olahraga kerap dipandang sebagai dunianya kaum laki-laki - Pemahaman masyarakat tentang kaum perempuan dan olahraga cukup beralasan, terutama jika dikaitkan dengan tolahan sejarah masa lampau kebudayaan Indonesia secara umum. <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Faktor Kesenjangan: <ul style="list-style-type: none"> - Hanya beberapa Cabang olahraga yang diminati atlet Perempuan sehingga sedikit peluang gender untuk bersaing. - Kurangnya Minat Masyarakat Khususnya atlet Perempuan dalam mengikuti kejuaraan olahraga. b. Penyebab internal . <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kegiatan Olahraga belum responsive gender - Kurangnya Cabang Olahraga yang bisa di ikuti perempuan. c. Penyebab Eksternal . <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya Tingkat Kesadaran masyarakat khususnya perempuan dalam Berolahraga. - Kurangnya Dukungan Masyarakat dan Dunia Usaha Terhadap Pengembangan Olahraga dan Hanya Bergantung Pada Pemerintah. 												
CAPAIAN PROGRAM	<p>Tolok Ukur: Cabang olahraga yang berprestasi di tingkat Kab, Provinsi dan Nasional.</p> <p>Indikator dan Target Kinerja</p> <p>Output : Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota target 5 kegiatan Jumlah Atlet dan Cabang olahraga yang berprestasi ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional senyak 10 orang.</p> <p>Outcome : Meningkatnya Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah ,Provinsi ,Nasional 80%</p>												
RENCANA AKSI	<p>Kegiatan 1 Pemilihan dan Seleksi Atlit Daerah yang responsive gender</p> <table border="1"> <tr> <td>Masukan</td> <td>Rp 90.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Keluaran</td> <td>Terpilihnya atlet olahraga yang responsive gender</td> </tr> <tr> <td>Hasil</td> <td>Tercapainya atlet olahraga yang berprestasi</td> </tr> </table> <p>Kegiatan 2 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten yang responsive gender</p> <table border="1"> <tr> <td>Masukan</td> <td>Rp 90.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Keluaran</td> <td>Jumlah atlet olahraga yang dilakukan pembinaan</td> </tr> <tr> <td>Hasil</td> <td>Tercapainya atlet olahraga yang berprestasi yang responsive gender</td> </tr> </table>	Masukan	Rp 90.000.000,-	Keluaran	Terpilihnya atlet olahraga yang responsive gender	Hasil	Tercapainya atlet olahraga yang berprestasi	Masukan	Rp 90.000.000,-	Keluaran	Jumlah atlet olahraga yang dilakukan pembinaan	Hasil	Tercapainya atlet olahraga yang berprestasi yang responsive gender
	Masukan	Rp 90.000.000,-											
	Keluaran	Terpilihnya atlet olahraga yang responsive gender											
	Hasil	Tercapainya atlet olahraga yang berprestasi											
Masukan	Rp 90.000.000,-												
Keluaran	Jumlah atlet olahraga yang dilakukan pembinaan												
Hasil	Tercapainya atlet olahraga yang berprestasi yang responsive gender												

Pulau Punjung, Juni 2024
Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga

H. ST. M. AUFIK, SE, MM
NIP. 19640815 198911 1 001

TIM VERIFIKASI



KAK/TOR

Program		Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
Sasaran Program		Meningkatkan pemasyarakatan olahraga dan prestasi olahraga
Kegiatan		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang system Keolahragaan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan ;
	Gambaran Umum	<p>Dalam Kegiatan bidang Olahraga yang menumbuhkan budaya olagraga dan prestasi ,pembudayaan olahraga di masyarakat selain berdampak langsung terhadap kesehatan juga dapat menimbulkan bibit-bibit atlet berprestasi yang akan mengharumkan nama kabupaten Dharmasraya di Tingkat daerah maupun Tingkat Nasional dengan Prestasi Olahraganya.</p> <p>Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan juga didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Budparpora, diharapkan bisa menjadi pendorong pembudayaan olahraga dikalangan masrayakat umum agar tercapainya peningkatan pada pembudayaan olahraga serta prestasi olahraga di Kabupaten Dharmasraya.</p>
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Melaksankan kegiatan Pemilihan dan Seleksi Atlit Daerah yang responsive gender dan Melakukan pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi
	Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Cabang olahraga yang berprestasi 2. Jumlah Pemuda dan kepemudaan yang berprestasi
	Batasan Kegiatan	Januari s/d Desember 2024
Maksud dan Tujuan		✓ Mengkatkan peran pemuda dan olahraga dalam mewujudkan masyarakat sehat dan berprestasi.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kegiatan Pemilihan dan Seleksi Atlit Daerah yang responsive gender. - Melakukan pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten yang responsive gende. - Pemberian Penghargaan Olahraga kepada atlet yang berprestasi. -
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Dinas Kebudayaan, Pariwisata ,Pemuda dan Olahraga
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 250.0000.000,-

Pulau Punjung, Juni 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN,
KABUPATEN DHARMASRAYA**



H. ST. M TAUFIK, SE, MM
NIP. 19640815 198911 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

PROGRAM : Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER		KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN			PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2018- 2025;	- Akses : - Informasi Keberadaan tempat usaha pelaku ekonomi kreatif belum banyak diketahui orang.	- Pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif belum responsive gender	- Masyarakat masih banyak yang belum merasakan mamfaat dari pelaku ekonomi kreatif .	- Meningkatkan Pendapatan pelaku ekonomi kreatif /masyarakat.	- Melaksanakan kegiatan/pelatihan pada pelaku ekonomi kreatif yang responsive gender	- Jumlah Pelaku ekonomi keatif tahun 2022 sebanyak 20.orang. Laki laki 9 Org	Input : Target anggaran untuk pelaksanaan - kegiatan tenunan songket Rp. 38.780.000,-
Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	- Masih rendahnya SDM pelaku ekonomi kreatif.	- Sarana dan prasarana pelaku ekonomi kreatif belum memadai.	- Dukungan Sarana prasarana pelaku ekonomi kreatif belum memadai.	- Kurangnya Dukungan Masyarakat dalam Dunia Usaha ekonomi keatif	- Dengan menenun dapat menambah keuangan keluarga	- Pengadaan sarana dan prasarana pelaku ekonomi kreatif	- Perempuan 11 Org	- Ekonomi kreatif Rp. 226.828.000
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	- Menambah Usaha Keluarga.	- Partisipasi : - Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pelaku ekonomi kreatif .	- Lebih banyak peserta perempuan dibandingkan laki-laki dikarenakan perempuan lebih teliti dan sabar dalam menenun.	- Adanya anggapan masyarakat bahwa laki-laki tabah dalam menenun, karena pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh perempuan	- Bertambah wawasan dalam menentukan motif tenun sehingga motif tenun yang bagus dapat diterima masyarakat.	- Melatih kesabaran dan ketelitian dalam menenun bagi peserta tenun.	- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat pelaku ekonomi kreatif tentang mamfaat kegiatan ekonomi kreatif	- Jumlah Pelaku ekonomi keatif tahun 2023 sebanyak 36 .orang Laki laki 14 Org
Tujuan : Meningkatkan pendapatan masyarakat di bidang pariwisata	- Jumlah Pelaku ekonomi keatif tahun 2024 sebanyak 50.orang - Laki laki 27 Org - Perempuan 23 org	- Kontrol : Kurangnya pengawasan dan evaluasi dari Dinas Budparpora	- Manfaat : -	- Meningkatkan koordinasi pada lintas sector dan masyarakat	- Meningkatkan kesabaran dan ketelitian dalam menenun bagi peserta tenun.	- Mengikutsertakan laki-laki dalam pelatihan songket	- Perempuan 22org	- Output : Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
					- Dapat mengundang wisatawan	- Monitoring Evaluasi terhadap pelaku ekonomi kreatif.	- Jumlah Pelaku ekonomi keatif tahun 2024 sebanyak 50.orang Laki laki 27 Org	Outcome : Peningkatan Jumlah devisa sektor pariwisata.
							- Perempuan 23 org	

Pulau Punjung, Juni 2024
Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga



H. ST. M TAUFIK, SE. MM
NIP. 19640815 198911 1 001

TIM VERIFIKASI

<p>INSPEKTUR</p>	<p>KEPALA BKD</p>	<p>KEPALA BAPPEDA</p>	<p>KEPALA DINOSOSP3APPKB</p>
<p>Drs. ANDY SUMANTO, CFA NIP. 19681220 199009 1 001</p>	<p>ASRIL, AP. M.Si NIP. 19750226 199501 1 001</p>	<p>PARYANTO, S.Sos., MT NIP19690609 198902 1 001</p>	<p>MARTIN EFENDI, S.Hut. MM NIP. 19790905 200801 1 018</p>

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD

: DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

**TAHUN
ANGGARAN**

: 2025

PROGRAM

Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

KODE ROGRAM

2.26.05

KEGIATAN

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat

SUB KEG.

Dasar.

Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

ANALISIS

SITUASI

1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).

- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2018-2025;
- Masih rendahnya SDM pelaku ekonomi kreatif.
- Jumlah Pelaku ekonomi keatif tahun 2024 sebanyak 50.orang
Laki laki 27 Org
Perempuan 23 org

2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender

a. Faktor Kesenjangan

- Informasi Keberadaan tempat usaha pelaku ekonomi kreatif belum banyak diketahui orang masyarakat.
- Sarana dan prasarana pelaku ekonomi kreatif belum memadai.
- Masih banyak asyarakat yang belum mengetahui tentang pelaku ekonomi kreatif
- Kurangnya pengawasan dan evaluasi dari Dinas Budparpora.
-

b. Penyebab Internal.

- Pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif belum responsive gender
- Dukungan Sarana prasarana pelaku ekonomi kreatif belum memadai.

c. Penyebab Eksternal.

- Masyarakat masih banyak yang belum merasakan mamfaat dari pelaku ekonomi kreatif .
- Kurangnya Dukungan Masyarakat dalam Dunia Usaha ekonomi keatif.
- Adanya anggapan masyarakat bahwa laki-laki tabah dalam menenun, kareana pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh perempuan

CAPAIAN

PROGRAM

Tolok Ukur :

Indikator dan Target Kinerja

Output :

Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Ekonomi Kreatif.

Outcome :

Peningkatan Jumlah devisa sektor pariwisata. Target 100%

RENCANA AKSI

Kegiatan 1

Melaksanakan Pelatihan pada pelaku ekonomi kreatif

Masukan	Rp 150.000.000
---------	----------------

Keluaran	Jumlah pelaku ekonomi kreatif sebanyak 50 orang
----------	---

Hasil	Meningkatnya SDM pelaku ekonomi kreatif
-------	---

	Kegiatan 2	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaku ekonomi kreatif
	Masukan	Rp 150.000.000,-
	Keluaran	Laporan monitoring dan evaluasi Kegiatan para pelaku ekonomi kreatif
	Hasil	Meningkatnya Pendapatan para pelaku ekonomi kreatif

Pulau Punjung, Juni 2024
 Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
 Pemuda dan Olahraga



H. SY. MATAUFIK, SE, MM
 NIP. 19640815 198911 1 001

TIM VERIFIKASI



KAK/ TOR

Program		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Sasaran Program		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Kegiatan		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Sub Kegiatan		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2018-2025;
	Gambaran Umum	Melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Kegiatan	Uraian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pelatihan pada pelaku ekonomi kreatif yang responsive gender. - Pengadaan sarana dan prasarana serta kebutuhan dari pelaku ekonomi kreatif - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat pelaku ekonomi kreatif tentang arti mamfaat dari kegiatan ekonomi kreatif - Meningkatkan koordinasi pada lintas sector dan masyarakat - Melaksanakan monitoring evaluasi terhadap pelaku ekonomi
	Indikator Kinerja	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
	Batasan Kegiatan	Januari s/d Desember 2025
Maksud dan Tujuan		Membentuk pengembangan dari konsep ekonomi dengan penambahan kreativitas serta mengasah dasar yang ada pada masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat di dalam Bidang Pariwisata.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan monitoring evaluasi terhadap pelaku ekonomi kreatif yang akan dibina - Mempersiapkan bahan serta kebutuhan yang diperlukan dalam melaksanakan suatu kegiatan. -
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kabupaten Dharmasraya

Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata ,Pemuda dan Olahraga
Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2024
Biaya	Rp. 300.000.000,-

Pulau Punjung, Juni 2024

**KEPALA DNAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

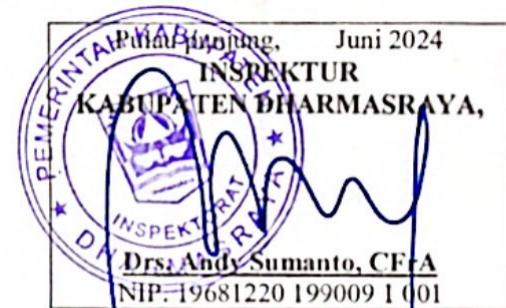


GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
Mengatasi Kesenjangan Gender Yang Terjadi

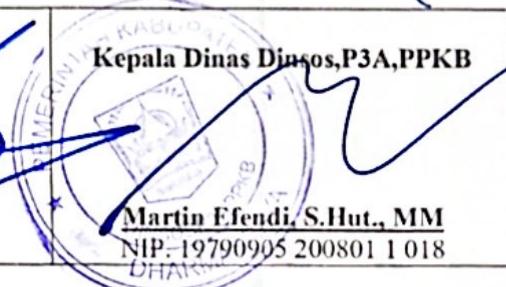
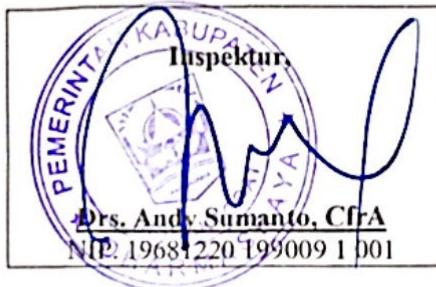
OPD : Inspektorat Kabupaten
PROGRAM : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
TAHUN : 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program : Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 27 orang yang terdiri dari 12 laki-laki dan 15 perempuan	- Akses : diklat yang dilaksanakan pada umumnya membutuhkan waktu lebih dari 2 hari dengan lokasi pelaksanaan diklat yang jauh dari Daerah Kabupaten Dharmasraya sehingga menyulitkan bagi APIP terutama yang perempuan karena harus meninggalkan keluarga terutama yang hamil atau ibu menyusui	- Peran ganda APIP perempuan yang bekerja di kantor dan bekerja sebagai ibu rumah tangga	- Lokasi penyelenggaraan diklat yang jauh dari Kabupaten Dharmasraya dan jangka waktu pelaksanaan diklat yang relative lama	- Pelaksanaan diklat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan keikutsertaan laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan lamanya diklat serta lokasi pelaksanaan diklat	- Memetakan diklat yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sehingga diklat yang akan diikuti telah memperhatikan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pengetahuan serta memperhatikan lama pelaksanaan diklat	- Jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 27 orang yang terdiri dari 12 laki-laki dan 15 perempuan	Output : Diikutinya diklat yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sesuai kebutuhan organisasi.
Tujuan : Agar Diklat Dapat diikuti Oleh APIP sesuai kebutuhan organisasi sekaligus mempertimbangkan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan	- Jumlah APIP dengan latar belakang pendidikan teknik sipil sebanyak 2 Orang dan non teknik sipil sebanyak 25 orang	- Adanya perbedaan dalam latar belakang pendidikan dan kemampuan				- Jumlah APIP dengan latar belakang pendidikan teknik sipil sebanyak 2 Orang dan non teknik sipil sebanyak 25 orang		Outcome : Semua APIP mampu melaksanakan pengawasan sesui program/kegiatan yang ada.

	profesional adalah APIP dengan latar belakang pendidikan teknik sipil, dimana yang berlatarbelakang pendidikan teknik sipil sangat kecil, sedangkan semua APIP dituntut dapat bekerja pada semua bidang/program/kegiatan				
--	--	--	--	--	--



TIM VERIFIKASI



PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)		
SKPD	: Inspektorat Kabupaten	
TAHUN ANGGARAN	: 2024	
PROGRAM	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
KODE PROGRAM	6.01.01	
KEGIATAN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
HASIL/OUTPUT	Pelaksanaan diklat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan keikutsertaan laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan lamanya diklat serta lokasi pelaksanaan diklat	
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 27 orang yang terdiri dari 12 laki-laki dan 15 perempuan. - Jumlah APIP dengan latar belakang pendidikan teknik sipil sebanyak 2 Orang dan non teknik sipil sebanyak 25 orang. <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses : diklat yang dilaksanakan pada umumnya membutuhkan waktu lebih dari 2 hari dengan lokasi pelaksanaan diklat yang jauh dari Daerah Kabupaten Dharmasraya sehingga menyulitkan bagi APIP terutama yang perempuan karena harus meninggalkan keluarga terutama yang hamil atau ibu menyusui - Tidak semua APIP dapat melakukan pekerjaan pemeriksaan terutama untuk kegiatan fisik konstruksi di lapangan sehingga yang bisa melakukan secara profesional adalah APIP dengan latar belakang pendidikan teknik sipil, dimana yang berlatarbelakang pendidikan teknik sipil sangat kecil, sedangkan semua APIP dituntut dapat bekerja pada semua bidang/program/kegiatan <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peran ganda APIP perempuan yang bekerja di kantor dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. - Adanya perbedaan dalam latar belakang pendidikan dan kemampuan. <p>c. Penyebab Eksternal</p> <p>Lokasi penyelenggaraan diklat yang jauh dari Kabupaten Dharmasraya dan jangka waktu pelaksanaan yang relative lama.</p>	
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas	Memetakan diklat yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sehingga diklat yang akan akan diikuti telah

		memperhatikan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pengetahuan serta memperhatikan lama pelaksanaan diklat serta lokasi dilaksanakannya diklat tersebut
	Tujuan	Agar Diklat Dapat diikuti Oleh APIP sesuai kebutuhan organisasi sekaligus mempertimbangkan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan
	Alokasi Anggaran	
	Total anggaran	Rp. 663.460.600,-
CAPAIAN PROGRAM	<p>Output : Diikutinya diklat yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sesuai kebutuhan organisasi.</p> <p>Outcome : Semua APIP mampu melaksanakan pengawasan sesuai program/ kegiatan yang ada.</p>	



KAK/TOR

Program		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Program		Terlaksananya Urysan Pemrintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sub Kegiatan		
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Nomor PER 1274/K/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Dilingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
	Gambaran Umum	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur yang dapat diikuti oleh seluruh APIP sesuai kebutuhan fungsionalnya
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Meliputi Kegiatan pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawas intern pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan baik fungsional maupun pelatihan teknis, bimbingan teknis, seminar, lokakarya dan konferensi
	Indikator Kinerja	Memiliki auditor/PPUPD yang memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundng-undangan yang berlaku
	Batasan Kegiatan	Kegiatan diklat penjenjangan dan peningkatan kapabilitas APIP sesuai dengan jadwal diklat yang diterbitkan
Maksud dan Tujuan		<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, dan sikap professional dengan dilandasi keribadian dan etika agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara professional, efisien dan efektif serta sesuai dengan peraturan perundng-undanga; Menentukan kelayakan dalam memenuhi syarat kompetensi APIP; Pengembangan profesi APIP
Cara Pelaksanaan Kegiatan		<ol style="list-style-type: none"> Melakukan analisa rencana kebutuhan diklat penjenjangan jabatan fungsional Auditor/PPUPD dan peningkatan kapabilitas APIP dengan menganalisa peta kompetensi ASN Mengumpulkan data dan persyaratan pendaftaran diklat Mengajukan surat usulan peserta diklat
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Badan Penyelenggaran Diklat (BPKP dan BKPSDM Kemendagri)
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		<p>Pelaksana : PPTK Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Penanggung Jawab : Inspektur</p>
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2024
Biaya		Rp. 663.460.600,-

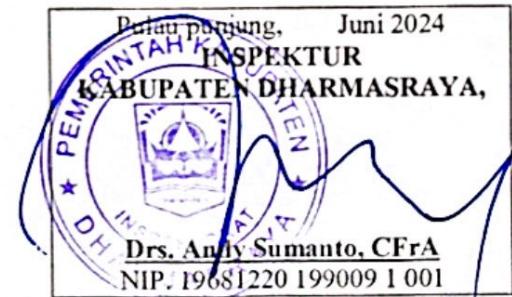


GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
Mengatasi Kesenjangan Gender Yang Terjadi

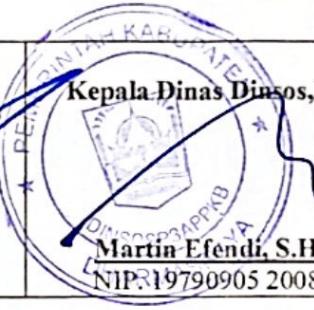
OPD : Inspektorat Kabupaten
PROGRAM : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
TAHUN : 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<p>Program : Penyelenggaraan Pengawasan Internal</p> <p>Kegiatan: Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Tujuan : Agar Terlaksananya Pengawasan Internal dalam Rangka Pencapaian PKPT dengan mempertimbangkan Proporsi Anggota Tim yang Laki-laki dan Perempuan</p>	<p>- jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 27 orang yang terdiri dari 12 laki-laki dan 15 perempuan</p>	<p>- Akses : Pengawasan yang dilaksanakan pada umumnya membutuhkan waktu lebih dari 5 hari dengan lokasi pelaksanaan yang jauh dari Kantor Inspektorat ke seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya sehingga menyulitkan bagi Anggota Tim terutama yang perempuan karena harus melakukan pengawasan untuk kegiatan cek fisik ke lapangan dengan jarak yang jauh dan medan pemeriksaan fisik yang susah dilalui kendaraan roda empat ataupun roda dua terlebih bagi perempuan yang hamil dan menyusui</p>	<p>- Peran ganda APIP perempuan yang bekerja di kantor dan bekerja sebagai ibu rumah tangga</p> <p>- Adanya perbedaan dalam proporsi pemeriksaan antara Anggota Tim Laki-laki dan Perempuan</p>	<p>Lokasi pemeriksaan yang jauh dan medan pemeriksaan fisik yang susah dilalui kendaraan roda empat ataupun roda dua dari Kantor Inspektorat Kabupaten Dharmasraya</p>	<p>Pelaksanaan pemeriksaan disesuaikan dengan proporsi laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan jarak dan lokasi pemeriksaan</p>	<p>Memetakan pemeriksaan yang telah ditetapkan berdasarkan surat tugas dengan pemeriksaan yang akan diikuti telah memperhatikan anggota Tim laki-laki dan perempuan mengenai jarak dan medan pemeriksaan fisik yang susah dilalui kendaraan roda empat ataupun roda dua</p>	<p>jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 27 orang yang terdiri dari 12 laki-laki dan 15 perempuan</p>	<p>Output : Diikutinya pengawasan yang telah ditetapkan berdasarkan surat tugas</p> <p>Outcome : Semua Anggota Tim dapat melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan dengan memperhatikan proporsi laki-laki dan perempuan dan kondisi jalan dan medan pemeriksaan fisik yang susah dilalui kendaraan roda empat ataupun roda dua</p>

	- Tidak semua Anggota Tim dapat melakukan pekerjaan pemeriksaan seperti ibu hamil, terutama untuk kegiatan fisik karena kondisi dari Kantor Inspektorat ke wilayah pemeriksaan di seluruh Kabupaten Dharmasraya jalan menuju lokasi pemeriksaan/ cek fisik yang susah dilalui kendaraan roda empat ataupun roda dua sedangkan semua APIP dituntut dapat melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan						
--	---	--	--	--	--	--	--



TIM VERIFIKASI

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER Inspektorat, Drs. Andy Sumanto, CFA NIP. 19681220 199009 1 001 DINAS INSPEKTORAT JEMBER</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BANDARKEWAIA DILAKUKAN KEDUA Kepala BKD Asrik AP., M.Si NIP. 19750225 199501 1 001 DILAKUKAN KEDUA</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BAPPERTERIDA DILAKUKAN KEDUA Kepala BAPPERIDA Parvanto, S.Sos., MT NIP. 19690609 198902 1 001 DILAKUKAN KEDUA</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DILAKUKAN KEDUA Kepala Dinas Dikmas, P3A, PPKB Martia Efendi, S.Hut., MM NIP. 19790905 200801 1 018 DILAKUKAN KEDUA</p>
---	--	--	---

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : Inspektorat Kabupaten

TAHUN ANGGARAN : 2024

PROGRAM Penyelenggaraan Pengawasan Internal

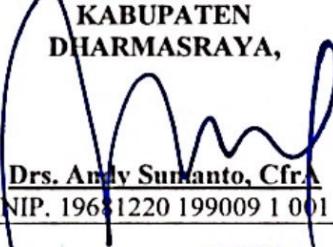
KODE PROGRAM 6.01.02

KEGIATAN Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

HASIL/OUTPUT Diikutinya pengawasan yang telah ditetapkan berdasarkan surat tugas

ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan <ul style="list-style-type: none">- jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 27 orang yang terdiri dari 12 laki-laki dan 15 perempuan .
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender <ul style="list-style-type: none">a. Faktor Kesenjangan<ul style="list-style-type: none">- Akses : Pengawasan yang dilaksanakan pada umumnya membutuhkan waktu lebih dari 5 hari dengan lokasi pelaksanaan yang jauh dari Kantor Inspektorat ke seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya sehingga menyulitkan bagi Anggota Tim terutama yang perempuan karena harus melakukan pengawasan terutama untuk kegiatan cek fisik ke lapangan dengan jarak yang jauh dan medan pemeriksaan fisik yang susah dilakui kendaraan roda empat ataupun roda dua terlebih bagi APIP yang hamil dan menyusui- Tidak semua Anggota Tim dapat melakukan pekerjaan pemeriksaan terutama untuk kegiatan fisik karena kondisi jalan dari Kantor Inspektorat ke lokasi pemeriksaan yang tersebar di seluruh Kabupaten Dharmasraya sehingga Anggota Tim Perempuan yang hamil/menyusui kesulitan karena jarak dan medan pemeriksaan fisik yang susah dilakui kendaraan roda empat ataupun roda dua sedangkan semua APIP dituntut dapat melakukan pemeriksaan fisik ke lapanganb. Penyebab Internal<ul style="list-style-type: none">- Peran ganda APIP perempuan yang bekerja di kantor dan bekerja sebagai ibu rumah tangga- Adanya perbedaan dalam proporsi pemeriksaan antara Anggota Tim Laki-laki dan Perempuanc. Penyebab Eksternal<ul style="list-style-type: none">Lokasi pemeriksaan yang jauh dan medan pemeriksaan fisik yang susah

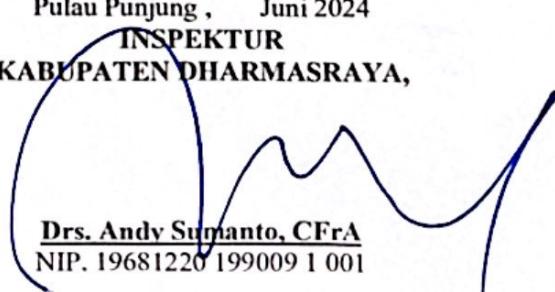
	dilakui kendaraan roda empat ataupun roda dua dari Kantor Inspektorat Kabupaten Dharmasraya		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Memetakan pemeriksaan yang telah ditetapkan berdasarkan surat tugas sehingga pemeriksaan yang akan diikuti telah memperhatikan anggota Tim laki-laki dan perempuan mengenai jarak dan medan pemeriksaan fisik yang susah dilakui kendaraan roda empat ataupun roda dua	
	Tujuan	Agar Terlaksananya Pengawasan Internal dalam Rangka Pencapaian PKPT dengan mempertimbangkan Proporsi Anggota Tim yang Laki-laki dan Perempuan	
	Alokasi Anggaran		
	Total anggaran	Rp. 234.985.850,-	
CAPAIAN PROGRAM	<p>Output : Diikutinya pengawasan yang telah ditetapkan berdasarkan surat tugas</p> <p>Outcome : Semua Anggota Tim dapat melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan dengan memperhatikan proporsi laki-laki dan perempuan dan kondisi jaran dan medan pemeriksaan fisik yang susah dilakui kendaraan roda empat ataupun roda dua</p>		

Pulau Punjung, Juni 2024
INSPEKRTUR
KABUPATEN
DHARMASRAYA,

Drs. Andy Sumanto, Cfra.
NIP. 19631220 199009 1 001



KAK/ TOR

Program		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Program		Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan		
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendagri Nomor 61 Tahun 2019 Tentang perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2020 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah
	Gambaran Umum	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan internal secara efektif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Meliputi Kegiatan pengawasan internal berupa Audit, Reviu dan Monitoring
	Indikator Kinerja	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan/pengawasan terhadap objek pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pada instansi/OPD, Nagari dan Sekolah di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya tepat waktu dan PKPT tercapai 100%
	Batasan Kegiatan	Kegiatan pemeriksaan/pengawasan sesuai dengan PKPT
Maksud dan Tujuan		Mendukung pelaksanaan tugas/pekerjaan pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Melakukan kegiatan pemeriksaan/pengawasan terhadap obyek pemeriksaan sesuai PKPT secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : Jabatan Fungsional Auditor/PPUPD Penanggung Jawab : Inspektur
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2024
Biaya		Rp. 234.985.850,-

Pulau Punjung , Juni 2024
INSPEKTUR
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Drs. Andy Sumianto, CFrA
NIP. 19681220 199009 1 001

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 1

Mengatasi Kesenjangan Gender

Kecamatan : KOTO BARU
 Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
KEGIATAN: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya Yang di ikuti oleh 4 Nagari (Nagari Koto Baru, Nagari Ampang Kurangi, Nagari Koto Padang, Nagari Sialang Gaung)	<u>Akses :</u> <u>Partisipasi :</u>	- belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang	Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang	Terumuskan-nya usulan program Prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2025 yang responsif gender	Mengumpulkan DURKP Nagari Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan	Meningkatnya kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur	Output: Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing-masing usulan yang menjadi prioritas
SUB KEGIATAN Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan Di Desa	Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang Tahun 2021 : 82 org Tahun 2022 : 100 org Tahun 2023 : 100 org Tahun 2024 : 100 org Tahun 2021, dari 82 yang hadir, diikuti	<u>Manfaat :</u> Belum semua masyarakat perempuan yang disediakan belum paham betul tentang pengasutama an gender	- Sedikitnya jumlah\kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan - belum paham betul tentang pengasutama an gender	Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang Sosial Budaya Minang kabau, dimana		Distribusi undangan ke nagari Menjalin koordinasi dan sosialisasi dengan pihak terkait secara internal sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	Dari kehadiran tahun 2024 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, perbandingannya a laki-laki 66% dan perempuan 34%	Input: Rp.13.344.900,- Outcome: Untuk melihat usulan masing-masing nagari yang mendukung adannya

TUJUAN: Percentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD	sebanyak 55 orang peserta laki-laki dan sebanyak 27 orang peserta perempuan Tahun 2022, dari 100 orang yang hadir, diikuti sebanyak 48 orang peserta laki-laki dan sebanyak 52 orang peserta perempuan		- Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang	perempuan tidak banyak memberikan pendapat		Menyampaikan saran ke bappeda untuk membuat regulasi tentang keterwakilan Perempuan dan anak di Musenbang Sosialisasi Musrenbang ke masyarakat	<i>Dari Notulen Usulan Musrenbang 2024 jumlah yang dundang 100. laki -laki yang hadir sebanyak 66 Orang, dan yang menyampaikan usulan 34 orang(37%) serta peserta perempuan yang hadir 34 Orang serta yang menyampaikan usulan sebanyak 19 orang (19%)</i>	kegiatan yang responsif gender
SASARAN Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Tahun 2023, dari 100 orang yang hadir, diikuti sebanyak 72 orang peserta laki-laki dan sebanyak 28 orang peserta perempuan serta ada 4 orang dari perwakilan Forum Anak Tahun 2024 diikuti oleh 100 orang peserta Laki-laki 66 Orang dan 34 orang orang perempuan. serta ada 4 orang dari perwakilan Forum Anak						Output: Melakukan Sosialisai Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang Input: Rp.13.344.900,-	Outcome: Menigkatnya tingkat kehadiran dan keberanian Perempuan menyampaikan usulan dalam proses pelaksanaan musrenbang, serta tertampungnya pada Musrenbang RKPD Kabupaten yang responsif gender

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	<p>Dari Notulen Usulan Musrenbang 2024 jumlah yang dundang 100. laki-laki yang hadir sebanyak 66 Orang, dan yang menyampaikan usulan 34 orang(37 %) serta peserta perempuan yang hadir 34 Orang serta yang menyampaikan usulan sebanyak 19 orang (19 %)</p>	<u>Kontrol</u> Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya						

Koto Baru, 25 Juni 2024
Camat Koto Baru,



DARMENDRA, S.Sos
NIP. 19791108 200901 1 004

TIM VERIFIKASI

 Drs. ANDI SUMANTO, Cfr.A NIP. 196812201990091001	 ASRI, AP,Msi NIP. 197502251995011001	 PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 196906091989021001	 MARTIN EFENDI, S.Hut. MM NIP. 198205212000121002
---	---	---	---

FORMAT GBS (1)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)									
Mengatasi Kesenjangan Gender									
SKPD	: KECAMATAN KOTO BARU								
TAHUN ANGGARAN	: 2024								
PROGRAM	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan								
KODE PROGRAM	7.01.03								
KEGIATAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
HASIL/OUTPUT	Terumuskannya perioritas usulan Musrenbang Kecamatan yang tertampung pada Musrenbang RKPD Tahun Anggaran 2024 yang responsif gender								
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya; Di Kecamatan Koto Baru terdiri dari 4 Nagari masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2024 diiluti oleh 100 orang peserta diantaranya 66 orang peserta laki-laki dan 34 orang perempuan serta dari 100 peserta musrembang hadir 4 orang dari perwakilan Forum Anak <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sangat sedikit Keterwakilan perempuan karena belum adanya aturan yang mewajibkan tingkat keterwakilan perempuan dan komitmen pihak terkait tentang pelaksanaan musrenbang. b. Masih sedikit perwakilan perempuan yang memberikan atau mengajukan usulan dalam kegiatan Musrenbang. 								
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas	Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing – masing usulan yang menjadi perioritas <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Tujuan</td> <td>Untuk melihat usulan masing –masing nagari yang mendukung adannya kegiatan yang responsif gender</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Melakukan Sosialisasi Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td>Supaya perwakilan perempuan lebih aktif untuk menyampaikan usulan kegiatan pada kegiatan musrenbang</td> </tr> </table>		Tujuan	Untuk melihat usulan masing –masing nagari yang mendukung adannya kegiatan yang responsif gender	Melakukan Sosialisasi Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang		Tujuan	Supaya perwakilan perempuan lebih aktif untuk menyampaikan usulan kegiatan pada kegiatan musrenbang
Tujuan	Untuk melihat usulan masing –masing nagari yang mendukung adannya kegiatan yang responsif gender								
Melakukan Sosialisasi Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang									
Tujuan	Supaya perwakilan perempuan lebih aktif untuk menyampaikan usulan kegiatan pada kegiatan musrenbang								
	Total anggaran	Rp. 13.344.900,							
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Menigkatnya tingkat kehadiran dan keberanian Perempuan menyampaikan usulan dalam proses pelaksanaan musrenbang, serta tertampungnya pada Musrenbang RKPD Kabupaten yang responsif gender								

Koto Baru, 25 Juni 2024

Camat Koto Baru

DARMENDRA, S.Sos
NIP. 19791108 200901 1 004

TIM VERIFIKASI

 Drs. ANDI SUMANTO, CfrA NIP. 1968 1220 199009 1 001	 Kepala BKD ASRIL AP,Msi NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperryda PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial,P3A.PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut. MM NIP. 19820521 200012 1 002
---	--	--	--

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 2

Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat (service delivery)

Kecamatan : KOTO BARU

Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik								
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik KEGIATAN: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat TUJUAN: Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan SOP SASARAN Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan	Data Pembuka Wawasan Adanya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Jumlah Layanan Paten 2023 Non Disabilitas 753 org Disabilitas 0 orang TUjuan: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan	Isu Gender Faktor Kesenjangan <u>Akses :</u> <u>Partisipasi :</u> Disiapkan jalur khusus untuk pelayanan disabilitas, disiapkan loket khusus disabilitas <u>Manfaat :</u> Mempercepat proses alur pelayanan khusus disabilitas <u>Kontrol</u> Memastikan Sarana dan Prasarana penunjang Disabilitas tersedia dan berfungsi dengan baik	Sebab Kesenjangan Internal Pelayanan khusus untuk disabilitas belum diperhatikan secara khusus	Sebab Kesenjangan Eksternal Minimnya warga penyandang Disabilitas mengurus kelengkapan biodata warganegara	Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan Reformulasi Tujuan Terpenuhinya layanan untuk penyandang Disabilitas	Rencana Aksi - Menyediakan Sarana dan Prasarana bagi penyandang Disabilitas - Menyediakan loket khusus disabilitas	Data Dasar (Baseline) - Meningkatnya keluarga yang membawa penyandang Disabilitas mengurus pelayanan - Tingkat pelayanan PATEN tahun 2023 Non Disabilitas 100% Disabilitas 0%	Monitoring Output : Tersedianya pengadaan Kursi roda bagi penyandang disabilitas sebanyak 3 buah dan tersedianya pembuatan jalur disabilitas Input: Rp. 55.000.000 Outcome: Terlaksananya Pengadaan Kursi roda dan pembuatan jalur untuk penyandang disabilitas Output: Tersedianya loket khusus disabilitas Input: Rp. 1.500.000,-

umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan								Outcome : Meningkatnya penyandang disabilitas yang melakukan permohonan dokumen melalui PATEN Kecamatan Output : Terlaksananya koordinasi dengan lintas sector Input : Rp. 1.000.000,- Outcome : Meningkatnya Sinergi/Koordinasi Lintas Sektor
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Koto Besar, 25 Juni 2024
Camat Koto Baru



DARMENDRA, S.Sos
NIP. 19791108 200901 1 004

TIM VERIFIKASI



Drs. ANDI SUMANTO, C.Fra
NIP. 19681220 199009 1 001



ASRIL AP.Msi
NIP. 19750226 199501 1 001



PARYANTO, S.Sos. M.T
NIP. 19690609 198902 1 001



MARTIN EFENDI, S.Hut. MM
NIP. 19820521 200012 1 002

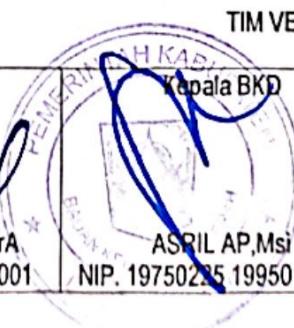
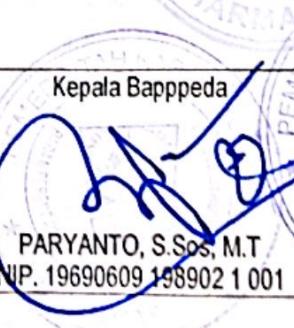
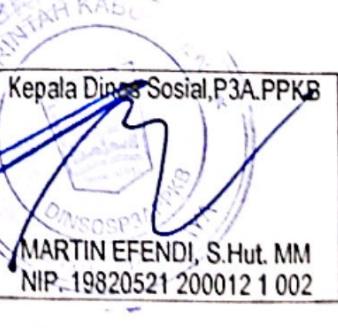
FORMAT GBS (2)

		PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)																															
Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat (service delivery)																																	
SKPD	: KECAMATAN KOTO BARU																																
TAHUN ANGGARAN	: 2025																																
PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																																
KODE PROGRAM	7.01.02																																
KEGIATAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																																
HASIL/OUTPUT	(Diambil dari GAP langkah 6)																																
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) b. Jumlah layanan Paten Tahun 2023 Non Disabilitas 753 orang, Yang Disabilitas tidak ada <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Minimnya warga penyandang Disabilitas mengurus kelengkapan biodata warganegara b. Pelayanan khusus untuk disabilitas belum diperhatikan secara khusus c. Disiapkan jalur khusus untuk pelayanan disabilitas d. Disiapkan loket khusus disabilitas 																																
RENCANA AKSI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Komponen/ Aktifitas 1</td> <td colspan="2">(Diambil dari GAP langkah 7)</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td colspan="2">Menyediakan Jalur Khusus dan kursi roda untuk penyandang disabilitas</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td colspan="2">Rp. 55.000.000,-</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">Komponen/ aktifitas 2</td> <td colspan="2">(Diambil dari GAP langkah 7)</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td colspan="2">Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan penyandang disabilitas</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td colspan="2">Rp. 1.500.000,-</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">Komponen/ aktifitas 3</td> <td colspan="2">(Diambil dari GAP langkah 7)</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td colspan="2">Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sector</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td colspan="2">Rp. .1.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Total anggaran</td> <td colspan="2">Rp. 57.500.000,-</td> </tr> </table>			Komponen/ Aktifitas 1	(Diambil dari GAP langkah 7)		Tujuan	Menyediakan Jalur Khusus dan kursi roda untuk penyandang disabilitas		Alokasi Anggaran	Rp. 55.000.000,-		Komponen/ aktifitas 2	(Diambil dari GAP langkah 7)		Tujuan	Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan penyandang disabilitas		Alokasi Anggaran	Rp. 1.500.000,-		Komponen/ aktifitas 3	(Diambil dari GAP langkah 7)		Tujuan	Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sector		Alokasi Anggaran	Rp. .1.000.000,-		Total anggaran	Rp. 57.500.000,-	
Komponen/ Aktifitas 1	(Diambil dari GAP langkah 7)																																
Tujuan	Menyediakan Jalur Khusus dan kursi roda untuk penyandang disabilitas																																
Alokasi Anggaran	Rp. 55.000.000,-																																
Komponen/ aktifitas 2	(Diambil dari GAP langkah 7)																																
Tujuan	Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan penyandang disabilitas																																
Alokasi Anggaran	Rp. 1.500.000,-																																
Komponen/ aktifitas 3	(Diambil dari GAP langkah 7)																																
Tujuan	Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sector																																
Alokasi Anggaran	Rp. .1.000.000,-																																
Total anggaran	Rp. 57.500.000,-																																
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Terciptanya Layanan PATEN Kecamatan yang responsif gender																																

Koto Besar, 25 Juni 2024
Camat Koto Baru

DARMENDRA, S.Sos
NIP. 19791108 200901 1 004

TIM VERIFIKASI

 Inspektur Drs. ANDI SUMANTO, CfrA NIP. 196812201990901 001	 Kapala BKD ASRIL AP,Msi NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapppeda PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial,P3A,PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut. MM NIP. 19820521 200012 1 002
--	--	--	--

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 1
Mengatasi Kesenjangan Gender

Kecamatan : KOTO BESAR
 Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
KEGIATAN: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya Yang di ikuti oleh 7 Nagari (Nagari Koto Besar, Nagari Abai Siat, Nagari Bonjol, Nagari Koto Ranah, Nagari Koto Gadang, Nagari Koto laweh, dan Nagari Koto tinggi)	Faktor Kesenjangan <u>Akses :</u> <u>Partisipasi :</u> Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang	Sebab Kesenjangan Internal - belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang	Sebab Kesenjangan Eksternal - Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang	Reformulasi Tujuan Terumuskannya usulan program Perioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2025 yang responsif gender	Rencana Aksi Mengumpulkan DURKP Nagari Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan Distribusi undangan ke nagari	Data Dasar (Baseline) Meningkatnya kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur Tersusunnya usulan prioritas kecamatan	Indikator Gender Output: Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing –masing usulan yang menjadi prioritas Input: Rp.11.275.00,-
SUB KEGIATAN Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan Di Desa	Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang Tahun 2021 : 50 org Tahun 2022 : 80 org Tahun 2023 : 100 org Tahun 2024 : 96 org	 <u>Manfaat :</u> Belum semua masyarakat (perempuan) mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang	 Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan - belum paham betul tentang pengasutan gender	 Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang Sosial Budaya Minang kabau,			 Menjalin koordinasi dan sosialisasi dengan pihak terkait secara internal sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	 Outcome: Untuk melihat usulan masing –masing nagari yang mendukung

TUJUAN: Percentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Tahun 2021 dari 50 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 35 orang peserta laki-laki dan 15 Orang peserta perempuan	- Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang	dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat	Menyampaikan saran ke bappeda untuk membuat regulasi tentang keterwakilan Perempuan dan anak di Musenbang	Meningkatnya usulan Peserta Laki-laki 28,2 % dan perempuan meningkat 17,24 %	adannya kegiatan yang responsif gender
SASARAN Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Tahun 2022 di ikuti oleh 80 orang peserta laki-laki 53 dan 27 orang peserta perempuan Tahun 2023 di ikuti oleh 100 orang peserta laki-laki 71 dan 29 orang peserta perempuan serta ada 8 orang dari perwakilan Forum Anak Tahun 2024 diikuti oleh 96 orang peserta Laki-laki 80 Orang dan 16 orang orang perempuan.			Output: <i>Dari Notulen Usulan Musrenbang 2024 jumlah yang dundang 100. laki-laki yang hadir sebanyak 80 Orang, dan yang menyampaikan usulan 20 orang(25 %)</i>	Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang Input: Rp.6.720.00,-	Outcome: Menigkatnya tingkat kehadiran dan keberanian Perempuan menyampaikan usulan dalam proses pelaksanaan musrenbang, serta tertampungnya pada Musrenbang RKPD Kabupaten yang responsif gender

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	<p>Dari Notulen Usulan Musrenbang 2024 jumlah yang dundang 100 laki-laki yang hadir sebanyak 80 Orang. dan yang menyampaikan usulan 20 orang(25 %)</p> <p>peserta perempuan yang di undang 20. orang dan yang hadir 16 Orang serta yang menyampaikan usulan sebanyak 5 orang (89%)</p>	<u>Kontrol</u> Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya	Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan				<p>peserta perempuan yang di undang 20. orang dan yang hadir 16 Orang serta yang menyampaikan usulan sebanyak 5 orang (89%)</p>	



TIM VERIFIKASI

 Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut. MM NIP 19820521 200012 1 002	 Kepala Bapperaida PARYANTO, S.Sos, M.T NIP 19690609 1989021 001	 Kepala BKD ASRI AP, Msi NIP 19750225 199501 1 001	 Inspektur Drs ANDI SUMANTO, CfrA NIP 19681220 1990909 1 001
---	---	---	---

FORMAT GBS (1)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)															
Mengatasi Kesenjangan Gender															
SKPD	: KECAMATAN KOTO BESAR														
TAHUN ANGGARAN	: 2024														
PROGRAM	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan														
KODE PROGRAM	7.01.03														
KEGIATAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa														
HASIL/OUTPUT	Terumuskannya prioritas usulan Musrenbang Kecamatan yang tertampung pada Musrenbang RKPD Tahun Anggaran 2024 yang responsif gender														
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya; Di Kecamatan Koto Besar terdiri dari 7 Nagari masing-masing mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang</p> <ul style="list-style-type: none"> Tahun 2024 diiluti oleh 96 orang peserta diantaranya 80 orang peserta laki-laki dan 16 orang perempuan. <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ol style="list-style-type: none"> Sangat sedikit Keterwakilan perempuan karena belum adanya aturan yang mewajibkan tingkat keterwakilan perempuan dan komitmen pihak terkait tentang pelaksanaan musrenbang. Masih sedikit perwakilan perempuan yang memberikan atau mengajukan usulan dalam kegiatan Musrenbang. 														
RENCANA AKSI	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Komponen/ Aktifitas 1</td> <td>Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing-masing usulan yang menjadi prioritas</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td>Untuk melihat usulan masing-masing nagari yang mendukung adannya kegiatan yang responsif gender</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td>11.275.000,-</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Komponen/ aktifitas 2</td> <td>Melakukan Sosialisasi Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td>Supaya perwakilan perempuan lebih aktif untuk menyampaikan usulan kegiatan pada kegiatan musrenbang</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td>6.720.000</td> </tr> <tr> <td>Total anggaran</td> <td>Rp. 17.995.000,-</td> </tr> </table>	Komponen/ Aktifitas 1	Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing-masing usulan yang menjadi prioritas	Tujuan	Untuk melihat usulan masing-masing nagari yang mendukung adannya kegiatan yang responsif gender	Alokasi Anggaran	11.275.000,-	Komponen/ aktifitas 2	Melakukan Sosialisasi Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang	Tujuan	Supaya perwakilan perempuan lebih aktif untuk menyampaikan usulan kegiatan pada kegiatan musrenbang	Alokasi Anggaran	6.720.000	Total anggaran	Rp. 17.995.000,-
Komponen/ Aktifitas 1	Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing-masing usulan yang menjadi prioritas														
Tujuan	Untuk melihat usulan masing-masing nagari yang mendukung adannya kegiatan yang responsif gender														
Alokasi Anggaran	11.275.000,-														
Komponen/ aktifitas 2	Melakukan Sosialisasi Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang														
Tujuan	Supaya perwakilan perempuan lebih aktif untuk menyampaikan usulan kegiatan pada kegiatan musrenbang														
Alokasi Anggaran	6.720.000														
Total anggaran	Rp. 17.995.000,-														
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Menigkatnya tingkat kehadiran dan keberanahan Perempuan menyampaikan usulan dalam proses pelaksanaan musrenbang, serta tertampungnya pada Musrenbang RKPD Kabupaten yang responsif gender														

Koto Besar, 19 Juni 2023

Kecamatan Koto Besar

FASZHARIES.SH

NIP. 19850419 201001 1 010

TIM VERIFIKASI

Inspektorat	Kepala BKD	Kepala Bappperda	Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB
Drs. ANDI SUMANTOR, Cfra NIP. 19681120 199009 1 001	ASRIL AP, Msi NIP. 19750225 199501 1 001	PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 199902 1 001	MARTIN EFENDI, S.Hut, MM NIP. 19820521 200012 1 002

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 2
Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat (service delivery)

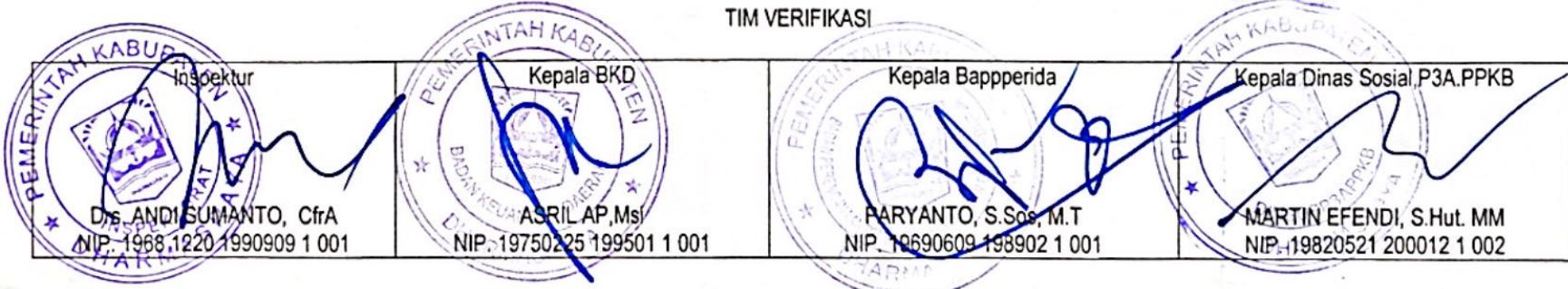
Kecamatan : KOTO BESAR

Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik KEGIATAN: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat TUJUAN: Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan SOP SASARAN Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan	Data Pembuka Wawasan Adanya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Jumlah Layanan Paten 2023 Non Disabilitas 528 org Disabilitas 0 orang Jumlah Data Disabilitas dikecamatan Koto Besar, sebanyak 31 orang	Isu Gender Faktor Kesenjangan <u>Akses :</u> <u>Partisipasi :</u> Disiapkan jalur khusus untuk pelayanan disabilitas, disiapkan loket khusus disabilitas <u>Manfaat :</u> Mempercepat proses alur pelayanan khusus disabilitas <u>Kontrol</u> Memastikan Sarana dan Prasarana penunjang Disabilitas tersedia dan berfungsi dengan baik	Sebab Kesenjangan Internal - Pelayanan khusus untuk disabilitas belum diperhatikan secara khusus	Sebab Kesenjangan Eksternal Minimnya warga penyandang Disabilitas mengurus kelengkapan biodata warganegara -	Reformulasi Tujuan Terpenuhinya layanan untuk penyandang Disabilitas	Rencana Aksi Menyediakan Sarana dan Prasarana bagi penyandang Disabilitas Menyediakan loket khusus disabilitas	Data Dasar (Baseline) Meningkatnya keluarga yang membawa penyandang Disabilitas mengurus pelayanan -	Monitoring Output : Tersedianya pengadaan Kursi roda bagi penyandang disabilitas sebanyak 3 buah dan tersedianya pembuatan jalur disabilitas Tingkat pelayanan PATEN tahun 2023 Non Disabilitas 94,3 % Disabilitas 0,25 % Input: Rp. 53.000.000 Outcome: Terlaksananya Pengadaan Kursi roda dan pembuatan jalur untuk penyandang disabilitas Tersedianya loket khusus disabilitas Output: Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan penyandang disabilitas Input: Rp. 1.200.000,-

umum dan
Pemberdayaan
masyarakat di
kecamatan

Outcome :
Meningkatnya
penyandang
disabilitas yang
melakukan
permohonan
dokumen melalui
PATEN Kecamatan
Output :
Terlaksananya
koordinasi
dengan lintas sector
Input : Rp.
750.000,-
Outcome :
Meningkatnya
Sinergi/Koordinasi
Lintas Sektor



FORMAT GBS (2)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat (service delivery)

SKPD	: KECAMATAN KOTO BESAR																															
TAHUN ANGGARAN	: 2025																															
PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																															
KODE PROGRAM	7.01.02																															
KEGIATAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																															
HASIL/OUTPUT	(Diambil dari GAP langkah 6)																															
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) b. Jumlah layanan Paten Tahun 2023 Non Disabilitas 528 orang, Yang Disabilitas tidak ada c. Jumlah Data Disabilitas diKecamatan Koto Besar sebanyak 31 Orang 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender <ul style="list-style-type: none"> a. Minimnya warga penyandang Disabilitas mengurus kelengkapan biodata warganegara b. Pelayanan khusus untuk disabilitas belum diperhatikan secara khusus c. Disiapkan jalur khusus untuk pelayanan disabilitas d. Disiapkan loket khusus disabilitas 																															
RENCANA AKSI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Komponen/ Aktifitas 1</td> <td colspan="2">(Diambil dari GAP langkah 7)</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td colspan="2">Menyediakan Jalur Khusus dan kursi roda untuk penyandang disabilitas</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td colspan="2">Rp. 53.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Komponen/ aktifitas 2</td> <td colspan="2">(Diambil dari GAP langkah 7)</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td colspan="2">Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan penyandang disabilitas</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td colspan="2">Rp. 1.120.000,-</td> </tr> <tr> <td>Komponen/ aktifitas 3</td> <td colspan="2">(Diambil dari GAP langkah 7)</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td colspan="2">Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sector</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td colspan="2">Rp. 750.000,-</td> </tr> <tr> <td>Total anggaran</td> <td colspan="2">Rp. 54.870.000,-</td> </tr> </table>		Komponen/ Aktifitas 1	(Diambil dari GAP langkah 7)		Tujuan	Menyediakan Jalur Khusus dan kursi roda untuk penyandang disabilitas		Alokasi Anggaran	Rp. 53.000.000,-		Komponen/ aktifitas 2	(Diambil dari GAP langkah 7)		Tujuan	Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan penyandang disabilitas		Alokasi Anggaran	Rp. 1.120.000,-		Komponen/ aktifitas 3	(Diambil dari GAP langkah 7)		Tujuan	Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sector		Alokasi Anggaran	Rp. 750.000,-		Total anggaran	Rp. 54.870.000,-	
Komponen/ Aktifitas 1	(Diambil dari GAP langkah 7)																															
Tujuan	Menyediakan Jalur Khusus dan kursi roda untuk penyandang disabilitas																															
Alokasi Anggaran	Rp. 53.000.000,-																															
Komponen/ aktifitas 2	(Diambil dari GAP langkah 7)																															
Tujuan	Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan penyandang disabilitas																															
Alokasi Anggaran	Rp. 1.120.000,-																															
Komponen/ aktifitas 3	(Diambil dari GAP langkah 7)																															
Tujuan	Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sector																															
Alokasi Anggaran	Rp. 750.000,-																															
Total anggaran	Rp. 54.870.000,-																															
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Terciptanya Layanan PATEN Kecamatan yang responsif gender																															



TIM VERIFIKASI

 Inspektur Ds. ANDI SUMANTO, CfrA NIP. 196812201990091001	 Kepala BKD ASRIL AP, Msi NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapppeda PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 196902 1 001	 Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut, MM NIP. 19820521 200012 1 002
--	---	---	--

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 1
Mengatasi Kesenjangan Gender

Kecamatan : KOTO SALAK
 Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
KEGIATAN: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya.	Faktor Kesenjangan <u>Akses :</u> <u>Partisipasi :</u> Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang	Sebab Kesenjangan Internal - belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan untuk menghadiri musrenbang	Sebab Kesenjangan Eksternal - Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang	Reformulasi Tujuan Terumuskannya usulan program Prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2025 yang responsif gender	Rencana Aksi Mengumpulkan DURKP Nagari Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan Distribusi undangan ke nagari	Data Dasar (Baseline) Meningkatnya kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur	Indikator Gender Output: Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing – masing usulan yang menjadi prioritas
SUB KEGIATAN Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang Tahun 2021: 60 org Tahun 2022 : 60 org Tahun 2023 : 60 org Tahun 2024 60 org Tahun 2021, dari 60 yang ada, diikuti sebanyak 43 orang peserta laki-laki dan sebanyak 17 orang peserta perempuan. Tahun 2022, dari 60 yang ada, diikuti oleh sebanyak 39 orang peserta laki-laki dan 21 orang peserta	<u>Manfaat :</u> Belum semua masyarakat (perempuan) mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang	Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang	Sosial Budaya Minang kabau, dimana		Menjalin koordinasi dan sosialisasi dengan pihak terkait secara internal sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	Dari kehadiran tahun 2024 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, perbandingannya laki-laki 40 % dan perempuan 20 %	Input: Rp. 5.000.000 Outcome: Untuk melihat usulan masing – masing nagari yang mendukung adannya

TUJUAN: Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Tahun 2023 dari 60 orang yang ada terdiri dari 31 laki-laki dan 29 perempuan Dari notulen usulan musrenbang 2022 jumlah peserta laki-laki yang diundang 45 orang, yang hadir 31 orang yang menyampaikan usulan sebanyak 8 orang (20 % dari jumlah peserta laki-laki yang hadir), peserta perempuan yang diundang sebanyak 25 orang yang hadir 21 orang dan yang menyampaikan usulan sebanyak 2 orang (9 % dari jumlah peserta perempuan yang hadir)	- Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang	perempuan tidak banyak memberikan pendapat	Menyampaikan saran ke bappeda untuk membuat regulasi tentang keterwakilan Perempuan dan anak di Musenbang Sosialisasi Musrenbang ke masyarakat	Meningkatnya usulan Peserta Laki-laki 40 % dan perempuan meningkat 30 % <i>Dari Notulen Usulan Musrenbang 2024 jumlah yang dundang 40. laki -laki yang hadir sebanyak 20 Orang, dan yang menyampaikan usulan 10 orang(12,5 %)</i>	kegiatan yang responsif gender Output: Melakukan Sosialisai Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang Input: Rp 7.680.000,-
--	--	--	--	---	---	--

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	<p>Tahun 2024 dari 60 orang yang ada terdiri dari 40 laki-laki dan 20 perempuan dan Forum anak 3 org</p> <p>Dari notulen usulan usrenbang 2024 yang menyampaikan usulan sebanyak 10 orang (20 %) dari peserta yang hadirpeserta</p>	<p>Kontrol Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya</p>	<p>Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan</p>				<p>peserta perempuan yang di undang 20 orang dan yang hadir 17 Orang serta yang menyampaikan usulan sebanyak 5 orang (25 %)</p>	



TIM VERIFIKASI

<p>Inspektorat Drs. ANDI SUMANTO, CfrA NIP. 19681220 1990909 1 001</p>	<p>Kepala BKD ARIL AP, Msi NIP. 19750225 199501 1 001</p>	<p>Kcpala Bappperida ARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, P3A.PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut, MM NIP. 19820521 200012 1 002</p>
--	---	---	--

FORMAT GBS (1)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)															
Mengatasi Kesenjangan Gender															
SKPD	: KECAMATAN Koto Salak														
TAHUN ANGGARAN	: 2024														
PROGRAM	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan														
KODE PROGRAM	7.01.03														
KEGIATAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa														
HASIL/OUTPUT	Terumuskannya perioritas usulan Musrenbang Kecamatan yang tertampung pada Musrenbang RKPD Tahun Anggaran 2025 yang responsif gender														
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data PembukaWawasan (Data Pilah Gender). Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya; Di Kecamatan Koto Salak terdiri dari 5 Nagari masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2024 diikuti oleh 60 orang peserta diantaranya 40 orang peserta laki-laki dan 20 orang perempuan. Dan Forum Anak 3 orang <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sangat sedikit Keterwakilan perempuan karena belum adanya aturan yang mewajibkan tingkat keterwakilan perempuan dan komitmen pihak terkait tentang pelaksanaan musrenbang. b. Masih sedikit perwakilan perempuan yang memberikan atau mengajukan usulan dalam kegiatan Musrenbang. 														
RENCANA AKSI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Komponen/ Aktifitas 1</td> <td style="padding: 5px;">Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing -masing usulan yang menjadi perioritas</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="width: 30%; vertical-align: top; padding: 5px;">Tujuan</td> <td style="padding: 5px;">Untuk melihat usulan masing -masing nagari yang mendukung adannya kegiatan yang responsif gender</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Alokasi Anggaran</td> <td style="padding: 5px;">5.000.000,-</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="width: 30%; vertical-align: top; padding: 5px;">Komponen/ aktifitas 2</td> <td style="padding: 5px;">Melakukan Sosialisai Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tujuan</td> <td style="padding: 5px;">Supaya perwakilan perempuan lebih aktif untuk menyampaikan usulan kegiatan pada kegiatan musrenbang</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Alokasi Anggaran</td> <td style="padding: 5px;">7.680.000</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Total anggaran</td> <td style="padding: 5px;">Rp. 12.680.000,-</td> </tr> </table>	Komponen/ Aktifitas 1	Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing -masing usulan yang menjadi perioritas	Tujuan	Untuk melihat usulan masing -masing nagari yang mendukung adannya kegiatan yang responsif gender	Alokasi Anggaran	5.000.000,-	Komponen/ aktifitas 2	Melakukan Sosialisai Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang	Tujuan	Supaya perwakilan perempuan lebih aktif untuk menyampaikan usulan kegiatan pada kegiatan musrenbang	Alokasi Anggaran	7.680.000	Total anggaran	Rp. 12.680.000,-
Komponen/ Aktifitas 1	Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing -masing usulan yang menjadi perioritas														
Tujuan	Untuk melihat usulan masing -masing nagari yang mendukung adannya kegiatan yang responsif gender														
	Alokasi Anggaran	5.000.000,-													
Komponen/ aktifitas 2	Melakukan Sosialisai Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang														
	Tujuan	Supaya perwakilan perempuan lebih aktif untuk menyampaikan usulan kegiatan pada kegiatan musrenbang													
	Alokasi Anggaran	7.680.000													
Total anggaran	Rp. 12.680.000,-														
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Menigkatnya tingkat kehadiran dan keberanahan Perempuan menyampaikan usulan dalam proses pelaksanaan musrenbang, serta tertampungnya pada Musrenbang RKPD Kabupaten yang responsif gender														

Koto Salak, 19 Juni 2024

Camat Koto Salak



H. Sulisworo, S.Pd

19702621994031006

TIM VERIFIKASI

Inspektorat DIS. ANDI SUMANTO, CfrA NIP. 196811201990091001	Kepala BKD ASRIL AP,Msi NIP. 19750325 1995011001	Kepala Bappenda PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 1989021001	Kepala Dinas Sosial P3A.PPKB MARTIN EFENDI,S.Hut, MM NIP. 19820521 2000121002
--	---	--	--

FORM KAKI / TOR

Program		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan
Sasaran Program		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan keluarahan
Kegiatan		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan pembangunan di desa
Latar Belakang	DasarHukum	Surat Bupati Dharmasraya No. 000.7.2/34/Bappperida tanggal 16 Februari 2024 perihal Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan
	Gambaran Umum	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti Musrenbang
	Indikator Kinerja	Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan	Merumuskan Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan	
Cara Pelaksanaan Kegiatan	Mengundang utusan nagari dan stakeholder terkait untuk merumuskan usulan prioritas musrenbang kecamatan dalam satu ruang dan waktu yang telah ditentukan	
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kecamatan Koto Salak	
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan	Pelaksana	: PPTK Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan Di Desa
	Penanggung Jawab : Camat Koto Salak	
Jadwal	Bulan Februari 2025	
Biaya	Rp. 12 680.000	



GENDER BUDGET STATEMENT
(Pemyataan Anggaran Gender)

OPD : Dinas Pendidikan

TAHIJN ANGGARAN : 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Dasar Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik Sekolah Dasar
KODE PROGRAM	1.01.02
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data peserta didik laki-laki dan perempuan di SD Kabupaten Dharmasraya Laki-laki = 2267 siswa, Perempuan = 1474 siswa - Jumlah peserta didik SD laki-laki dan perempuan yang menerima Biaya Personil (Seragam Sekolah) Laki-laki : 2267 siswa, Perempuan : 1474 siswa <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses :</p> <p>Belum semua siswa yang mendapatkan biaya personal (Seragam Sekolah)</p> <p>Kontrol:</p> <p>Masyarakat khususnya siswa baru di jenjang pendidikan sekolah dasar</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pembelajaran dan Kebudayaan, Nomor. 052/ C/ Kep/ D/ 82 "Sekolah secara formal berhak memakai seragam sekolah terhadap siswanya dengan bermacam alasan karena seragam sekolah ialah suatu perlengkapan menciptakan kerapian, ketertiban serta keteraturan siswa dalam melakukan aktivitas pembelajaran. <u>Seragam sekolah sebagai penghilang kesenjangan antara kelas ekonomi dari siswa yang dari berbagai elemen</u>" - Data yang terverifikasi belum lengkap <p>c. Penyebab Eksternal</p> <p>Belum semua masyarakat menerima seragam sekolah baru</p>
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. Tolak Ukur</p> <p>Terlaksananya bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa laki-laki dan perempuan</p> <p>2. Indikator dan Target Kinerja</p> <p>Jumlah peserta didik SD laki-laki dan perempuan yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah</p> <p>Output :</p>

<p>Jumlah peserta didik SD laki-laki dan perempuan yang tidak mendapatkan bantuan biaya personil (seragam yang menerima bantuan perlengkapan sekolah)</p> <p>Outcome :</p> <p>Meningkatnya kesejahteraan peserta didik SD laki-laki dan perempuan</p>		
JUMLAH ANGGAUN PROGRAM	Rp 2.451.500.000,-	
RENCANA AKSI	Kegiatan 1 Pendataan dan verifikasi data.	
	Masukan-	
	Keluaran	Jumlah peserta didik SD laki-laki dan perempuan
Kegiatan 2	Hasil	Terverifikasinya data peserta didik SD laki-laki dan perempuan
	Masukan	Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa
	Keluaran	Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa
	Hasil	Terlaksananya Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa

Pulau Punjung, Juni 2024



Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppeda	Kepala Dinas Sosial P3A
<p>Drs. ANDY SUMANTO CfrA</p> <p>NIP 19681220 199009 1 001</p>	<p>ASRILAP, M.Si</p> <p>NIP 19750225 199501 1 001</p>	<p>H. PARYANTO, S.Sos, M.T</p> <p>NIP 19690609 198902 1 001</p>	<p>MARTIN EFENDI,S.Hut.M.M</p> <p>NIP. 19790905 200801 1 018</p>

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pemyataan Anggaran Gender)

OPD : Dinas Pendidikan

TAHIJN ANGGARAN : 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Dasar Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik Sekolah Menengah Pertama
KODE PROGRAM	1.01.02
ANALISA SITUASI	<p>3. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data peserta didik laki-laki dan perempuan di SMP Kabupaten Dharmasraya Laki-laki = 2336 siswa, Perempuan = 1273 siswa - Jumlah peserta didik SMP laki-laki dan perempuan yang menerima Biaya Personil (Seragam Sekolah) Laki-laki : 2336 siswa, Perempuan : 1273 siswa <p>4. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>d. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses :</p> <p>Belum semua siswa yang mendapatkan biaya personal (Seragam Sekolah)</p> <p>Kontrol:</p> <p>Masyarakat khususnya siswa baru di jenjang pendidikan sekolah dasar</p> <p>e. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya anggaran dari Pemerintah Pusat - Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pembelajaran dan Kebudayaan, Nomor: 052/ C/ Kep/ D/ 82 "Sekolah secara formal berhak memakai seragam sekolah terhadap siswanya dengan bermacam alasan karena seragam sekolah ialah suatu perlengkapan menciptakan kerapian, ketertiban serta keteraturan siswa dalam melakukan aktivitas pembelajaran. <u>Seragam sekolah sebagai penghilang kesepjangan antara kelas ekonomi dari siswa yang dari berbagai elemen</u>" - Data yang terverifikasi belum lengkap <p>f. Penyebab Eksternal</p> <p>Belum semua masyarakat menerima seragam sekolah baru</p>
CAPAIAN	3. Tolak Ukur
	Terlaksananya bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa laki-laki dan perempuan

PROGRAM	4. Indikator dan Target Kinerja Jumlah peserta didik SMP laki-laki dan perempuan yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah Output : Jumlah peserta didik SMP laki-laki dan perempuan yang tidak mendapatkan bantuan biaya personil (seragam yang menerima bantuan perlengkapan sekolah Outcome : Meningkatnya kesejahteraan peserta didik SMP laki-laki dan perempuan		
JUMLAH ANGGAUN PROGRAM	Rp 1.648.500.000,-		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Masukan-	Pendataan dan verifikasi data.
		Keluaran	Jumlah peserta didik SMP laki-laki dan perempuan
	Hasil		Terverifikasinya data peserta didik SMP laki-laki dan perempuan
	Kegiatan 2	Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa	
	Masukan	Rp 1.648.500.000	
	Keluaran	Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa	
	Hasil	Terlaksananya Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa	

Pulau Punjung, Junj 2024



Tim Verifikasi

Inspektur Drs ANDY SUMANTO, CfrA NIP 19681220 199009 1 001	Kepala BKD ASRIL AP.,M.Si NIP-19750225 199501 1 001	Kepala Bappeda H. PARYANTO, S.Sos. M.T NIP. 19690609 198902 1 001	Kepala Dinas Sosial P3A MARTIN EFENDI,S.Hut.M.M NIP. 19790905 200801 1 018
--	--	---	--

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pemyataan Anggaran Gender)

OPD : Dinas Pendidikan

TAHIJN ANGGARAN : 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Dasar Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik PAUD
KODE PROGRAM	1.01.02
ANALISA SITUASI	<p>5. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data peserta didik laki-laki dan perempuan di PAUD Kabupaten Dharmasraya Laki-laki = 590 siswa, Perempuan = 560 siswa - Jumlah peserta didik PAUD laki-laki dan perempuan yang menerima Biaya Personil (Seragam Sekolah) Laki-laki : 590 siswa, Perempuan : 560 siswa <p>6. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>g. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses :</p> <p>Belum semua siswa yang mendapatkan biaya personal (Seragam Sekolah)</p> <p>Kontrol:</p> <p>Masyarakat khususnya siswa baru di jenjang pendidikan sekolah dasar</p> <p>h. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pembelajaran dan Kebudayaan, Nomor. 052/ C/ Kep/ D/ 82 "Sekolah secara formal berhak memakai seragam sekolah terhadap siswanya dengan bermacam alasan karena seragam sekolah ialah suatu perlengkapan menciptakan kerapian, ketertiban serta keteraturan siswa dalam melakukan aktivitas pembelajaran. <u>Seragam sekolah sebagai penghilang kesenjangan antara kelas ekonomi dari siswa yang dari berbagai elemen</u>" - Data yang terverifikasi belum lengkap <p>i. Penyebab Eksternal</p> <p>Belum semua masyarakat menerima seragam sekolah baru</p>
CAPAIAN PROGRAM	<p>5. Tolak Ukur</p> <p>Terlaksananya bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa laki-laki dan perempuan</p> <p>6. Indikator dan Target Kinerja</p> <p>Jumlah peserta didik PAUD laki-laki dan perempuan yang mendapatkan bantuan</p>

	perlengkapan sekolah Output : Jumlah peserta didik PAUD laki-laki dan perempuan yang tidak mendapatkan bantuan biaya personil (seragam yang menerima bantuan perlengkapan sekolah Outcome : Meningkatnya kesejahteraan peserta didik PAUD laki-laki dan perempuan																
JUMLAH ANGGAUN PROGRAM	Rp Rp 37.500.000,-																
RENCANA AKSI	<table border="1"> <tr> <td>Kegiatan 1</td> <td>Pendataan dan verifikasi data.</td> </tr> <tr> <td>Masukan-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Keluaran</td> <td>Jumlah peserta didik PAUD laki-laki dan perempuan</td> </tr> <tr> <td>Hasil</td> <td>Terverifikasinya data peserta didik PAUD laki-laki dan perempuan</td> </tr> <tr> <td>Kegiatan 2</td> <td>Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa</td> </tr> <tr> <td>Masukan</td> <td>Rp Rp 287.500.000-</td> </tr> <tr> <td>Keluaran</td> <td>Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa</td> </tr> <tr> <td>Hasil</td> <td>Terlaksananya Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa</td> </tr> </table>	Kegiatan 1	Pendataan dan verifikasi data.	Masukan-		Keluaran	Jumlah peserta didik PAUD laki-laki dan perempuan	Hasil	Terverifikasinya data peserta didik PAUD laki-laki dan perempuan	Kegiatan 2	Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa	Masukan	Rp Rp 287.500.000-	Keluaran	Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa	Hasil	Terlaksananya Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa
Kegiatan 1	Pendataan dan verifikasi data.																
Masukan-																	
Keluaran	Jumlah peserta didik PAUD laki-laki dan perempuan																
Hasil	Terverifikasinya data peserta didik PAUD laki-laki dan perempuan																
Kegiatan 2	Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa																
Masukan	Rp Rp 287.500.000-																
Keluaran	Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa																
Hasil	Terlaksananya Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa																

Pulau Punjung, Junj 2024

Kepala,



Tim Verifikasi

<p>Drs. ANDY SUMANTO, CfrA NIP 19681220 199009 1 001</p>	<p>Kepala BKD ASRIL AP., M.Si NIP 19750225 199501 1 001</p>	<p>Kepala Bapppeda H. PARYANTO, S.Sos., M.T NIP 19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial P3A PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut.M.M NIP. 19790905 200801 1 018</p>
--	---	---	---

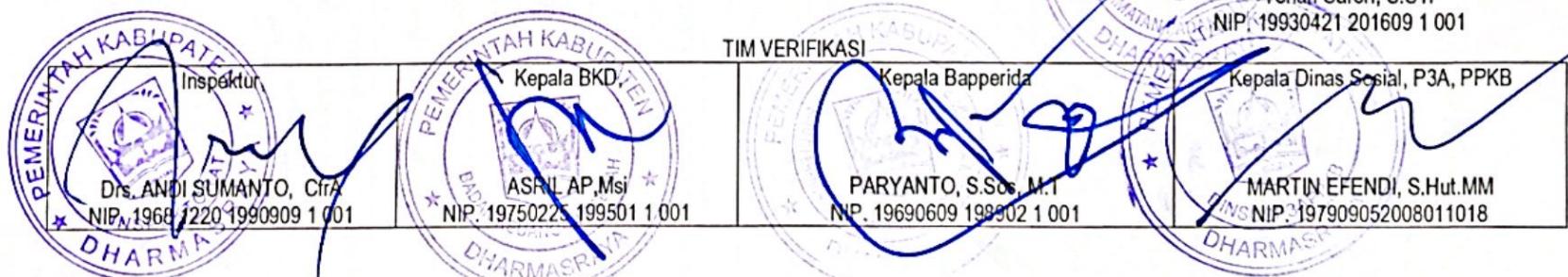
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 2
Mengatasi Kesenjangan Gender

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Penyelenggaran Pemerintahan Dan Pelayanan Publik KEGIATAN: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat TUJUAN: Ketepatan Layanan Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP	Data Pembuka Wawasan Adanya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)		Isu Gender		Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan			Monitoring
		Faktor Kesenjangan <u>Akses :</u> Belum adanya akses jalan yang nyaman untuk disabilitas	Sebab Kesenjangan Internal <ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya sarana operasional {kursi Roda} - Masih kurangnya jalur khusus disabilitas. - Masih kurangnya koordinasi dengan lintas sector. 	Sebab Kesenjangan Eksternal Masih rendahnya kesadaran penyandang disabilitas dalam mengurus kelengkapan sebagai warga negara	Reformulasi Tujuan Terpenuhinya layanan bagi seluruh lapisan masyarakat	Rencana Aksi Menyediakan kursi roda untuk penyandang disabilitas sebanyak 3 unit Menambah jalur khusus untuk disabilitas untuk mempermudah akses layan	Data Dasar (Baseline) Jumlah Layanan Paten 2023 Non Disabilitas 205 org Disabilitas 6 orang	Indikator Gender 1.a Output : Tersedianya pengadaan Kursi roda bagi penyandang disabilitas sebanyak 3buah Input : Rp. 2.000.000,- Outcome: Terlaksananya Pengadaan kursi roda untuk penyandang disabilitas
		<u>Partisipasi :</u> Masih rendah partisipasi disabilitas dalam mengurus layanan ke kantor camat			Meningkat koordinasi dengan lintas sector	Jumlah Data Disabilitas dikecamatan Padang Laweh 20 orang Meningkatnya keluarga yang membawa penyandang Disabilitas mengurus pelayanan		2.a Output Tersedianya penambahan jalur disabilitas Input : Rp. 3..500.000,- Outcome : Terlaksananya penambahan jalur disabilitas
		<u>Manfaat :</u> Disabilitas belum merasakan manfaat layanan perizinan dan non perizinan						

SASARAN Meningkatkan kinerja penyelenggara an tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	<u>Kontrol</u> Belum terakomodisnya kebutuhan disabilitas dalam pengambilan keputusan/kebijakan				3.a Output : Terlaksananya koordinasi dengan lintas sector Input : Rp. 500.000,- Outcome : Meningkatnya Sinergi/Koordinasi Lintas Sektor 4.a Output : Terlaksananya sosialisasi bagi kepada masyarakat dan penyandang disabilitas Input : Rp. 2.000.000,- Outcome: Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya layanan bagi penyandang disabilitas
---	---	--	--	--	--

Padang Laweh, 26 Juni 2024
Plt. CAMAT PADANG LAWEH

Yohan Sarori, S.STP
NIP. 19930421 201609 1 001



FORMAT GBS(2)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

(GENDER BUDGET STATEMENT)

Mengatasi Kesenjangan Gender

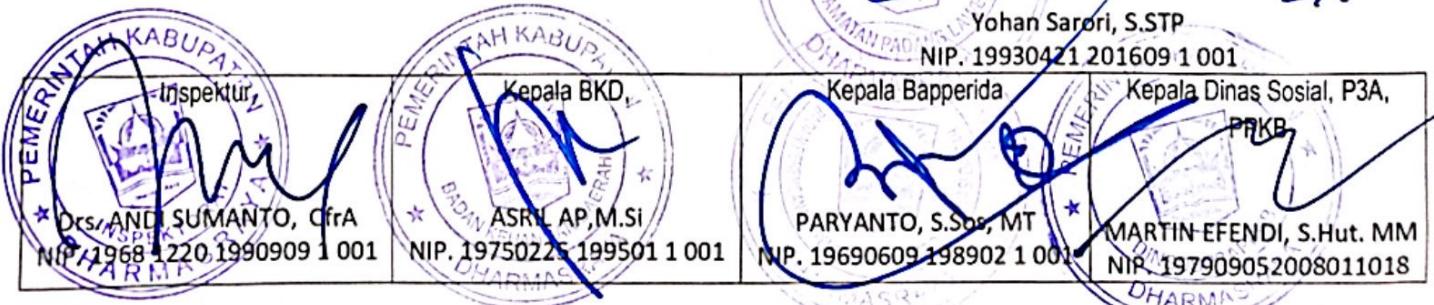
SKPD : KECAMATAN PADANG LAWEH
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																																									
KODE PROGRAM	7.01.02																																									
KEGIATAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																																									
HASIL/OUTPUT	Terpenuhinya layanan untuk penyandang Disabilitas																																									
ANALISIS SITUASI	<p>1. Gender Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) b. Jumlah Layanan Paten 2023 , Non Disabilitas 205 org, Disabilitas 6 orang c. Jumlah Data Disabilitas dikecamatan Padang Laweh, sebanyak 20 orang <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belum adanya akses jalan yang nyaman untuk disabilitas b. Belum tersedianya kursi roda 																																									
RENCANA AKSI	<table border="1"> <tr> <td>Komponen/ Aktifitas 1</td> <td colspan="2">(Diambil dari GAP langkah 7)</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td colspan="2">Menyediakan Kursi Roda untuk penyandang disabilitas</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td colspan="2">Rp.2.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Komponen/ aktifitas 2</td> <td colspan="2">(Diambil dari GAP langkah 7)</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td colspan="2">Menambah jalur khusus untukd isabilitas</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td colspan="2">Rp.3.500.000,-</td> </tr> <tr> <td>Komponen/ aktifitas 3</td> <td colspan="2">(Diambil dari GAP langkah 7)</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td colspan="2">Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sector</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td colspan="2">Rp.500,000,-</td> </tr> <tr> <td>Komponen/ aktifitas 4</td> <td colspan="2">(Diambil dari GAP langkah 7)</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td colspan="2">Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan penyandang disabilitas</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td colspan="2">Rp.2.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Total anggaran</td> <td colspan="2">Rp.8.000.000,-</td> </tr> </table>			Komponen/ Aktifitas 1	(Diambil dari GAP langkah 7)		Tujuan	Menyediakan Kursi Roda untuk penyandang disabilitas		Alokasi Anggaran	Rp.2.000.000,-		Komponen/ aktifitas 2	(Diambil dari GAP langkah 7)		Tujuan	Menambah jalur khusus untukd isabilitas		Alokasi Anggaran	Rp.3.500.000,-		Komponen/ aktifitas 3	(Diambil dari GAP langkah 7)		Tujuan	Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sector		Alokasi Anggaran	Rp.500,000,-		Komponen/ aktifitas 4	(Diambil dari GAP langkah 7)		Tujuan	Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan penyandang disabilitas		Alokasi Anggaran	Rp.2.000.000,-		Total anggaran	Rp.8.000.000,-	
Komponen/ Aktifitas 1	(Diambil dari GAP langkah 7)																																									
Tujuan	Menyediakan Kursi Roda untuk penyandang disabilitas																																									
Alokasi Anggaran	Rp.2.000.000,-																																									
Komponen/ aktifitas 2	(Diambil dari GAP langkah 7)																																									
Tujuan	Menambah jalur khusus untukd isabilitas																																									
Alokasi Anggaran	Rp.3.500.000,-																																									
Komponen/ aktifitas 3	(Diambil dari GAP langkah 7)																																									
Tujuan	Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sector																																									
Alokasi Anggaran	Rp.500,000,-																																									
Komponen/ aktifitas 4	(Diambil dari GAP langkah 7)																																									
Tujuan	Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan penyandang disabilitas																																									
Alokasi Anggaran	Rp.2.000.000,-																																									
Total anggaran	Rp.8.000.000,-																																									
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Terciptanya Layanan PATEN Kecamatan yang responsif gender																																									

Padang Laweh, 26 Juni 2024

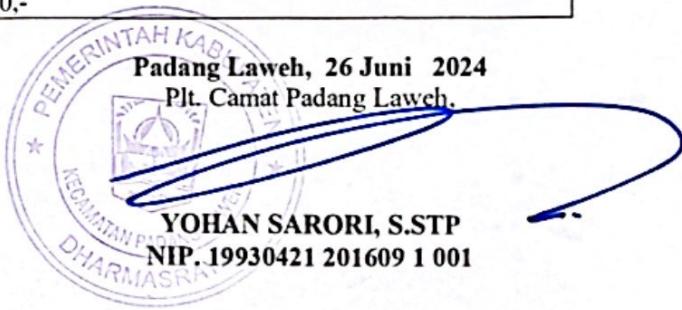
Plt. Camat Padang Laweh,

Yohan Sarori, S.STP
NIP. 19930421 201609 1 001



FORM KAK/ TOR

Program		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Program		Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
Sub Kegiatan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Non Perizinan
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
	Gambaran Umum	Kebutuhan Sarana Prasarana Layanan Disabilitas
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Adanya Pelayanan Admnistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
	Indikator Kinerja	Jumlah layanan Non perizinan yang dikeluarkan
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Meningkatkan Pelayanan Admnistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Pengadaan Langsung
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kecamatan Padang Laweh
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Non Perizinan Penanggung Jawab : Camat Padang Laweh
Jadwal		Bulan April 2025
Biaya		Rp. 8.000.000,-

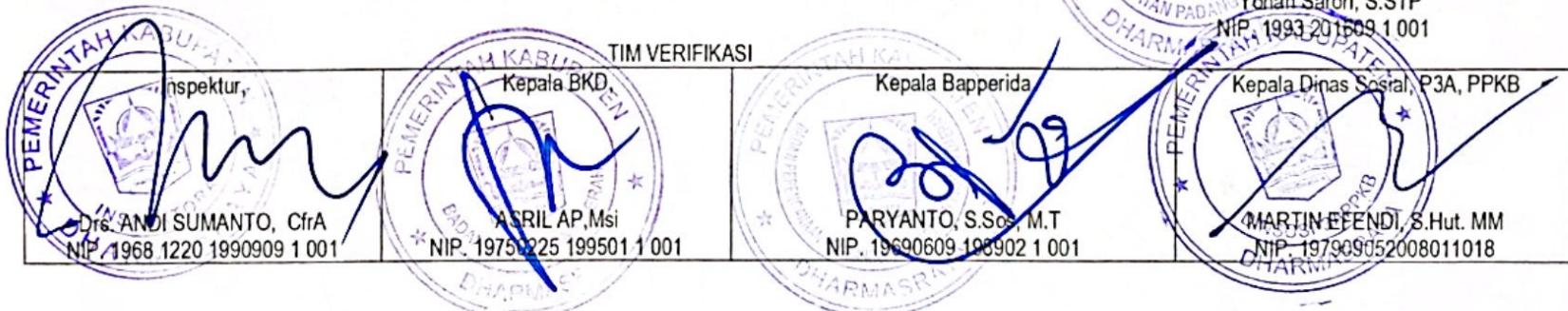


GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 1
Mengatasi Kesenjangan Gender

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
KEGIATAN: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya	Faktor Kesenjangan <u>Akses :</u> <u>Partisipasi :</u> Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang	Sebab Kesenjangan Internal - belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang	Sebab Kesenjangan Eksternal - Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang - Sedikitnya jumlahkuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan	Reformulasi Tujuan Terumuskan -nya usulan program Perioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2025 yang responsif gender	Rencana Aksi Mengumpulkan DURKP Nagari Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan Distribusi undangan ke nagari	Data Dasar (Baseline) Meningkatnya kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur Tersusunnya usulan prioritas kecamatan	Indikator Gender 7.a Output : Tersedianya data DURKP dan data usulan prioritas kecamatan Input : Rp. 1.075.000,- Outcome : Tersusunnya data usulan musrenbang kecamatan 7b.Output Tersalurnya undangan musrenbang Input : Rp. 500.000
TUJUAN: Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang serta keterwakilan forum anak Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang Tahun 2021 : 80 org Tahun 2022 : 80 org Tahun 2023 : 80 org Tahun 2024 : 80 org	 <u>Manfaat :</u> Belum semua masyarakat (perempuan) mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang	 Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta Musrenban		 Menjalin koordinasi dan Sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar			

SASARAN Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Tahun 2023, dari 80 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 50 orang peserta laki-laki dan 24 Orang peserta perempuan dan 6 Orang peserta dari forum anak Tahun 2024 dari 80 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 58 orang peserta laki-laki dan 22 Orang peserta perempuan	Kontrol Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya	- Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang - Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan	Sosial Budaya Minang kabau, dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat	Mekomendasikan ke Bappeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang Melakukan sosialisasi internal tentang penting keterwakilan perempuan di musrenbang	Meningkatnya usulan Peserta Laki-laki 16 % dan perempuan meningkat dari 0 % menjadi 3%	Outcome Tersiarnya acara musrenbang 7c. Output Jumlah koordinasi dan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perencanaan musrenbang Input: Rp. 8.400.000- Outcome: Meningkatnya pemahaman tentang perencanaan pembangunan
---	---	---	--	---	---	--	--

Padang Laweh, 26 Juni 2024
Pit. CAMAT PADANG LAWEH



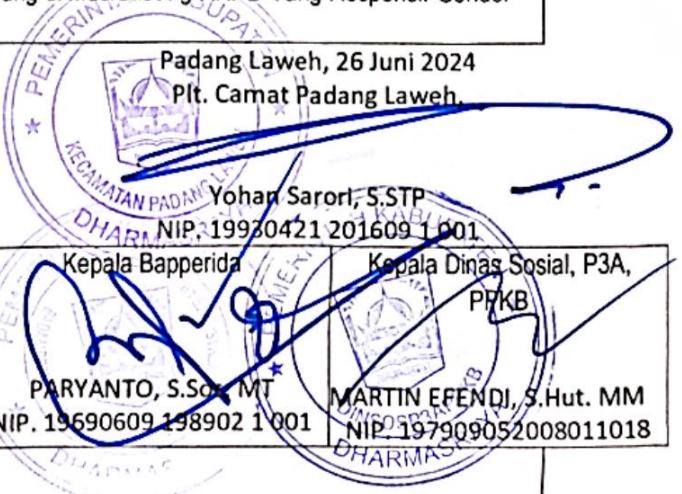
FORMAT GBS (1)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) Mengatasi Kesenjangan Gender																									
SKPD TAHUN ANGGARAN	: KECAMATAN PADANG LAWEH : 2025																								
PROGRAM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																								
KODE PROGRAM	7.01.03																								
KEGIATAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																								
HASIL/OUTPUT	Terumuskan-nya usulan program Perioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2025 yang responsif																								
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender). Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya,</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang b. Tahun 2023 dari 80 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 50 orang peserta laki-laki dan 24 Orang peserta perempuan , dan 6 orang peserta dari forum anak c. Tahun 2024 dari 80 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 50 orang peserta laki-laki dan 2 Orang peserta perempuan <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang b. belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang c. Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang 																								
RENCANA AKSI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top; padding: 5px;">Komponen/ Aktifitas 1</td> <td colspan="2" style="width: 70%; padding: 5px;">(Diambil dari GAP langkah 7)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;">Tujuan</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Mengumpulkan dan merekap DURKP Nagari</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;">Alokasi Anggaran</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Rp. 1.075.000</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;">Komponen/ Aktifitas 2</td> <td style="width: 30%; vertical-align: top; padding: 5px;">Tujuan</td> <td style="width: 70%; padding: 5px;">Distribusi undangan ke nagari</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;">Alokasi Anggaran</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Rp. 500.000</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;">Komponen/ Aktifitas 3</td> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;">Tujuan</td> <td style="padding: 5px;">Menjalin koordinasi dan Sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;"></td> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;">Alokasi Anggaran</td> <td style="padding: 5px;">8.400.000,-</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;"></td> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;">Total Anggaran</td> <td style="padding: 5px;">Rp.9.975.000</td> </tr> </table>	Komponen/ Aktifitas 1	(Diambil dari GAP langkah 7)		Tujuan	Mengumpulkan dan merekap DURKP Nagari		Alokasi Anggaran	Rp. 1.075.000		Komponen/ Aktifitas 2	Tujuan	Distribusi undangan ke nagari	Alokasi Anggaran	Rp. 500.000		Komponen/ Aktifitas 3	Tujuan	Menjalin koordinasi dan Sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar		Alokasi Anggaran	8.400.000,-		Total Anggaran	Rp.9.975.000
Komponen/ Aktifitas 1	(Diambil dari GAP langkah 7)																								
Tujuan	Mengumpulkan dan merekap DURKP Nagari																								
Alokasi Anggaran	Rp. 1.075.000																								
Komponen/ Aktifitas 2	Tujuan	Distribusi undangan ke nagari																							
Alokasi Anggaran	Rp. 500.000																								
Komponen/ Aktifitas 3	Tujuan	Menjalin koordinasi dan Sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar																							
	Alokasi Anggaran	8.400.000,-																							
	Total Anggaran	Rp.9.975.000																							
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RKPD Yang Responsif Gender																								

Padang Laweh, 26 Juni 2024

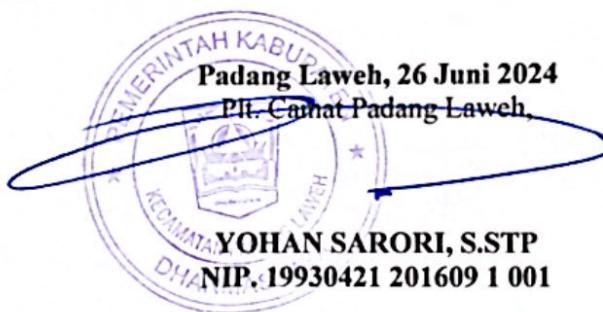
Plt. Camat Padang Laweh.

Yohan Sarori, S.STP



FORM KAK/ TOR

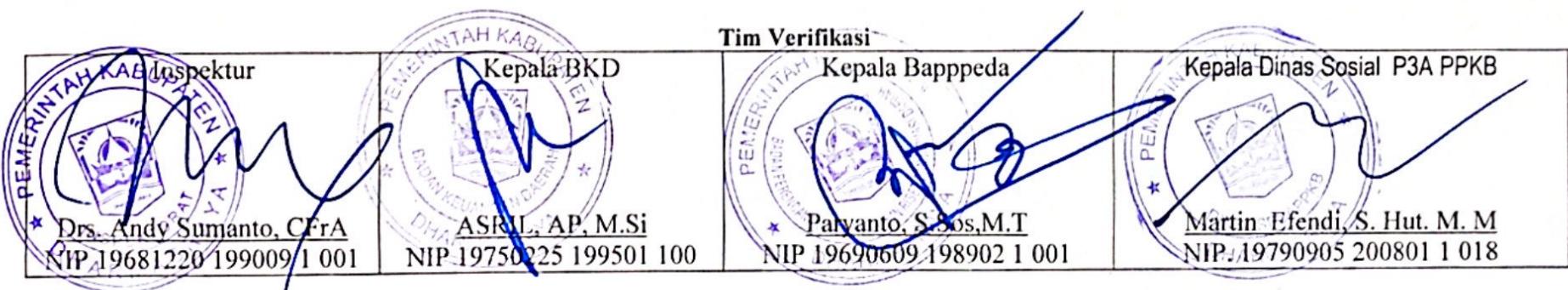
Program		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan
Sasaran Program		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan
Kegiatan		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan Di Desa
Latar Belakang	Dasar Hukum	Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 000.7.2/34/Bapppeda tanggal 16 Februari 2024 perihal Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan
	Gambaran Umum	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang
	Indikator Kinerja	Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Merumuskan Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Mengundang utusan nagari dan stakeholder terkait untuk merumuskan usulan prioritas musrenbang kecamatan dalam satu ruang dan waktu yang telah ditentukan.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kecamatan Padang Laweh
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan Di Desa Penanggung Jawab : Camat Padang Laweh
Jadwal		Bulan Februari 2025
Biaya		Rp. 9.975.000,-



MATRIX GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (SERVICE DELIVERY)

OPD : RSUD SUNGAI DAREH

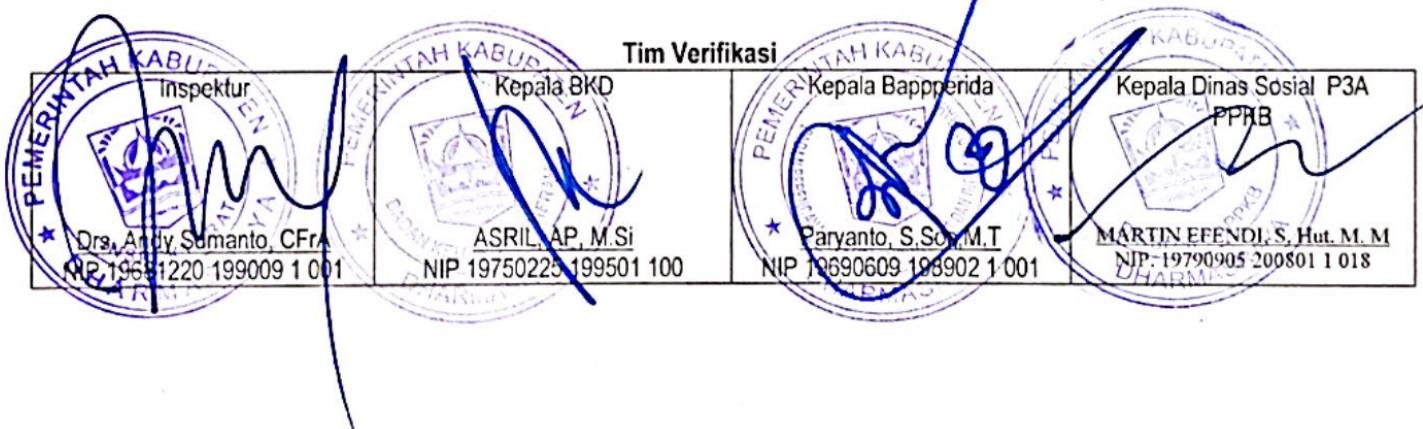
Pekerjaan : Pemeliharaan Rutin Gedung RS	Kontrol : Pemahaman dan kesadaran manajemen rumah sakit belum optimal.						Outcome : Meningkatnya keselamatan pasien di RSUD Sungai Dareh
Tujuan : Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit							



GENDER BUDGET STATEMENT
(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)

SKPD	: RSUD Sungai Dareh		
TAHUN ANGGARAN	: 2025		
PROGRAM	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat		
KODE PROGRAM	1.02.02		
KEGIATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
HASIL/OUTPUT	Terlaksananya pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap rawat inap : Rawat Inap Bedah, Rawat Inap Penyakit Dalam, Rawat Inap Perinatologi, Rawat Inap Anak, Rawat Inap Kebidanan, Rawat Inap Paru, Rawat Inap HCU, Rawat Inap Isolasi dan Rawat Inap VIP		
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Salah satu indikator penilaian Akreditasi rumah sakit adalah indikator keselamatan pasien, yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung keselamatan pasien. b. Pemeliharaan rutin gedung RS merupakan pemeliharaan terhadap gedung RS untuk peningkatan pelayanan kepada pasien yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana c. Jumlah kunjungan pasien rawat inap : <ul style="list-style-type: none"> Tahun 2021 laki-laki 2.922 dan perempuan 3.765 Tahun 2022 laki-laki 4.392 dan perempuan 4.758 Tahun 2023 laki-laki 4.199 dan perempuan 5168 <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Faktor Kesenjangan Dengan belum tersedianya sarana berupa WC duduk untuk pasien rawat inap untuk pasien disabilitas, lansia, ibu hamil dan ibu melahirkan akan menimbulkan kesenjangan dilihat dari aspek berikut : <p>Akses : Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana</p> <p>Manfaat : Meningkatkan mutu pelayanan terutama keselamatan pasien di ruang rawat inap.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Penyebab Internal c. Belum pahamnya konsep gender pada waktu perencanaan pembangunan gedung d. Belum adanya survey yang memuat indikator sarana untuk pasien disabilitas, lansia, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan e. Penyebab Eksternal f. Konsultan perencana belum memahami pembangunan gedung berbasis gender g. Masyarakat belum memahami konsep gender 		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Tujuan	pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap

		Alokasi Anggaran	Rp.125.000.000,-
Komponen/ aktivitas 2	Tujuan		
	Alokasi Anggaran		
Total anggaran		Rp. 125.000.000,-	
CAPAIAN PROGRAM	<p>Output :</p> <p>Terlaksananya pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap : Rawat Inap Bedah, Rawat Inap Penyakit Dalam, Rawat Inap Perinatologi, Rawat Inap Anak, Rawat Inap Kebidanan, Rawat Inap Paru, Rawat Inap HCU, Rawat Inap Isolasi, Rawat Inap Syaraf dan Rawat Inap VIP</p> <p>Outcome :</p> <p>Meningkatnya keselamatan pasien lansia, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan di RSUD Sungai Dareh</p>		



FORM KAK/ TOR

Program		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat
Sasaran Program		Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terintegrasi
Kegiatan		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.
	Gambaran Umum	Subkegiatan operasional pelayanan rumah sakit dan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Gedung RS dilaksanakan setiap tahunnya.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap
	Indikator Kinerja	Meningkatnya keselamatan pasien lansia, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan di RSUD Sungai Dareh
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien di RSUD Sungai Dareh.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Membuat perencanaan kegiatan dan pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap : Rawat Inap Bedah, Rawat Inap Penyakit Dalam, Rawat Inap Perinatologi, Rawat Inap Anak, Rawat Inap Kebidanan, Rawat Inap Paru, Rawat Inap HCU, Rawat Inap Isolasi dan Rawat Inap VIP
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		RSUD Sungai Dareh.
Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan		Pelaksana : PPTK pekerjaan pemeliharaan rutin rumah sakit. Penanggung Jawab : Direktur RSUD Sungai Dareh
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 125.000.000,-

Punjung, 20 Juni 2024
 Direktur RSUD Sungai Dareh



RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025

Urusan :						
Unit Organisasi	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh				
Sub Unit Organisasi	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh				
Program	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
Kegiatan	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan	1.02.02.2.02.32	Operasional pelayanan rumah sakit				
Sumber Pendanaan		BLUD				
Lokasi Kegiatan		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh				
Waktu Pelaksanaan		Januari s/d Desember 2025				
Kelompok Sasaran						
Jumlah 2022		Rp. 125.000.0000,-				
Jumlah 2023						
Jumlah 2024						
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja				
Capaian Program Masukan Keluaran Hasil						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Hitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah

Punjung, 20 Juni 2024
 Direktur RSUD Sungai Dareh

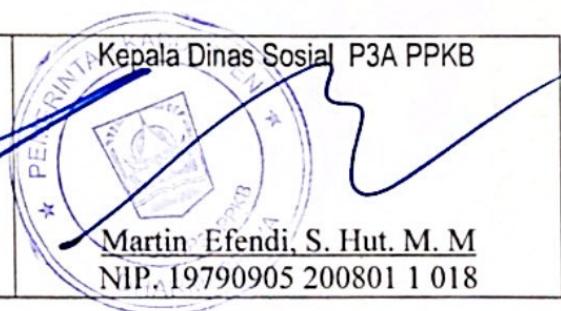
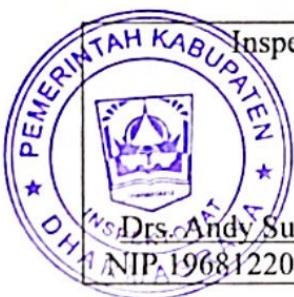


MATRIX GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (SERVICE DELIVERY)

OPD : RSUD SUNGAI DAREH

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
<u>Program :</u> Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat <u>Kegiatan :</u> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota <u>Sub Kegiatan:</u> Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1. Pemeliharaan rutin gedung RS merupakan pemeliharaan terhadap gedung RS untuk peningkatan pelayanan kepada pasien yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana 2. Jumlah kunjungan pasien : Tahun 2021 laki-laki 2.922 dan perempuan 3.765 Tahun 2022 laki-laki 4.392 dan perempuan 4.758 Tahun 2023 laki-laki 4.199 dan perempuan 5168	Faktor Kesenjangan <u>Akses :</u> Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana <u>Manfaat :</u> Meningkatkan mutu pelayanan terutama keselamatan pasien di rumah sakit <u>Partisipasi :</u> Seluruh pasien lansia, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan	Sebab Kesenjangan Internal 1. Belum pahamnya konsep gender pada waktu perencanaan pembangunan gedung berbasis gender Belum adanya survey yang memuat indikator pasien lansia, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan	Sebab Kesenjangan Eksternal 1. Konsultan perencana belum memahami pembangunan gedung berbasis gender 2. Masyarakat belum memahami konsep gender	Reformulasi Tujuan Peningkatan mutu pelayanan, dengan menyediakan sarana yang responsif gender	RencanaAksi Pemeliharaan gedung rumah sakit	Data Dasar (Baseline) Jumlah kunjungan pasien rawat inap : Tahun 2021 laki-laki 2.922 dan perempuan 3.765 Tahun 2022 laki-laki 4.392 dan perempuan 4.758 Tahun 2023 laki-laki 4.199 dan perempuan 5168	Indikator Gender <u>Output :</u> Terlaksananya pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap Rawat Inap Bedah, Rawat Inap Penyakit Dalam, Rawat Inap Perinatologi, Rawat Inap Anak, Rawat Inap Kebidanan, Rawat Inap Paru, Rawat Inap HCU, Rawat Inap Isolasi dan Rawat Inap VIP

Pekerjaan : Pemeliharaan Rutin Gedung RS	Kontrol : Pemahaman dan kesadaran manajemen rumah sakit belum optimal.						Outcome : Meningkatnya keselamatan pasien di RSUD Sungai Dareh
--	--	--	--	--	--	--	---



Tim Verifikasi

GENDER BUDGET STATEMENT
(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)

SKPD TAHUN ANGGARAN	: RSUD Sungai Dareh : 2025		
PROGRAM	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat		
KODE PROGRAM	1.02.02		
KEGIATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
HASIL/OUTPUT	Terlaksananya pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap rawat inap : Rawat Inap Bedah, Rawat Inap Penyakit Dalam, Rawat Inap Perinatologi, Rawat Inap Anak, Rawat Inap Kebidanan, Rawat Inap Paru, Rawat Inap HCU, Rawat Inap Isolasi dan Rawat Inap VIP		
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</p> <p>a. Salah satu indikator penilaian Akreditasi rumah sakit adalah indikator keselamatan pasien, yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung keselamatan pasien.</p> <p>b. Pemeliharaan rutin gedung RS merupakan pemeliharaan terhadap gedung RS untuk peningkatan pelayanan kepada pasien yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana</p> <p>c. Jumlah kunjungan pasien rawat Inap :</p> <p>Tahun 2021 laki-laki 2.922 dan perempuan 3.765 Tahun 2022 laki-laki 4.392 dan perempuan 4.758 Tahun 2023 laki-laki 4.199 dan perempuan 5168</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Dengan belum tersedianya sarana berupa WC duduk untuk pasien rawat inap untuk pasien disabilitas, lansi, ibu hamil dan ibu melahirkan akan menimbulkan kesenjangan dilihat dari aspek berikut :</p> <p>Akses : Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana</p> <p>Manfaat : Meningkatkan mutu pelayanan terutama keselamatan pasien di ruang rawat inap.</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <p>c. Belum pahamnya konsep gender pada waktu perencanaan pembangunan gedung</p> <p>d. Belum adanya survey yang memuat indikator sarana untuk pasien disabilitas, lansia, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan</p> <p>e. Penyebab Eksternal</p> <p>f. Konsultan perencana belum memahami pembangunan gedung berbasis gender</p> <p>g. Masyarakat belum memahami konsep gender</p>		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Tujuan	pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap

		Alokasi Anggaran	Rp.125.000.000,-
Komponen/ aktifitas 2	Tujuan		
	Alokasi Anggaran		
Total anggaran		Rp. 125.000.000,-	
CAPAIAN PROGRAM	<p>Output : Terlaksananya pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap : Rawat Inap Bedah, Rawat Inap Penyakit Dalam, Rawat Inap Perinatologi, Rawat Inap Anak, Rawat Inap Kebidanan, Rawat Inap Paru, Rawat Inap HCU, Rawat Inap Isolasi, Rawat Inap Syaraf dan Rawat Inap VIP</p> <p>Outcome : Meningkatnya keselamatan pasien lansia, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan di RSUD Sungai Dareh</p>		

Punjung, 20 Juni 2024

Direktur RSUD Sungai Dareh

Sarti Novita, S.Si, APT M. KM

NIP. 19771117 200501 2 008

Tim Verifikasi

Inspektor Drs. Andy Sumanto, CFrA NIP. 19681220 199009 1 001	Kepala BKD ASRIL, AP, M.Si NIP. 19700225 199501 100	Kepala Bapperida Daryanto, S.Sos.M.T NIP. 19690609 199902 1 001	Kepala Dinas Sosial P3A PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut, M.M NIP. 19790905 200801 1 018
--	---	---	--

FORM KAK/ TOR

Program		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat
Sasaran Program		Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terintegrasi
Kegiatan		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.
	Gambaran Umum	Subkegiatan operasional pelayanan rumah sakit dan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Gedung RS dilaksanakan setiap tahunnya.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap
	Indikator Kinerja	Meningkatnya keselamatan pasien lansia, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan di RSUD Sungai Dareh
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien di RSUD Sungai Dareh.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Membuat perencanaan kegiatan dan pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap : Rawat Inap Bedah, Rawat Inap Penyakit Dalam, Rawat Inap Perinatologi, Rawat Inap Anak, Rawat Inap Kebidanan, Rawat Inap Paru, Rawat Inap HCU, Rawat Inap Isolasi dan Rawat Inap VIP
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		RSUD Sungai Dareh.
Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan		<p>Pelaksana : PPTK pekerjaan pemeliharaan rutin rumah sakit. Penanggung Jawab : Direktur RSUD Sungai Dareh</p>
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 125.000.000,-

Punjung, 20 Juni 2024

Direktur RSUD Sungai Dareh



Sari Novita, S.Si, APT M. KM

NIP. 19771117 200501 2 008

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025

Urusan :						
Unit Organisasi	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh				
Sub Unit Organisasi	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh				
Program	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
Kegiatan	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan	1.02.02.2.02.32	Operasional pelayanan rumah sakit				
Sumber Pendanaan		BLUD				
Lokasi Kegiatan		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh				
Waktu Pelaksanaan		Januari s/d Desember 2025				
Kelompok Sasaran						
Jumlah 2022		Rp. 125.000.000,-				
Jumlah 2023						
Jumlah 2024						
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja				
Capaian Program Masukan Keluaran Hasil						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Hitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah



MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat (Service delivery)

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

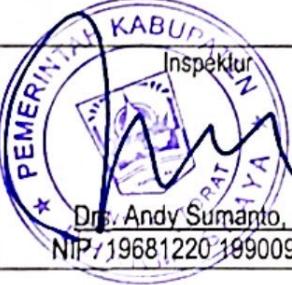
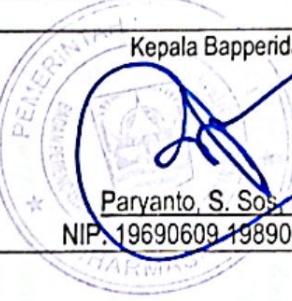
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-Dalam Operasi penertiban Penegakan Peraturan Daerah, pada umumnya yang terjerang adalah perempuan	Akses : Kegiatan Operasi penegakan Perda dan Perkada yang belum maksimal Partisipasi: Masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam menjaga Ketenteraman dan ketertiban umum Kontrol: Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya laki-laki yang seharusnya lebih banyak diberi penyuluhan tentang dampak dan bahaya Penyakit Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya Sosialisasi tentang Perda dan Perkada Pemahaman SDM yang kurang tentang Pengarusutamaan Gender 	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya alokasi dana terhadap kegiatan Penegakan Perda dan Perkada Masih kurangnya Sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan Daerah 	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan Sosialisasi Perda dan Perkada di 11 Kecamatan Meningkatkan jumlah Operasi Penegakan Perda dan Perkada 	Berkurangnya Pelanggaran Perda dan Perkada	Out put Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-Pedagang kakilima mayoritas perempuan -Adanya laporan masyarakat tentang wanita penghibur yang ada di cafe-cafe dan tempat hiburan malam	 Manfaat : Kurangnya Sosialisasi penyuluhan dan pembinaan dari pihak-pihak terkait tentang Perda dan Perkada						Input Rp. 87.000.000,- Out come Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota								
Tujuan : Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum								
Sasaran : Operasi Penyakit Masyarakat								

Pulau Punjung, Juni 2024

Plt. KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
 KABUPATEN DHARMASRAYA,



Tim Verifikasi

 <p>Inspektor Drs. Andy Sumanto, Cfra NIP. 19681220 199009 1 001</p>	 <p>Kepala BKD Asri AP, M. Si NIP. 19750225 199501 1 001</p>	 <p>Kepala Bapperida Paryanto, S. Sos. M.T NIP. 19690609 198902 1 001</p>	 <p>Kepala Dinas Sosial P3A PPKB MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19820521 200012 1 002</p>
---	---	--	--

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
KODE PROGRAM	1.05.02	
KEGIATAN	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
HASIL/OUTPUT	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dalam Operasi penertiban Penegakan Peraturan Daerah, pada umumnya yang terjaring adalah perempuan b) Pedagang kakilima mayoritas perempuan c) Adanya laporan masyarakat tentang wanita penghibur yang ada di cafe-cafe dan tempat hiburan malam. <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Faktor Kesenjangan Akses : Kegiatan Operasi penegakan Perda dan Perkada yang belum maksimal <p>Partisipasi: Masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam menjaga Ketenteraman dan ketertiban umum</p> <p>Kontrol: Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya laki-laki yang seharusnya lebih banyak diberi penyuluhan tentang dampak dan bahaya Penyakit Masyarakat.</p> <p>Manfaat : Kurangnya Sosialisasi penyuluhan dan pembinaan dari pihak-pihak terkait tentang Perda dan Perkada</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Penyebab Internal <ul style="list-style-type: none"> a) Kurangnya Sosialisasi tentang Perda dan Perkada b) Pemahaman SDM yang kurang tentang Pengarusutamaan Gender c. Penyebab Eksternal <ul style="list-style-type: none"> a) Masih rendahnya alokasi dana terhadap kegiatan Penegakan Perda dan Perkada b) Masih kurangnya Sosialisasi tentang Peraturan Daerah c) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan Daerah 	
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Meningkatkan Sosialisasi Perda dan Perkada di 11 Kecamatan
	Tujuan	Perempuan lebih memahami tentang Perda dan Perkada
	Alokasi Anggaran	
	Komponen/ Aktifitas 2	Meningkatkan Jumlah Operasi Penegakan Perda dan Perkada
	Tujuan	Memberikan efek jera kepada terhadap pelanggar Perda dan Perkada
	Alokasi Anggaran	Rp. 87.000.000,-
	Total Anggaran	Rp.87.000.000,-

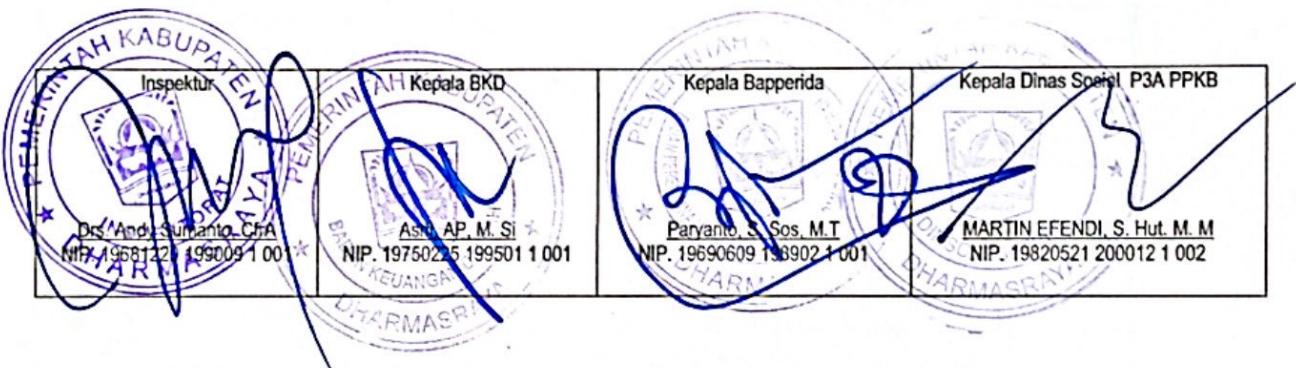
Capaian Program	Out put Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Out come Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
------------------------	--

Pulau Punjung, Juni 2024

PI. KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN DHARMASRAYA,



Tim Verifikasi



FORM KAK/ TOR

Program		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sasaran Program		Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Sub Kegiatan		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat 2. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi dan Pembebanan Biaya Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Gambaran Umum	Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Sosialisasi Perda dan Perkada di 11 Kecamatan
	Indikator Kinerja	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di 11 Kecamatan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Sosialisasi Perda dan Perkada kepada Masyarakat
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		11 Kecamatan
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Penanggung Jawab : Kepala Satpol PP dan Damkar
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 87.000.000,-

Pulau Punjung, Juni 2024



MATRIX GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat (Service delivery)

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dalam Operasi penertiban Pelajar, yang terjaring kebanyakan siswa laki-laki dibanding perempuan.	Akses : <i>Masih kurangnya manfaat Kegiatan Patroli Rutin Satpol PP pelajar laki-laki dibandingkan dengan pelajar perempuan.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Patroli rutin Saatpol PP yang masih belum mencapai target SPM. 	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya alokasi dana terhadap kegiatan Patroli Satpol PP 	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan persentase Sosialisasi dan penyuluhan terhadap siswa laki-laki Meningkatkan Patroli rutin Satpol PP 	Berkurangnya Pelajar laki-laki yang berkeliaran pada jam pelajaran	Out put <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Patroli Rutin Satpol PP terutama pada Pelajar yang tidak masuk pada jam pelajaran Input : Rp. 253.000.000,- Out Come : Meningkatnya keamanan kenyamanan lingkungan dan
Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Siswa yang terjaring kedapatan merokok	Partisipasi: <i>Masih rendahnya keikutsertaan masyarakat tentang penyakit dalam menjaga Ketenteraman dan ketertiban umum</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pemahaman SDM yang kurang tentang Pengarusutamaan Gender 	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya Pengawasan bersama baik pihak keluarga maupun sekolah Peraturan sekolah tentang kedisiplinan siswa Kurangnya peran masyarakat tentang pengawasan bersama terhadap anak sekolah 				
Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli.	Adanya laporan masyarakat tentang siswa yang berkeliaran pada jam pelajaran diindikasikan menggunakan / menghisap tembakau.	Kontrol: <i>Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya laki-laki yang seharusnya lebih banyak diberi penyuluhan tentang dampak dan bahaya Penyakit Masyarakat.</i>						
		Manfaat : <i>Kurangnya Sosialisasi penyuluhan dan pembinaan dari pihak-pihak terkait tentang</i>						

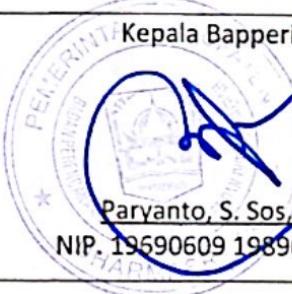
Pengamanan, dan Pengawalan		bahaya penyakit masyarakat					
Tujuan : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum							

Pulau Punjung, Juni 2024

PI. KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN DHARMASRAYA,



Tim Verifikasi

 <p>Inspektur Drs. Andy Sumanto, CfrA NIP. 19681220 199009 1 001</p>	 <p>Kepala BKD Asnl AP, M.Si NIP. 19750225 199501 1 001</p>	 <p>Kepala Bapperida Paryanto, S. Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001</p>	 <p>Kepala Dinas Sosial P3APPKB MARTIN EFENDI, S.Hut, M.M NIP. 19790905 200801 1 018</p>
--	--	--	--

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
TAHUN ANGGARAN : 2025

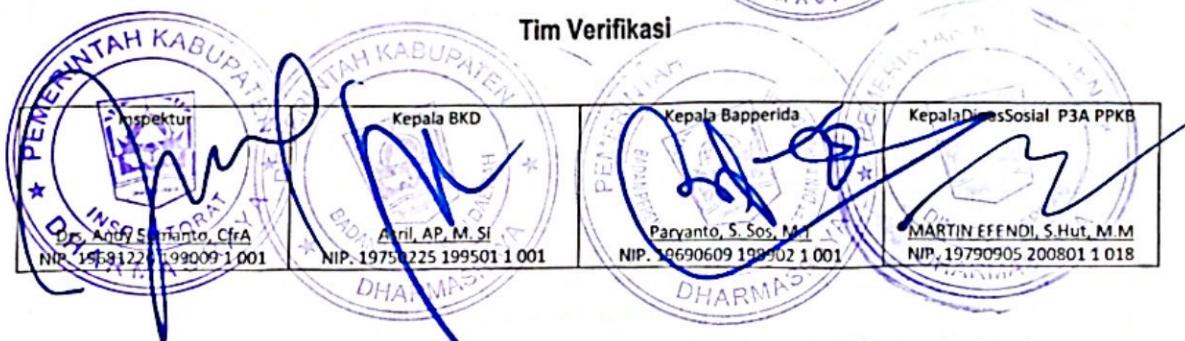
PROGRAM	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
KODE PROGRAM	1.05.02	
KEGIATAN	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
HASIL/OUTPUT	Terlaksananya Patroli Rutin Satpol PP terutama pada Pelajar yang tidak masuk pada jam pelajaran	
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Dalam Operasi penertiban Pelajar, yang terjaring kebanyakan siswa laki-laki dibanding perempuan. Siswa yang terjaring kedapatan merokok Adanya laporan masyarakat tentang siswa yang Berkeliaran pada jam pelajaran diindikasikan menggunakan / menghisap lem.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan Akses : Masih kurangnya manfaat Kegiatan Patroli Rutin Satpol PP pelajar laki-laki dibandingkan dengan pelajar perempuan.</p> <p>Partisipasi: Masih rendahnya keikutsertaan masyarakat tentang penyakit dalam menjaga Ketenteraman dan ketertiban umum</p> <p>Kontrol: Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya laki-laki yang seharusnya lebih banyak diberi penyuluhan tentang dampak dan bahaya Penyakit Masyarakat.</p> <p>Manfaat : Kurangnya Sosialisasi penyuluhan dan pembinaan dari pihak-pihak terkait tentang bahaya penyakit masyarakat</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Jumlah Patroli rutin Saatpol PP yang masih belum mencapai target SPM b) Pemahaman SDM yang kurang tentang Pengarusutamaan Gender <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Masih rendahnya alokasi dana terhadap kegiatan Patroli Satpol PP b) Masih kurangnya Pengawasan bersama baik pihak keluarga maupun sekolah 	
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Meningkatkan persentase Sosialisasi dan penyuluhan terhadap siswa laki-laki
	Tujuan	Agar pelajar laki-laki tidak berkeliaran pada jam pelajaran
	Alokasi Anggaran	

	Komponen/ Aktifitas 2	Meningkatkan Patroli rutin Satpol pp
	Tujuan	Memberikan efek jera kepada pelajar yang berkeliaran pada jam pelajaran
	Alokasi Anggaran	Rp. 253.000.000,-
	Total Anggaran	Rp. 253.000.000,-
Capaian Program	<p>Out put Terlaksananya Patroli Rutin Satpol PP terutama pada Pelajar yang tidak masuk pada jam pelajaran</p> <p>Out come Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p>	

Pulau Punjung, Juni 2024
**PII, KEPALA SATPOL PP DAN
DAMKAR**



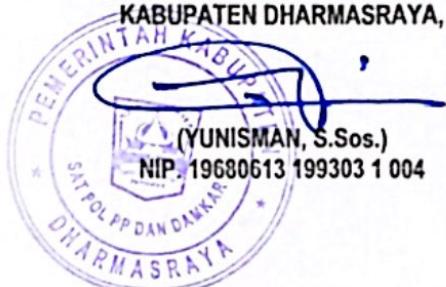
Tim Verifikasi



FORM KAK/ TOR

Program		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sasaran Program		Terlaksananya Patroli Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi dan Pembebasan Biaya Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Gambaran Umum	Patroli Rutin dan Pengamanan Kegiatan Daerah dan Masyarakat
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Patroli Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Indikator Kinerja	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Melakukan Patroli pada tempat-tempat yang diindikasikan adanya Gangguan Trantibum
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Patroli, Sosialisasi dan Pengamanan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Wilayah Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		<p>Pelaksana : PPTK Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan</p> <p>Penanggung Jawab : Kepala Satpol PP dan Damkar</p>
Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2025	
Biaya	Rp. 253.000.000,-	

Pulau Punjung, Juni 2024
Plt, KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN DHARMASRAYA,



MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD SEKRETARIAT DAERAH

OPD : Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

PROGRAM : Penataan Organisasi

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
						3. sosialisasi secara massive mengenai pentingnya penerapan SAKIP dan RB terhadap pemerintahan melalui daring maupun luring		Out Come : - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Indeks Reformasi Birokrasi



Tim Verifikasi	Inspektur	Kepala BKD	Kepala BAPPERIDA	Kepala Dinas Sosial P3APPKB
Drs. Andy Sumanto, Cfa NIP 19681220 199009 1 001	Kepala BKD Asril, AP, M. Si NIP 19750225 199501 1 001	Kepala BAPPERIDA Parwanto, S. Sos, M.T NIP 19690609 198902 1 001	MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP 19790905 200801 1 018	

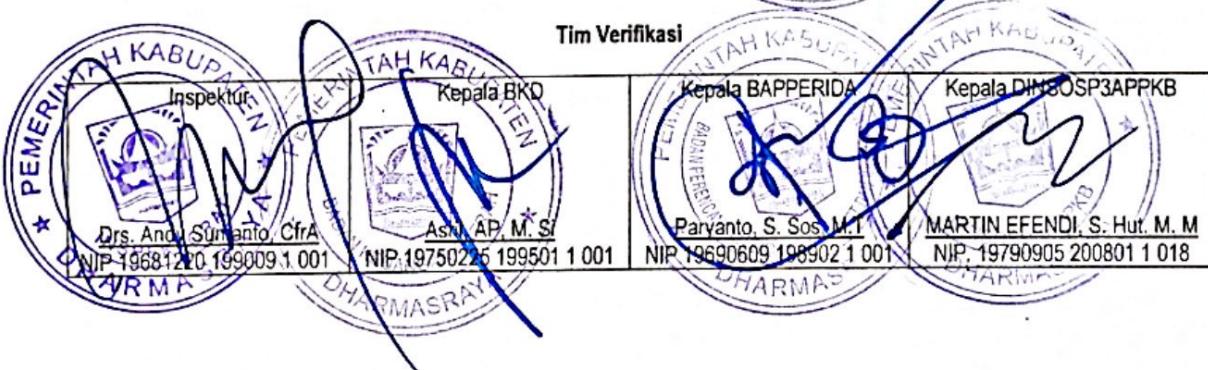
GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya

TAHUN ANGGARAN : 2024

PROGRAM	Penataan Organisasi
KODE PROGRAM	4.01.1.2.13
KEGIATAN	4.01.1.2.13.3
HASIL/ OUTPUT	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 dari 27 OPD terlambat dalam penyusunan LAKIP dan dokumen SAKIP lainnya 7 dari 11 Kecamatan terlambat dalam penyusunan LAKIP dan dokumen SAKIP lainnya - 2 dari 27 OPD tidak Melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses : Beberapa Kecamatan memiliki Akses yang sulit, seperti Kecamatan Asam Jujuhan, dan Kecamatan Sembilan Koto</p> <p>Partisipasi :</p> <p>Kontrol : Beberapa Pimpinan Instansi Pemerintah tidak peduli dengan Penyusunan SAKIP dan Implementasi RB</p> <p>Manfaat : Tidak Semua OPD yang melaksanakan pemerintahan secara efektif dan efisien.</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas SDM yang memahami tentang Reformasi Birokrasi dan SAKIP kurang memadai - Kurangnya Komitmen Pimpinan Instansi Pemerintah - Kurangnya Sosialisasi tentang pentingnya penerapan SAKIP dan RB dalam menjalankan pemerintahan <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan mengenai Penerapan SAKIP dan RB mengalami perubahan dan tidak ada pendampingan dari Provinsi bahkan Menpan-RB tentang strategi peningkatan pelaksanaan SAKIP dan RB - Kelengkapan data
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. TOLAK UKUR Jumlah Dana : 88.570.000,-</p> <p>2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA <u>INPUT</u> Dana yang dibutuhkan 88.57.000 <u>OUTPUT</u> Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan implementasi reformasi birokrasi</p>

	OUTCOME Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Meningkatkan kapasitas SDM pengelola SAKIP dan RB dengan melaksanakan Bimtek serta bimbingan langsung ke OPD yang memiliki kesulitan akses terhadap informasi mengenai SAKIP dan RB Tujuan Peningkatan SDM Pengelola SAKIP dan RB Alokasi Anggaran Rp.50.000.000
	Komponen/ Aktifitas 2	Meningkatkan komitmen pimpinan dengan penandatanganan komitmen terhadap kinerja setra penandatanganan pakta integritas untuk berkinerja baik Tujuan Peningkatan Komitmen Pimpinan Alokasi Anggaran Rp.18.000.000
	Komponen/ Aktifitas 3	Sosialisasi secara massive mengenai pentingnya penerapan SAKIP dan RB terhadap pemerintahan melalui daring maupun luring Tujuan Percepatan penyebaran informasi mengenai SAKIP dan RB Alokasi Anggaran Rp.20.570.000
	Total Anggaran	Rp.88.570.000
Capaian Program	Out put <ul style="list-style-type: none"> - Persentase OPD dan Kecamatan yang menerapkan SAKIP dan RB - Persentase kecamatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM tentang penerapan SAKIP dan RB - Persentase OPD yang mendapatkan sosialisasi mengenai SAKIP dan RB Out come <ul style="list-style-type: none"> - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Indeks Reformasi Birokrasi 	



FORM KAK/ TOR

Program		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program		1. Nilai SAKIP 2. Nilai LPPD
Kegiatan		Penataan Organisasi
Sub Kegiatan		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERPRES No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023 tentang perubahan peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
	Gambaran Umum	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di singkat SAKIP merupakan sistem yang memastikan jalannya pemerintahan secara efektif dan efisien, sehingga tidak ada saturupiah anggaran pun yang tidak memiliki manfaat kepada masyarakat, dan Reformasi Birokrasi memastikan pemerintahan yang baik dan bersih
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Melaksanakan Bimbingan teknis, sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi mengenai penerapan SAKIP dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
	Indikator Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai SAKIP OPD - Jumlah OPD yang melakukan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
	Batasan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Bimtek SAKIP RB - Sosialisasi SAKIP RB - Penyusunan Laporan - Penyusunan dokumen SAKIP RB - Pengumpulan data dukung
Maksud dan Tujuan		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Rapat, Koordinasi, sosialisasi
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Pelaksana: Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Dharmasraya Penanggungjawab: Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya
Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2024	
Biaya	Rp. 88.570.000	



GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 1
Mengatasi Kesenjangan Gender

Kecamatan : SUNGAI RUMBAY
 Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
KEGIATAN: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya Yang di ikuti oleh 4 Nagari (Nagari Sungai Rumbai,Nagari Sungai Rumbai Timur, Nagari Kurnia Koto Salak, Kurnia Selatan)	Faktor Kesenjangan <u>Akses :</u> <u>Partisipasi :</u> Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang	Sebab Kesenjangan Internal - belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan untuk menghadiri musrenbang	Sebab Kesenjangan Eksternal - Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang	Reformulasi Tujuan Terumuskannya usulan program Prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2025 yang responsif gender	Rencana Aksi Mengumpulkan DURKP Nagari Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan	Data Dasar (Baseline) Meningkatnya kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur	Indikator Gender Output: Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing –masing usulan yang menjadi prioritas
SUB KEGIATAN Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan Di Desa	Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang Tahun 2021 : 98 org Tahun 2022 : 100 org Tahun 2023 : 123 org Tahun 2024 : 125 org Tahun 2021 dari 98 Orang ada, diikuti oleh	 <u>Manfaat :</u> Belum semua masyarakat perempuan yang disediakan - belum paham betul tentang pengasutan gender	 Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang dari calon peserta	 Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta	 Distribusi undangan ke nagari	 Menjalin koordinasi dan sosialisasi dengan pihak terkait secara internal sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	 Dari kehadiran tahun 2024 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, perbandingannya laki-laki 68% dan perempuan 32%	Input: Rp.25.000,000,- Outcome: Untuk melihat usulan masing – masing nagari yang mendukung adannya

TUJUAN: Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD	sebanyak 52 orang peserta laki-laki dan 46 Orang peserta perempuan	- Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang	perempuan tidak banyak memberikan pendapat	Menyampaikan saran ke bappeda untuk membuat regulasi tentang keterwakilan Perempuan dan anak di Musenbang	usulan Peserta Laki-laki 32,2 % dan perempuan meningkat 20,25 %	kegiatan yang responsif gender
SASARAN Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	<p>Tahun 2022 di ikuti oleh 100 orang peserta laki-laki 55 dan 45 orang peserta perempuan</p> <p>Tahun 2023 di ikuti oleh 123 orang peserta laki-laki 80 dan 43 orang peserta perempuan serta ada 10 orang dari perwakilan Forum Anak</p> <p>Tahun 2024 diikuti oleh 125 orang peserta Laki-laki 85 Orang dan 40 orang orang perempuan.</p>			<p>Sosialisasi Musrenbang ke masyarakat</p> <p><i>Dari Notulen Usulan Musrenbang 2024 jumlah yang dundang 100. laki-laki yang hadir sebanyak 85Orang, dan yang menyampaikan usulan 35 orang(42 %)</i></p>	<p><i>Musrenbang yang dundang 100. laki-laki yang hadir sebanyak 85Orang, dan yang menyampaikan usulan 35 orang(42 %)</i></p>	Output: Melakukan Sosialisai Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang Input: Rp.25.000.000 Outcome: Menigkatnya tingkat kehadiran dan keberianan Perempuan menyampaikan usulan dalam proses pelaksanaan musrenbang, serta tertampungnya pada Musrenbang RKPD Kabupaten yang responsif gender

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	<p>Dari Notulen Usulan Musrenbang 2024 jumlah yang dundang 100 laki-laki yang hadir sebanyak 85 Orang. dan yang menyampaikan usulan 35 orang(42 %)</p> <p>peserta perempuan yang di undang 60. orang dan yang hadir 40 Orang serta yang menyampaikan usulan sebanyak 23 orang (57%)</p>	<u>Kontrol</u> Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya	Adanya kekurangan pegawai di bidang PMN yang mengelola Musrenbang Kecamatan				<p>peserta perempuan yang di undang 60. orang dan yang hadir 40 Orang serta yang menyampaikan usulan sebanyak 23 orang (57%)</p>	



TIM VERIFIKASI

 Inspektur Drs. ANDI SUMANTO, CfrA NIP. 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD ASRI, AP,Msi NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bappperida PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial,P3A.PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut, MM NIP. 19820521 200012 1 002
--	--	---	--

FORMAT GBS (1)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)															
Mengatasi Kesenjangan Gender															
SKPD	: KECAMATAN SUNGAI RUMBIAI														
TAHUN ANGGARAN	: 2024														
PROGRAM	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan														
KODE PROGRAM	7.01.03														
KEGIATAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa														
HASIL/OUTPUT	Terumuskannya prioritas usulan Musrenbang Kecamatan yang tertampung pada Musrenbang RKPD Tahun Anggaran 2024 yang responsif gender														
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya; Di Kecamatan Sungai Rumbia terdiri dari 4 Nagari masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2024 diikuti oleh 125 orang peserta diantaranya 85 orang peserta laki-laki dan 40 orang perempuan. <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sangat sedikit Keterwakilan perempuan karena belum adanya aturan yang mewajibkan tingkat keterwakilan perempuan dan komitmen pihak terkait tentang pelaksanaan musrenbang. b. Masih sedikit perwakilan perempuan yang memberikan atau mengajukan usulan dalam kegiatan Musrenbang. 														
RENCANA AKSI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Komponen/ Aktifitas 1</td> <td style="padding: 5px;">Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing –masing usulan yang menjadi prioritas</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tujuan</td> <td style="padding: 5px;">Untuk melihat usulan masing –masing nagari yang mendukung adannya kegiatan yang responsif gender</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Alokasi Anggaran</td> <td style="padding: 5px;">25.000.000,-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Komponen/ aktifitas 2</td> <td style="padding: 5px;">Melakukan Sosialisasi Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tujuan</td> <td style="padding: 5px;">Supaya perwakilan perempuan lebih aktif untuk menyampaikan usulan kegiatan pada kegiatan musrenbang</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Alokasi Anggaran</td> <td style="padding: 5px;">25.000.000,-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Total anggaran</td> <td style="padding: 5px;">Rp. 50.000.000,-</td> </tr> </table>	Komponen/ Aktifitas 1	Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing –masing usulan yang menjadi prioritas	Tujuan	Untuk melihat usulan masing –masing nagari yang mendukung adannya kegiatan yang responsif gender	Alokasi Anggaran	25.000.000,-	Komponen/ aktifitas 2	Melakukan Sosialisasi Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang	Tujuan	Supaya perwakilan perempuan lebih aktif untuk menyampaikan usulan kegiatan pada kegiatan musrenbang	Alokasi Anggaran	25.000.000,-	Total anggaran	Rp. 50.000.000,-
Komponen/ Aktifitas 1	Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing –masing usulan yang menjadi prioritas														
Tujuan	Untuk melihat usulan masing –masing nagari yang mendukung adannya kegiatan yang responsif gender														
Alokasi Anggaran	25.000.000,-														
Komponen/ aktifitas 2	Melakukan Sosialisasi Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang														
Tujuan	Supaya perwakilan perempuan lebih aktif untuk menyampaikan usulan kegiatan pada kegiatan musrenbang														
Alokasi Anggaran	25.000.000,-														
Total anggaran	Rp. 50.000.000,-														
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Menigkatnya tingkat kehadiran dan keberanahan Perempuan menyampaikan usulan dalam proses pelaksanaan musrenbang, serta terwujudnya pada Musrenbang RKPD Kabupaten yang responsif gender														



TIM VERIFIKASI

Inspektor	Kepala BKD	Kepala Bappperida	Kepala Dinas Sosial,P3A.PPKB
Drs. ANDI SUMANTO, C.H.A NIP. 19681220 199009 1 001	ASRIL AP,Msi NIP. 19750225 199501 1 001	PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	MARTIN EFENDI, S.Hut, MM NIP. 19820521 200012 1 002

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 2

Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat (service delivery)

Kecamatan : SUNGAI RUMBIAI

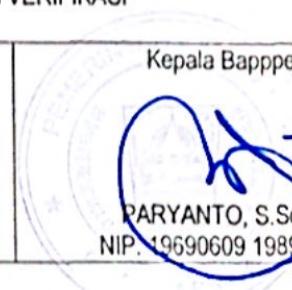
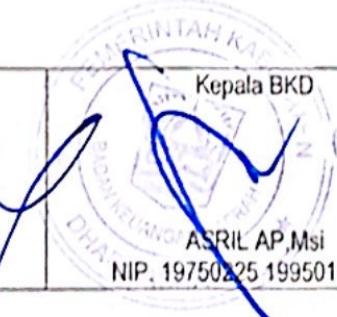
Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Data Pembuka Wawasan		Isu Gender		Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan			Monitoring
KEGIATAN: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Adanya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
	Jumlah Layanan Paten 2023 Non Disabilitas 1.147 org Disabilitas 0 orang	Akses : Partisipasi : Disiapkan jalur khusus untuk pelayanan disabilitas, disiapkan loket khusus disabilitas	- Pelayanan khusus untuk disabilitas belum diperhatikan secara khusus	Minimnya warga penyandang Disabilitas mengurus kelengkapan biodata warganegara	Terpenuhinya layanan untuk penyandang Disabilitas	Menyediakan Sarana dan Prasarana bagi penyandang Disabilitas	Meningkatnya keluarga yang membawa penyandang Disabilitas mengurus pelayanan	Output : Tersedianya pengadaan kursi roda bagi penyandang disabilitas sebanyak 5 buah dan tersedianya pembuatan jalur disabilitas
TUJUAN: Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan SOP	Jumlah Data Disabilitas dikecamatan Sungai Rumbai, sebanyak 15 orang	Manfaat : Mempercepat proses alur pelayanan khusus disabilitas		-	Menyediakan loket khusus disabilitas	-	Tingkat pelayanan PATEN tahun 2023 Non Disabilitas 102 % Disabilitas 0,01 %	Tersedianya loket khusus disabilitas Input: Rp. 75.000.000 Outcome: Terlaksananya Pengadaan kursi roda dan pembuatan jalur untuk penyandang disabilitas Tersedianya loket khusus disabilitas Output: Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan penyandang disabilitas Input: Rp. 3.500.000,-
SASARAN Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan		Kontrol Memastikan Sarana dan Prasarana penunjang Disabilitas tersedia dan berfungsi dengan baik						

umum dan
Pemberdayaan
masyarakat di
kecamatan

Outcome :
Meningkatnya
penyandang
disabilitas yang
melakukan
permohonan
dokumen melalui
PATEN Kecamatan
Output :
Terlaksananya
koordinasi
dengan lintas sector
Input : Rp.
1.500.000,-
Outcome :
Meningkatnya
Sinergi/Koordinasi
Lintas Sektor

TIM VERIFIKASI

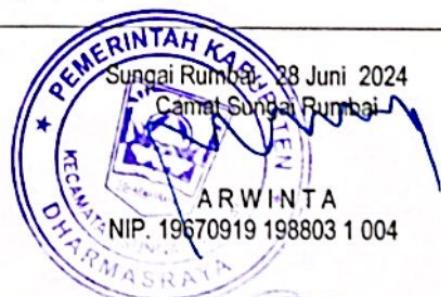


FORMAT GBS (2)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat (service delivery)

SKPD	: KECAMATAN SUNGAI RUMBIAI																																
TAHUN ANGGARAN	: 2025																																
PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																																
KODE PROGRAM	7.01.02																																
KEGIATAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																																
HASIL/OUTPUT	(Diambil dari GAP langkah 6)																																
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) b. Jumlah layanan Paten Tahun 2023 Non Disabilitas 1.147 orang, Yang Disabilitas tidak ada c. Jumlah Data Disabilitas diKecamatan Sungai Rumbai sebanyak 15 Orang <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Minimnya warga penyandang Disabilitas mengurus kelengkapan biodata warganegara b. Pelayanan khusus untuk disabilitas belum diperhatikan secara khusus c. Disiapkan jalur khusus untuk pelayanan disabilitas d. Disiapkan loket khusus disabilitas 																																
RENCANA AKSI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Komponen/ Aktifitas 1</td><td colspan="2">(Diambil dari GAP langkah 7)</td></tr> <tr> <td>Tujuan</td><td colspan="2">Menyediakan Jalur Khusus dan kursi roda untuk penyandang disabilitas</td></tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td><td colspan="2">Rp. 75.000.000,-</td></tr> <tr> <td style="width: 33%;">Komponen/ aktifitas 2</td><td colspan="2">(Diambil dari GAP langkah 7)</td></tr> <tr> <td>Tujuan</td><td colspan="2">Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan penyandang disabilitas</td></tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td><td colspan="2">Rp.3.500.000,-</td></tr> <tr> <td style="width: 33%;">Komponen/ aktifitas 3</td><td colspan="2">(Diambil dari GAP langkah 7)</td></tr> <tr> <td>Tujuan</td><td colspan="2">Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sector</td></tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td><td colspan="2">Rp. 1.500.000,-</td></tr> <tr> <td style="width: 33%;">Total anggaran</td><td colspan="2">Rp. 80.000.000,-</td></tr> </table>			Komponen/ Aktifitas 1	(Diambil dari GAP langkah 7)		Tujuan	Menyediakan Jalur Khusus dan kursi roda untuk penyandang disabilitas		Alokasi Anggaran	Rp. 75.000.000,-		Komponen/ aktifitas 2	(Diambil dari GAP langkah 7)		Tujuan	Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan penyandang disabilitas		Alokasi Anggaran	Rp.3.500.000,-		Komponen/ aktifitas 3	(Diambil dari GAP langkah 7)		Tujuan	Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sector		Alokasi Anggaran	Rp. 1.500.000,-		Total anggaran	Rp. 80.000.000,-	
Komponen/ Aktifitas 1	(Diambil dari GAP langkah 7)																																
Tujuan	Menyediakan Jalur Khusus dan kursi roda untuk penyandang disabilitas																																
Alokasi Anggaran	Rp. 75.000.000,-																																
Komponen/ aktifitas 2	(Diambil dari GAP langkah 7)																																
Tujuan	Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan penyandang disabilitas																																
Alokasi Anggaran	Rp.3.500.000,-																																
Komponen/ aktifitas 3	(Diambil dari GAP langkah 7)																																
Tujuan	Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sector																																
Alokasi Anggaran	Rp. 1.500.000,-																																
Total anggaran	Rp. 80.000.000,-																																
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Terciptanya Layanan PATEN Kecamatan yang responsif gender																																



TIM VERIFIKASI

Drs. ANDI SUMANTO, CFA NIP. 19681220 19900901 001	Kepala BKD AGRIL AP, Msi NIP. 19750225 199501 1 001	Kepala Bappenda PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	Kepala Dinas Sosial/P3A.PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut. MM NIP. 19820521 200012 1 002
--	---	---	--

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 1
Mengatasi Kesenjangan Gender

Kecamatan : TIUMANG
 Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
KEGIATAN: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya Yang di ikuti oleh 4 Nagari (Nagari Tiumang, Nagari sipangkur, Nagari sungai langkok, Nagari Koto beringin), Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang	Faktor Kesenjangan <u>Akses :</u> <u>Partisipasi :</u> <u>Manfaat :</u>	Sebab Kesenjangan Internal - belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang - Sedikitnya jumlah\kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan - belum paham betul tentang pengasutama an gender	Sebab Kesenjangan Eksternal Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang Kurangnya informasi tentang kegiatan peserta Musrenbang Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang Sosial Budaya Minang kabau, dimana	Reformulasi Tujuan Terumuskan-nya usulan program Perioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2025 yang responsif gender	Rencana Aksi Mengumpulkan DURKP Nagari Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan Distribusi undangan ke nagari Menjalin koordinasi dan sosialisasi dengan pihak terkait secara internal sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	Data Dasar (Baseline) Meningkatnya kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur Tersusunnya usulan prioritas kecamatan Dari kehadiran tahun 2024 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, perbandingannya a lak-laki 87,5% dan perempuan 12,5%	Indikator Gender Output: Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing -masing usulan yang menjadi perioritas Input: Rp. 10.810.000,- Outcome: Untuk melihat usulan masing - masing nagari yang mendukung
SUB KEGIATAN Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang Tahun 2021 : 80 org Tahun 2022 : 80 org Tahun 2023 : 100 org Tahun 2024 : 80 org							

<p>TUJUAN: Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD</p> <p>SASARAN Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan</p>	<p>Tahun 2022 di ikuti oleh 80 orang peserta laki-laki 49 dan 31 orang peserta perempuan</p> <p>Tahun 2023 di ikuti oleh 100 orang peserta laki-laki 66 dan 30 orang peserta perempuan serta ada 4 orang dari perwakilan Forum Anak</p> <p>Tahun 2024 diikuti oleh 80 orang peserta Laki-laki 70 orang dan 10 orang orang perempuan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang 	<p>perempuan tidak banyak memberikan pendapat</p>		<p>Menyampaikan saran ke bappeda untuk membuat regulasi tentang keterwakilan Perempuan dan anak di Musenbang</p> <p>Sosialisasi Musrenbang ke masyarakat</p>	<p>Meningkatnya usulan Peserta Laki-laki 50 % dan perempuan meningkat 50 %</p> <p><i>Dari Notulen Usulan Musrenbang 2024 jumlah yang dundang 80. laki -laki yang hadir sebanyak 70Orang, dan yang menyampaikan usulan 10 orang(12,5 %)</i></p>	<p>adannya kegiatan yang responsif gender</p> <p>Output: Melakukan Sosialisasi Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang</p> <p>Input: Rp1.290.000,-</p> <p>Outcome: Menigkatnya tingkat kehadiran dan keberanian Perempuan menyampaikan usulan dalam proses pelaksanaan musrenbang, serta tertampungnya pada Musrenbang RKPD Kabupaten yang responsif gender</p>
--	--	--	---	--	--	---	---

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	<p>Dari Notulen Usulan Musrenbang 2024 jumlah yang dundang 80 laki-laki yang hadir sebanyak 70 Orang. dan yang menyampaikan usulan 10 orang(12,5 %)</p> <p>peserta perempuan yang di undang 10. orang dan yang hadir 10 Orang serta yang menyampaikan usulan sebanyak 5 orang (50%)</p>	<u>Kontrol</u> Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya	Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan				<p>peserta perempuan yang di undang 10. orang dan yang hadir 10 Orang serta yang menyampaikan usulan sebanyak 5 orang (50%)</p>	



TIM VERIFIKASI

<p>Inspektorat Drs. ANDI SUMANTO, CfrA NIP: 1978112201990901 001</p>	<p>Kepala BKD ASRIL AP, Msi NIP: 197502251995011001</p>	<p>Kepala Bappperida RARYANTO, S.Sos, M.T NIP: 196906091989021001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, P3A.PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut, MM NIP: 198205212000121002</p>
--	---	---	---

FORMAT GBS (1)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)															
Mengatasi Kesenjangan Gender															
SKPD	: KECAMATAN TIUMANG														
TAHUN ANGGARAN	: 2024														
PROGRAM	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan														
KODE PROGRAM	7.01.03														
KEGIATAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa														
HASIL/OUTPUT	Terumuskannya perioritas usulan Musrenbang Kecamatan yang tertampung pada Musrenbang RKPD Tahun Anggaran 2025 yang responsif gender														
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya; Di Kecamatan Tiumang terdiri dari 4 Nagari masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2024 diikuti oleh 80 orang peserta diantaranya 70 orang peserta laki-laki dan 10 orang perempuan. <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sangat sedikit Keterwakilan perempuan karena belum adanya aturan yang mewajibkan tingkat keterwakilan perempuan dan komitmen pihak terkait tentang pelaksanaan musrenbang. b. Masih sedikit perwakilan perempuan yang memberikan atau mengajukan usulan dalam kegiatan Musrenbang. 														
RENCANA AKSI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top; padding: 5px;">Komponen/ Aktifitas 1</td> <td style="padding: 5px;">Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing-masing usulan yang menjadi perioritas</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;">Tujuan</td> <td style="padding: 5px;">Untuk melihat usulan masing-masing nagari yang mendukung adannya kegiatan yang responsif gender</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;">Alokasi Anggaran</td> <td style="padding: 5px;">10.810.000,-</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;">Komponen/ aktifitas 2</td> <td style="padding: 5px;">Melakukan Sosialisai Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;">Tujuan</td> <td style="padding: 5px;">Supaya perwakilan perempuan lebih aktif untuk menyampaikan usulan kegiatan pada kegiatan musrenbang</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;">Alokasi Anggaran</td> <td style="padding: 5px;">1.290.000</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 5px;">Total anggaran</td> <td style="padding: 5px;">Rp. 12.100.000,-</td> </tr> </table>	Komponen/ Aktifitas 1	Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing-masing usulan yang menjadi perioritas	Tujuan	Untuk melihat usulan masing-masing nagari yang mendukung adannya kegiatan yang responsif gender	Alokasi Anggaran	10.810.000,-	Komponen/ aktifitas 2	Melakukan Sosialisai Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang	Tujuan	Supaya perwakilan perempuan lebih aktif untuk menyampaikan usulan kegiatan pada kegiatan musrenbang	Alokasi Anggaran	1.290.000	Total anggaran	Rp. 12.100.000,-
Komponen/ Aktifitas 1	Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing-masing usulan yang menjadi perioritas														
Tujuan	Untuk melihat usulan masing-masing nagari yang mendukung adannya kegiatan yang responsif gender														
Alokasi Anggaran	10.810.000,-														
Komponen/ aktifitas 2	Melakukan Sosialisai Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang														
Tujuan	Supaya perwakilan perempuan lebih aktif untuk menyampaikan usulan kegiatan pada kegiatan musrenbang														
Alokasi Anggaran	1.290.000														
Total anggaran	Rp. 12.100.000,-														
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Menigkatnya tingkat kehadiran dan keberanahan Perempuan menyampaikan usulan dalam proses pelaksanaan musrenbang, serta tertampungnya pada Musrenbang RKPD Kabupaten yang responsif gender														

Tiumang, 19 Juni 2024

Cajrat Tiumang

Marjilis, SH, MH

NIP. 197004022008011016

TIM VERIFIKASI

 Inspektur Drs. ANDI SUMANTO, CFA NIP. 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD ASRIL AP, Msi NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bappperida PARYANTO, S.Sos. M.T NIP. 19690609 199502 1 001	 Kepala Dinas Sosial P3A.PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut. MM NIP. 19820521 200012 1 002
--	--	---	---

FORM KAKI / TOR

Program		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan
Sasaran Program		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan keluarahan
Kegiatan		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan pembangunan di desa
Latar Belakang	DasarHukum	Surat Bupati Dharmasraya No. 000.7.2/34/ Bappperida tanggal 27 Februari 2024 perihal Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan
	Gambaran Umum	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti Musrenbang
	Indikator Kinerja	Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Merumuskan Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Mengundang .utusan nagari dan stakeholder terkait untuk merumuskan usulan prioritas musrenbang kecamatan dalam satu ruang dan waktu yang telah ditentukan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kecamatan Tiumang
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan Di Desa Penanggung Jawab : Camat tiumang
Jadwal		Bulan Februari 2025
Biaya		Rp. 12.100.000



MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
Kesenjangan Gender antara Laki – Laki dan Perempuan

OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

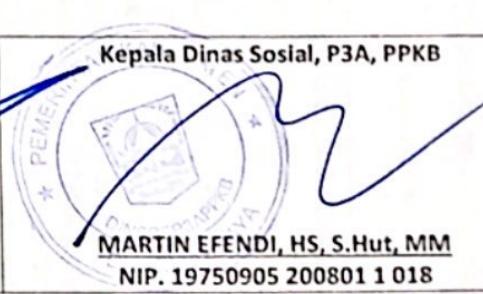
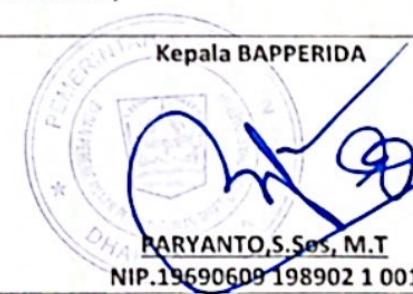
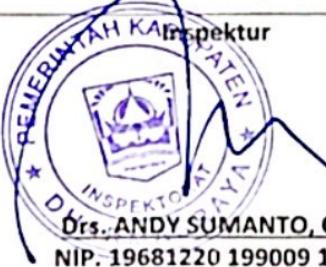
PROGRAM : Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dilihat dari sebelumnya kegiatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba mengundang pelajar dan mahasiswa se- Kab. Dharmasraya dalam ke ikut sertaannya lebih di dominasi oleh kaum laki- laki di karenakan lebih banyaknya kaum laki-laki yang menyalahgunaan Narkoba di Bandingkan Perempuan. Kaum perempuan juga harus bisa berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba agar tidak timbul kesenjangan gender/ responsive gender.	<p>Akses: Pada umumnya Keikutsertaan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan penyalahgunaan Narkoba lebih di dominasi Kaum Laki- Laki</p> <p>Partisipasi: Perempuan Kurang berperan Aktif dalam Ke ikut sertaan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</p> <p>Control: Masih kurangnya Pemahaman pengetahuan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar dan Mahasiswa</p> <p>Manfaat: Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Generasi Muda</p>	<p>Peserta laki-laki lebih banyak dari pada peserta Perempuan dan keterlibatan Laki-laki dalam penyalahgunaan narkoba lebih banyak karena kurangnya pengawasan dari orang tua</p>	<p>Kurangnya peserta perempuan dikarenakan yang lebih banyak terpengaruh oleh lingkungan dalam penyalahgunaan narkotika adalah laki- laki</p>	<p>1. Meningkatnya Pemahaman tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda se-Kab. Dharmasraya</p> <p>2. Meningkatnya Peran Aktif Bagi Generasi Muda dalam mensosialisasik a kepada Masyarakat yang tidak tau akan pentingnya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.</p>	<p>Memberikan Penyuluhan Kepada Generasi Muda agar meningkatkan kesadaran akan bahaya peredaran/Penggunaan Narkotika</p>	<p>Dalam Kegiatan ini akan mengundang Pelajar dan Mahasiswa sebanyak 30 orang perseta yang responsive gender</p>	<p>Input: Jumlah Dana Kegiatan ini sebesar Rp. 14.991.000</p> <p>Output:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemahaman tentang Penyalahgunaan Pencegahan Narkoba Bagi Generasi Muda 2. Bertambahnya jumlah Generasi Muda yang paham tentang bahaya Penyalagunaan pemakaian Narkoba <p>Outcome : Meningkatnya Pemahaman Generasi Muda tentang bahaya Nakoba</p>

Pulau Punjung, Juni 2024



TIM VERIFIKASI,



GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

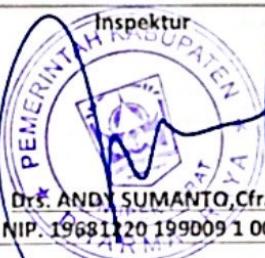
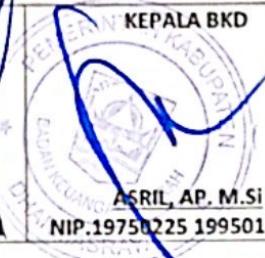
SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TAHUN ANGGARAN : 2024

PROGRAM	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
KEGIATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Ketahanan ekonomi social dan budaya		
KODE KEGIATAN	8.01.05		
HASIL / OUTPUT	1. Meningkatnya pemahaman tentang Penyalahgunaan Pencehagan Narkoba Bagi Generasi Muda 2. Bertambahnya jumlah Generasi Muda yang paham tentang bahaya Penyalagunaan pemakaian Narkoba		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Dilihat dari sebelumnya kegiatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba mengundang pelajar dan mahasiswa se- Kab. Dharmasraya dalam ke ikut sertaannya lebih di dominasi oleh kaum laki-laki di karenakan lebih banyaknya kaum laki-laki yang menyalahgunaan Narkoba di Bandingkan Perempuan. Kaum perempuan juga harus bisa berperan aktif dalam pencehagan penyalahgunaan Narkoba agar tidak timbul kesenjangan gender/ responsive gender. Dalam kegiatan ini <i>Mengundang Pelajar dan Mahasiswa</i> 30 Orang.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses: Pada umumnya Keikutsertaan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan penyalahgunaan Narkoba lebih di dominasi Kaum Laki-Laki</p> <p>Partisipasi: Perempuan Kurang berperan Aktif dalam Ke ikut sertaan Penyuluhan Pencehahan Penyalahgunaan Narkoba</p> <p>Control: Masih kurangnya Pemahaman pengetahuan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar dan Mahasiswa</p> <p>Manfaat : Meningkatnya pengaruhutamaan gender dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Generasi Muda</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peserta laki-laki lebih banyak dari pada peserta Perempuan dan keterlibatan Laki-laki dalam penyalahgunaan narkoba lebih banyak karena kurangnya pengawasan dari orang tua <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya peserta perempuan dikarenakan yang lebih banyak terpengaruh oleh lingkungan dalam penyalahgunaan narkotika adalah laki-laki 		
RENCANA AKSI	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan Penyuluhan Kepada Generasi Muda agar meningkatkan kesadaran akan bahaya peredaran/Penggunaan Narkotika 		
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. Tolak Ukur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dana Kegiatan ini sebesar Rp. 14.991.000 <p>2. Indikator dan Target Kinerja</p> <p>Input :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dana Kegiatan ini sebesar Rp. 14.991.000.- <p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pemahaman tentang Penyalahgunaan Pencehagan Narkoba Bagi Generasi Muda - Bertambahnya jumlah Generasi Muda yang paham tentang bahaya Penyalagunaan pemakaian Narkoba <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Pemahaman Generasi Muda tentang bahaya Nakoba 		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 14.991.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Memberikan Penyuluhan Kepada Generasi Muda agar meningkatkan kesadaran akan bahaya peredaran/Penggunaan Narkotika	
	Masukan	Rp. 14.991.000,-	
	Keluaran	Jumlah Generasi Muda yang paham tentang bahaya Penyalagunaan pemakaian Narkoba	
	Hasil	Meningkatnya pemahaman tentang Penyalahgunaan Pencehagan Narkoba Bagi Generasi Muda	

Pulau Punjung, Juni 2024



VERIFIKASI KEGIATAN

 <p>Inspektorat PEMERINTAH KABUPATEN Dr. ANDY SUMANTO, Cfr.A NIP. 19681120 199009 1 001</p>	 <p>KEPALA BKD PEMERINTAH KABUPATEN ASRIL, AP. M.Si NIP. 19750225 199501 1 001</p>	 <p>Kepala BAPPERIDA PEMERINTAH KABUPATEN PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001</p>	 <p>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB PEMERINTAH KABUPATEN MARTIN EFENDI, HS, S.Hut, MM NIP. 19750905 200801 1 018</p>
--	---	---	--

FORM KAK/ TOR

Program		Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,social dan Budaya
Sasaran Program		Generasi Muda (Pelajar dan Mahasiswa)
Kegiatan		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan ekonomi social dan budaya
Sub Kegiatan		Pencegahan Penyalagunaan Narkoba,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan di Daerah
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peringatan Hari HANI
	Gambaran Umum	
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Penyuluhan Pencegahan Penyalagunaan Narkoba,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan di Daerah kepada anak remaja
	Indikator Kinerja	Bertambahnya pengetahuan pelajar dan siswa terhadap bahayanya pemakaian Narkoba
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan	Bertambahnya wawasan tentang bahaya pemakaian Narkoba bagi generasi muda	
Cara Pelaksanaan Kegiatan	Memberikan penyuluhan kepada peserta	
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya	
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan	Pelaksana : PPTK Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Penanggung Jawab : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	
Jadwal	Januari s/d Desember 2024	
Biaya	14.991.000	

Pulau Punjung, Juni 2024



RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024

Urusan	: Pemerintahan Umum	
Unit Organisasi	8.01.00.00.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi	8.01.00.00.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program	-	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
Kegiatan	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi social dan Budaya
Sub Kegiatan	8.01.05.2.01.03	Pencegahan Penyalagunaan Narkoba,Fasilitasi Kerukunan Umat beragama dan penghayat Kepercayaan di Daerah
Sumber Pendanaan		APBD
Lokasi Kegiatan		Menyesuaikan
Waktu Pelaksanaan		Januari s/d Desember 2024
Kelompok Sasaran		
Jumlah 2022		
Jumlah 2023		
Jumlah 2024		14.991.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program Masukan Keluaran Hasil					
Rincian Hitungan					
Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN

Pulau Punjung, Juni 2024

